

BADAN POM

LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Jakarta

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja secara berkala sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban institusi dalam menjalankan peran strategis perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur dan objektif kepada pemberi mandat, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Melalui laporan ini, Balai Besar POM di Jakarta berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada hasil.

Capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dievaluasi berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, dengan mengacu pada prinsip profesionalisme, perlindungan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan capaian tahun berjalan terhadap target dalam periode Rencana Strategis 2025–2029, disertai analisis yang memadai terhadap realisasi anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas kinerja.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kinerja Balai Besar POM di Jakarta, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan. Lebih lanjut, laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta secara berkelanjutan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
BADAN POM

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF



Nilai Kinerja Organisasi mengacu pada kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025 sebesar 103,37%. Dalam mengemban tugas fungsinya, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis ”Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 104,88% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
    1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 111,19% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110% sesuai renlak .
    2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan capaian 106,85% dengan kategori Sangat Baik.
    3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 108,70% dengan kategori Sangat Baik.
    4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
    5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 105,73% dengan kategori Sangat Baik.
    6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 104,03% dengan kategori Sangat Baik.
    7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 105,55% dengan kategori Sangat Baik.
    8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 105,98% dengan kategori Sangat Baik.



9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 101,14% dengan kategori Sangat Baik.
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 102,03% dengan kategori Sangat Baik.
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 104,56% dengan kategori Sangat Baik.
12) Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian 106,35% dengan kategori Sangat Baik.
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta dengan capaian 103,41% dengan kategori Sangat Baik.
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian 107,68% dengan kategori Sangat Baik.
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100% dengan kategori Baik.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” dengan capaian 100,45% dengan kategori Sangat Baik.

3. Sasaran strategis ” Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan capaian sebesar 100,12% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 100,47% dengan kategori Sangat Baik.
2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
3) Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100% dengan kategori Baik.

4. Sasaran strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan capaian 142,31% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110% sesuai renlak .

5. Sasaran strategis “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 109,34% kategori “Sangat Baik”.

6. Sasaran strategis “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 104,17% dengan kategori “Sangat Baik”.

7. Sasaran strategis “Layanan Publik UPT yang prima” dengan capaian 105,11% dengan kategori “Sangat Baik”.

8. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” dengan capaian 98,23% termasuk kategori “Baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1) Nilai Pembangunan ZI UPT dengan capaian 100,12% dengan kategori Sangat Baik.
2) Nilai AKIP UPT dengan capaian 97,38% dengan kategori Baik.



3) Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
4) Indeks Manajemen Risiko UPT dengan capaian 95,41% dengan kategori Baik.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Jakarta pada Tahun 2025 antara **95,41%** sampai dengan **142,31%.** Persentase capaian indikator kinerja rendah pada indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar 95,41%, dimana capaian Nilai Kinerja Anggaran tidak mencapai target Tahun 2025. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal berupa perubahan sumber daya manusia pengelola risiko, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi risiko, proses identifikasi risiko masih bersifat *bottom up*, dan manajemen risiko belum terintegrasi optimal dalam proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatan masih terbatas pada administratif. Sehingga diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi risiko secara periodik serta pelaporan tindak lanjut mitigasi, sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko secara berjenjang, penegasan peran pemilik risiko serta kewajiban pembahasan risiko dalam rapat manajemen. Sedangkan persentase capaian indikator yang tertinggi pada indikator meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu sebesar 142,31%, di mana semua sarana yang difasilitasi mendapatkan IP CPPOB sesuai target dan nilai plusnya 58 sarana dari total 95 yang keluar IP CPOPB mendapatkan izin edar.
Progres Capaian Rincian *Output* (PCRO) berkisar antara **30,83% - 100%.** Progres Capaian Rincian *Output* (PCRO) rendah yaitu KIE sebesar 30,83%.

Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 diukur dengan 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sasaran kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,04 sampai 0,43. Ketidakefisienan penggunaan anggaran sebesar -0,04 terjadi pada sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal. Hal ini selaras dengan pencapaian realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko yang tidak mencapai target disebabkan karena



belum optimlanya proses monitoring dan evaluasi risiko, proses identifikasi risiko masih bersifat *bottom up*, dan manajemen risiko belum terintegrasi opimal dalam proses perencaaan serta pelaksanaan masih terbatas pada administratif.



HIGHLIGHT KINERJA



Pada Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta telah merealisasikan beragam program dan kegiatan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen yang konsisten dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan, sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang telah diimplementasikan di setiap bulannya sebagai berikut :

Januari 2025

1. **Pertemuan Pembahasan Strategi Cegah Tangkal Makanan dan Obat**

   Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta menggelar pertemuan dengan Direktorat Cegah Tangkal dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk membahas peningkatan strategi pencegahan dan penangkalan kejahatan obat dan makanan (OM). Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh monitoring dan evaluasi peta rawan cegah tangkal dengan tujuan meningkatkan efektivitas upaya tersebut. Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menekankan pentingnya data kerawanan kejahatan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan penindakan. Ia juga menyoroti tantangan dalam mencapai target monitoring dan evaluasi 100%, serta pentingnya sharing knowledge dengan BAIS terkait potensi peta rawan.



2. **Advokasi Lintas Sektor Pengawasan Obat dan Makanan**

Balai Besar POM di Jakarta mengadakan advokasi dengan lintas sektor terkait pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Redtop & Convention Center, Gambir, Jakarta Pusat. Undangan kegiatan terdiri atas lintas sektor yang terkait dengan tugas fungsi dari setiap poksi di Balai Besar POM di Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, ibu Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt, M.Si. Pada pembukaan disampaikan bahwa pengawasan obat dan makanan erat kaitannya dengan ketahanan nasional, kejahatan manusia, kemanusiaan, hubungan internasional, nilai ekonomi dan sisi keamanan.



3. **Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Informasi Obat dan Makanan.**

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian Badan Publik yang Informatif pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, bertempat di kantor Komisi Informasi DKI Jakarta.Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar menyampaikan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari upaya BBPOM di Jakarta untuk menciptakan badan publik yang informatif. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pentingnya meningkatkan transparansi informasi obat dan

makanan yang akurat sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang aman, akurat dan terpercaya.



Februari 2025

4. **Penghargaan *Agent of Change* Terbaik dan Pegawai Berprestasi**

   Penghargaan sebagai Terbaik 1 *Agent of Change* dan Terbaik 2 Pegawai Berprestasi Badan POM diraih BBPOM di Jakarta bertepatan dengan HUT ke-24 BPOM. Penyerahan penghargaan Terbaik 1 *Agent of Change* disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar yang diterima oleh Ketua Tim BBPOM di Jakarta Rini Asri. Penghargaan Terbaik 2 Pegawai Berprestasi Badan POM diterima oleh Ernawati Puji Rahayu yang merupakan Pegawai BBPOM di Jakarta dengan inovasi dalam penguatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif bagi masyarakat Indonesia. Penghargaan ini menjadi motivasi dan kebanggaan bagi BBPOM di Jakarta untuk terus mengukir pencapaian yang gemilang dengan meningkatkan kinerja dan semangat berprestasi.



5. Sosialisasi *Food Safety*

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan pentingnya keamanan pangan, BBPOM Jakarta berikan sosialisasi *Food Safety* di Gedung Traffic Management Center Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kegiatan diikuti 100 peserta yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Metro Jaya beserta jajaran di wilayah. Penyampaian materi juga diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Pasukan Pengamanan Presiden



(Pampampres).

6. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi melalui SELAYAR

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi BBPOM Jakarta kembali digelar melalui SELAYAR (Sharing Edukasi Lewat Layar untuk Masyarakat Jakarta), dengan mengusung tema **“** Bergizi dan Aman, untuk Hidup yang Semakin Nyaman”. Kegiatan edukasi ditujukan bagi kader keamanan pangan dan khususnya kader keamanan pangan pada kelurahan yang pernah diintervensi Program Keamanan Pangan oleh BBPOM di Jakarta, serta koordinator / pelaksana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Pada sambutan kegiatan, Kepala BBPOM Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar menyampaikan bahwa keamanan pangan menjadi tanggung jawab 3 pilar keamanan pangan, yaitu pelaku usaha pangan, pemerintah dan konsumen. Dengan kerjasama yang erat antara ketiga pilar ini, diharapkan sistem keamanan pangan dapat berjalan secara optimal, menjamin kesehatan masyarakat, dan mencegah terjadinya krisis pangan yang berisiko merugikan konsumen.



Maret 2025

7. Sinergisme dan kolaborasi pelaksanaan Keamanan Pangan Terpadu

Sebagai upaya mengoptimalkan sinergisme dan kolaborasi pelaksanaan program Keamanan Pangan Terpadu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025, BBPOM Jakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Kantor Walikota Jakarta Timur. Kegiatan ini dihadiri OPD terkait antara lain Bagian Perekonomian dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perumda Pasar Jaya. Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar menyampaikan program prioritas nasional yang akan dilaksanakan secara terpadu di Jakarta Barat yang meliputi program Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



8. Koordinasi Program Pasar Pangan Aman

BBPOM di Jakarta menggelar advokasi terpadu lintas sektor dalam rangka koordinasi untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan mengimplementasikan kegiatan Desa / Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara terpadu. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen oleh pimpinan beserta jajaran terkait di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan target lokus



intervensi program untuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Desa / Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

9. Kegiatan Pengawasan Pangan Menjelang Idul Fitri

Menjelang perayaan Idul Fitri, BBPOM di Jakarta kembali berkolaborasi dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan kegiatan pengawasan pangan pada Selasa di Pasar Modern Hypermart Puri Indah Jakarta Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dijual aman dikonsumsi, terutama menjelang Lebaran. terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.



April 2025

10. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta menggelar Pelatihan Kader Keamanan Pangan dalam rangka Desa/Kelurahan Pangan Aman di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Timur. Pelatihan ini merupakan rangkaian tahapan Program Desa / Kelurahan Pangan Aman untuk memperkuat pengawasan pangan berbasis komunitas. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari program intervensi keamanan pangan terpadu yang telah dicanangkan oleh BBPOM di Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membekali para kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi kader yang handal di komunitas mereka.



11. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE

BBPOM di Jakarta perdana melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama anggota DPR RI, Surya Utama, S.I.P. (Uya Kuya). Kegiatan dilaksanakan di wilayah Cilandak Jakarta Selatan, dihadiri 200 orang peserta.Dengan kegiatan KIE ini, diharapkan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan KIE ini kepada komunitasnya masing-masing dan dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih serta konsumsi pangan aman dan bergizi sehingga terwujud generasi sehat dan cerdas, dan pastinya selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).



12. Kegiatan Forum Komunikasi

BBPOM di Jakarta melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Cara Distribusi Obat yang Baik bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) di wilayah Jakarta Tahun 2025 secara *hybrid* dengan 39 peserta luring di Kantor BBPOM di Jakarta dan 288 peserta daring melalui aplikasi zoom meeting sebagai upaya mencegah diversi obat dan menjamin mutu obat sepanjang jalur distribusi sampai obat dikonsumsi oleh konsumen.



Mei 2025

13. ***Workshop* Keterbukaan Informasi Publik**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta menyelenggarakan *Workshop* Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan informasi layanan publik. Acara ini diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Jakarta dan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.W*orkshop* dibuka secara resmi oleh Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar. Dalam sambutannya beliau menyatakan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pegawai BBPOM di Jakarta dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat serta mampu mengelola informasi publik secara bertanggung jawab. *Workshop* ini menjadi langkah strategis BBPOM di Jakarta dalam memperkuat peran sebagai lembaga pengawas yang terbuka, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi di era digital.



14. Audiensi Terkait Perkara Obat-obat Tertentu

Kepala BBPOM di Jakarta melakukan audiensi kembali dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kegiatan juga dihadiri oleh Ketua Tim Intelijen dan Penyidikan; Ketua Tim Cegah Tangkal dan Siber; Koordinator Tim B; perwakilan Jaksa Penuntut Umum; dan seluruh Penyidik BBPOM di Jakarta. Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si. menyampaikan perihal tantangan dalam menangani perkara Obat-Obat Tertentu (OOT) yang semakin marak dengan modus yang semakin sulit diprediksi. Perlu adanya langkah bersama antara penyidik dan JPU agar pencegahan dan penanganan perkara tersebut tuntas hingga ke akarnya. Disampaikan juga terkait perkara *carry over* yang diharapkan dalam waktu dekat bisa diselesaikan hingga sidang pengadilan.



15. Kegiatan Gerakan Nasional Jamu Warisan Nusantara

Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta menggelar kegiatan seremonial minum jamu bersama kader dan komunitas keamanan pangan di Kelurahan Malakasari, Jakarta Timur. Acara ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Jamu Warisan Budaya Nusantara (JAWARA), yang

diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aman. Melalui momentum Hari Jamu Nasional ini, BBPOM di Jakarta berharap semangat cinta jamu dapat terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda, agar warisan budaya ini tidak hanya lestari, tetapi juga berdaya saing di era modern



Juni 2025

16. **BBPOM di Jakarta Raih Dua Penghargaan *Green Laboratory* BPOM 2025**

    Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada *Green Laboratorium Laboratory Forum and Awards* BPOM sebagai Juara Umum dan kategori Inovasi Terbaik tahun 2025. Penghargaan ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses seleksi dan penjurian baik administrasi maupun visitasi. Tim Juri berasal dari PPPOMN, Biro Umum, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Ahli Utama BPOM. Kepala BPOM menyatakan laboratorium harus bisa mengantisipasi tiga tantangan saat ini, yakni mode komunikasi yang berubah drastis, keamanan global, dan pergeseran iklim di bumi dengan inovasi yang mengedepankan efisiensi.

“Efisiensi penggunaan listrik dan kertas merupakan hasil terobosan inovatif *Eco-Office Lab* yang mendukung implementasi *green laboratory*” Prestasi yang diraih BBPOM di Jakarta merupakan bukti adanya perubahan pola pikir dan tanggung jawab institusi terhadap lingkungan. Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan peran penting BBPOM di Jakarta dalam pengawasan obat dan makanan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan laboratorium yang inovatif, hijau, dan peduli lingkungan.



17. Reakreditasi ke-5 oleh KAN, tekankan Mutu dan Konsistensi Laboratorium

Reakreditasi ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan pengujian laboratorium dalam menerapkan standar ISO/IEC 17025:2017 tentang persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Proses reakreditasi mencakup beberapa tahapan, mulai dari sesi pembukaan, peninjauan singkat ke laboratorium, asesmen implementasi ISO/IEC 17025:2017 yang meliputi aspek umum, struktural, manajemen (QMS), dan teknis, serta pelaksanaan *witness test* di laboratorium. Selain memastikan penerapan standar ISO/IEC secara konsisten, proses asesmen ini juga menjadi ajang berbagi wawasan antara tim asesor dan pihak laboratorium, guna meningkatkan pengelolaan dan efisiensi operasional laboratorium BBPOM di Jakarta di masa mendatang.



18. Pelaksanaan Program SAPA KAMPUS

BBPOM melaksanakan Program SAPA KAMPUS atau semula bernama Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program terobosan Badan POM yang mengolaborasikan kompetensi Fasilitator Keamanan Pangan dengan pembelajaran di kampus yang dapat dikonversi dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Program ini diusung dalam rangka membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan serta memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha dengan keberpihakan pada usaha mikro-kecil (UMK) guna membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing demi kemandirian bangsa. Acara dibuka oleh Kepala BBPOM Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar, SSi, Apt, MSi dan dihadiri oleh mentor Badan POM, Mentor Universitas, Mentor BBPOM Jakarta dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan supervisi dan pemaparan dari mahasiswa terkait progress kegiatan fasilitasi yang dilakukan di UMKM magang.



19. Pelaksanaan Hari Keamanan Pangan Sedunia

Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (*World Food Safety Day)* yang jatuh pada tanggal 7 Juni, Balai Besar POM di Jakarta bersama anggota DPR RI Komisi IX Surya Utama, S.I.P. (Uya Kuya), menggelar kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas. Bertempat di Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Rabu (11/06/2025), kegiatan ini mengusung tema **"***Science In Action*: Perjalanan Menjaga Keamanan Pangan**"**, dihadiri oleh 200 masyarakat di wilayah Petukangan Selatan.Isu keamanan pangan di Indonesia masih menjadi tantangan serius, mulai dari penggunaan bahan berbahaya, pangan tercemar, hingga masalah serius yang sering muncul yaitu penyakit akibat makanan (*foodborne disease*), seperti diare, keracunan makanan, dan infeksi bakteri (misalnya *Salmonella, E. coli, dan Listeria*). Penyakit ini umumnya disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen karena proses produksi, pengolahan, penyimpanan, atau penyajian yang tidak higienis. Anak yang terpapar makanan tidak aman lebih rentan terhadap infeksi dan gangguan pencernaan, yang berujung menghambat penyerapan nutrisi

dan menyebabkan *stunting*. Perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengakses pangan yang aman.



20. Partisipasi Pada Acara Jakarta Fair.

Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 telah resmi dibuka pada Kamis (19/06/2025) oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pameran multiproduk terbesar di Indonesia ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-498 kota Jakarta dan akan berlangsung hingga 13 Juli 2025. Tahun ini, Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta kembali ambil bagian dalam pameran dengan menghadirkan stan edukatif di Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Hall C1. Kehadiran BBPOM bertujuan untuk menyampaikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seputar obat dan makanan kepada masyarakat luas.Keikutsertaan BBPOM di Jakarta dalam Jakarta Fair ini menjadi salah satu sarana kami dalam melakukan KIE dan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam mengampanyekan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta pemanfaatan aplikasi BPOM *Mobile* sebagai bentuk pengawasan mandiri.



Juli 2025

21. **Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium Wujud Komitemen BBPOM di Jakarta dalam Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

    Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber ahli K3 dari PT Yura Prima Solusindo, Beni Cahyadi. Kegiatan diikuti oleh seluruh personel laboratorium dan personel pendukungnya. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kemampuan personel laboratorium serta personel pendukungnya terkait prinsip K3, identifikasi, evaluasi, langkah pengendalian risiko dan budaya K3. Bekerja di laboratorium tidak dapat terhindarkan dari penggunaan peralatan listrik, pecahan kaca alat gelas, dan paparan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga pelatihan ini menekankan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko K3, mengendalikan risiko, menggunakan alat pelindung diri, memadamkan kebakaran, menanggulangi keadaan darurat di laboratorium, memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja, serta menerapkan inspeksi K3.



22. Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan kosmetik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi bersama anggota DPR RI Charles Honoris di kawasan Glodok, Jakarta Barat pada Senin (14/07/2025). Kegiatan dihadiri oleh 500 orang peserta yang menyasar warga dan pelaku usaha lokal, mengingat Glodok dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan produk pangan dan kosmetik di ibu kota, dengan tujuan memberikan edukasi tentang cara memilih produk pangan dan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan pula hasil pengawasan terbaru yang mengungkap masih maraknya peredaran produk kosmetik dan pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Beberapa di antaranya bahkan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan produk pangan yang mengandung 4 bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamine B dan *methanyl yellow*. Selain itu, ditemukan pula produk yang tidak memiliki izin edar (TIE) serta produk kedaluwarsa yang masih dijual secara bebas di pasaran.



23. Kegiatan Pencegahan *Stunting*

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) berkolaborasi dengan Puskesmas Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Pademangan Timur menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema pencegahan stunting dan peningkatan gizi keluarga. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Lurah Pademangan Timur pada Senin (21/07/2025) dan diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari kader PKK, Posyandu, Dasawisma dan ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan balita serta remaja putri. Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM di Jakarta selaku narasumber, menyampaikan materi seputar pentingnya konsumsi pangan aman dan bergizi sebagai kunci utama mencegah *stunting* sejak dini.



24. Pelaksanaan Desk Registrasi Pangan Olahan

Balai Besar POM di Jakarta secara konsisten terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya UMK di wilayah DKI Jakarta untuk dapat bersaing baik di skala nasional maupun skala internasional. Salah satu upaya untuk mencapai usaha tersebut yaitu dengan diadakannya Desk Registrasi Pangan Olahan untuk percepatan penerbitan nomor izin edar BPOM MD. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Jakarta yang berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 dan 30 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Balai Besar POM di Jakarta dengan mengundang sebanyak 50 pelaku usaha pangan olahan yang sedang berproses registrasi produk di sistem E-Reg RBA Badan POM. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain pendaftaran 21 akun yang disetujui, 31 AJU (Pengajuan) proses registrasi produk dan diterbitkannya 4 Nomor Izin Edar. Hal ini menandakan bahwa acara telah sukses dalam mempercepat pelayanan sehingga pelaku usaha merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya kegiatan ini.



Agustus 2025

25. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Peredaran Produk Ilegal

BBPOM di Jakarta kembali gelar edukasi Obat dan Makanan mengusung tema “Kenali Obat dan Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu” menggandeng tokoh masyarakat, anggota DPR RI Charles Honoris. Bertempat di kelurahan Kedoya Selatan dan Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat, Kamis (07/08/2025) dihadiri lebih dari 500 warga, perangkat kelurahan serta pengurus RT/RW di masing-masing wilayah. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan obat bahan alam yang aman dan bermutu, terutama di tengah maraknya peredaran produk ilegal dan mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan obat bahan alam atau jamu tanpa mengetahui status keamanannya. Ia mengingatkan bahwa produk yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan efek samping yang serius. dengan efek cespleng dan klaim khasiat yang berlebihan



26. Pertemuan Koordinasi dengan Kepala Stasiun RRI Jakarta

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menyampaikan bahwa RRI memiliki peran strategis sebagai media publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menjadi mitra efektif dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) terkait pengawasan Obat dan Makanan.



27. Pelaksanaan Kegiatan "Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro

Pelaksanaan yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta Barat. Kegiatan diikuti oleh 1000 UMKM dan menyajikan layanan legalitas usaha mikro, layanan perlindungan usaha mikro, talkshow, workshop serta pameran produk UMKM. *Stakeholder* yang terlibat berasal dari kementerian/ lembaga tingkat pusat hingga pemerintah daerah.Pada kesempatan tersebut, BBPOM di Jakarta berpartisipasi dengan memberikan layanan informasi dan konsultasi izin edar pangan, termasuk izin edar PIRT.



September 2025

28. Kunjungan Tim Penilai Nasional menuju WBBM

Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta menerima kunjungan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB dalam rangka verifikasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (10/09/2025).TPN yang terdiri dari Ika Yunita Puspitasari dan Natasya Fauziah disambut langsung oleh Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Candrawati Anwar, bersama Tim Pembangunan Zona Integritas. Dalam sambutannya, Sofiyani menegaskan bahwa verifikasi ini menjadi momentum penting bagi BBPOM di Jakarta untuk mengukur kesiapan instansi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. "*Setelah lima tahun sejak WBK, kami sangat antusias menyambut verifikasi ini. Ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih bersih, akuntabel, dan profesional"* Ia juga menambahkan harapan agar inovasi yang dijalankan dapat menjadi nilai tambah dan berdampak positif bagi masyarakat.



Oktober 2025

29. Bimbingan Teknis Penjamah Makanan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan kesadaran para penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta bersinergi, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wilayah II yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Bimtek dilaksanakan untuk para penjamah pangan SPPG di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara selama 2 hari. Pelaksanaan bimtek untuk SPPG di wilayah Jakarta Timur berlokasi di Hotel Naraya, Pemuda Jakarta Timur, diikuti oleh 16 SPPG dengan total peserta mencapai 800 peserta. Sementara itu untuk SPPG di wilayah Jakarta Utara berlokasi di hotel Redtop Pecenongan Jakarta Pusat, diikuti oleh 19 SPPG dengan peserta mencapai 950 Peserta.



30. Kegiatan FGD Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) bersama dengan KPI DKI Jakarta dalam rangka Pengawasan Iklan Obat dan Makanan berlangsung ditanggal 16 Oktober 2025, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dan merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat sebelumnya antara Balai Besar POM di Jakarta dan KPID DKI Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan



efektifitas pengawasan iklan obat dan makanan khususnya pada media penyiaran lokal di Wilayah DKI Jakarta.

31. **Pameran *The 2nd International Military Medicine Symposium and Workshop***

Pameran yang diadakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) di Aston Kartika Grogol *Hotel & Conference Centre* Jakarta. Acara yang berfokus pada pengembangan kedokteran militer, *biosecurity,* dan *biosafety* ini mengusung tema "*Advancing Military Medicine Through Collaboration and Innovation*". BBPOM di Jakarta menampilkan informasi mengenai *Biosafety* dan *Biosecurity* dalam Pengawasan Obat dan Makanan serta produk informasi kepada peserta kegiatan. Pada pembukaan acara, turut hadir Kepala BPOM Taruna Ikrar sebagai salah satu *keynote speaker* yang menampilkan gagasan besar untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat uji klinik global untuk pengembangan obat dan vaksin baru. BPOM menargetkan status *WHO Listed Authority (*WLA), pengakuan internasional yang menempatkan Indonesia sejajar dengan badan regulator dalam pengawasan Obat dan Makanan, seperti FDA, EMA, dan MHRA. "Kalau BPOM lolos, produk farmasi dari Indonesia bisa langsung diterima di pasar global tanpa evaluasi ulang" jelas Taruna dalam paparannya yang berjudul "*Indonesian FDA to Compete in a Global Clinical Trial for a New Drug*".



November 2025

32. Jalin Sinergi dan Perkuat Kapasitas BBPOM di Jakarta Gelar FGD Jejaring Laboratorium

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Jejaring Laboratorium bersama berbagai laboratorium yang memiliki ruang lingkup pengujian obat dan makanan di wilayah Jakarta. FGD dihadiri oleh sebelas laboratorium di wilayah Jakarta, yaitu Labkesda, PT Pharma Metric Labs, Equilab International, BBKFK, BNN, BUSPM, BPKOM PPPOMN, PPPOMN, BPMD Kemendag, dan BBUSKHIT. Acara ini mencakup diskusi panel mengenai berbagai topik strategis, yaitu Jaminan Mutu Hasil Pengujian oleh Rusmadi Eko Priyono (Lead Asesor KAN), Pelayanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga oleh Nurul Hidayah Hadiyati (BBPOM di Jakarta), Sharing Jejaring Laboratorium Pengujian oleh Sutanti Siti Namtini (PPPOMN). Kegiatan dilanjutkan dengan sesi peningkatan kompetensi penguji BBPOM di Jakarta terkait *HPLC Operation and Troubleshooting*, sebagai upaya meningkatkan kemampuan teknis dalam menghadapi tantangan pengujian.



33. Konferensi pers hasil penindakan peredaran sediaan farmasi ilegal

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar didampingi Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar di Kantor BBPOM di Jakarta. Hasil pengawasan dan penindakan di lapangan menunjukkan adanya berbagai temuan produk sediaan farmasi ilegal dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan 15 item obat tanpa izin edar (TIE) sebanyak 4.027 kemasan dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Selain itu, juga ditemukan 29 item obat bahan alam (OBA) TIE sebanyak 3.151 kemasan senilai Rp770 juta, serta 21 item suplemen kesehatan TIE sebanyak 1.899 kemasan dengan nilai sekitar Rp551 juta. Seluruh produk tersebut diduga kuat dipasarkan tanpa izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Mayoritas produk yang ditemukan merupakan obat dengan klaim penambah stamina pria (obat kuat pria) yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO) sildenafil dan turunannya. Zat ini seharusnya hanya digunakan dalam obat keras berdasarkan resep dokter dan tidak boleh dicampurkan dalam obat tradisional maupun suplemen.



34. Kegiatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61

Acara yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan dilaksanakan di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. BBPOM di Jakarta hadir pada Talkshow Tips Memilih Kosmetik yang Aman. Talkshow dimulai dengan pemaparan singkat tips memilih kosmetik yang aman oleh ibu Rini Asri, S.Si, Apt. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Balai Besar POM di Jakarta terus berkomitmen mengedukasi masyarakat dalam konsumsi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang aman dan bermutu. BBPOM di Jakarta juga terus berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat cerdas konsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat cerdas, terlindungi untuk Indonesia Emas 2045.



Desember 2025

35. Kegiatan KIE tentang penggunaan kosmetik aman

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta bersinergi dengan anggota komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang penggunaan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

memilih kosmetik yang telah terjamin keamanannya serta menghindari peredaran produk ilegal yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidrokuinon. Materi yang disampaikan meliputi cara cek kemasan, label, izin edar BPOM, serta masa kedaluwarsa produk sebelum digunakan. Peserta juga dibekali pengetahuan mengenai pemanfaatan aplikasi *BPOM Mobile* sebagai sarana pengecekan legalitas produk secara mandiri. Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar menegaskan bahwa kegiatan KIE merupakan bagian dari penguatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat "Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa merawat diri harus dilakukan dengan cara yang aman. Kosmetik yang digunakan wajib memiliki izin edar dari BPOM, tidak mengandung bahan berbahaya, serta digunakan sesuai aturan.



36. BBPOM di Jakarta meraih peringkat kedua kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT

Balai Besar POM dengan predikat Badan Publik "Informatif" pada Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik BPOM Tahun 2025. Penghargaan dalam Rapat Evaluasi Nasional di Semarang. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, kepada Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar. Taruna

Ikrar mengapresiasi UPT yang telah menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



37. Penghargaan sebagai "Badan Publik Predikat Informatif"

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen kinerja dalam keterbukaan informasi publik, BBPOM di Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai **"Badan Publik Predikat Informatif"** dengan nilai E-monev sebesar 95.8. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wibi Andrino kepada Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar sebagai salah satu dari 13 badan publik lainnya pada kegiatan "**Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta *Award*) Tahun 2025"** bertempat di Balai Agung DKI Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**
HIGHLIGHT KINERJA ..... **viii**
BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
1.1. LATAR BELAKANG 2
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 4
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 6
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 6
1.5. ASPIRASI STAKEHOLDER 12
1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN 14
1.7. KEKUATAN (*STRENGTH*) 15
1.8.* KELEMAHAN *(WEAKNESS) 30
1.9. PELUANG (OPPORTUNITY) 36
1.10.* ANCAMAN (*THREAT) 45
BAB II **57**
PERENCANAAN KINERJA **57**
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 57
2.2. MISI BBPOM DI JAKARTA 2025 – 2029 59
2.3 TUJUAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA 60
2.4 SASARAN KEGIATAN BBPOM DI JAKARTA 2025-2029 62
2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025 70
2. 6 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025 73
2.7 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 80
2.8 METODE PENGUKURAN 83
Bab III **90**
AKUNTABILITAS KINERJA **90**
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 90



1. **PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 92
2. **PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO** 104
3. **PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 111
4. **PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR** 121
5. **PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 128
7. **PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 141
8. **PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 149
9. **PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 155
10. **PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN** 163
11. **PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN** 168
12. **PERSENTASE LABEL TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR** 175
13. **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta** 182
14. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar** 188
15. **Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman** 201
16. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** 209
17. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta** 214
18. **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** 225
19. **Jumlah Desa Pangan Aman** 233
20. **Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas** 242



21. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN 249
22. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH UPT . 269
23. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR 274
24. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI JAKARTA..... 282
25. NILAI PEMBANGUNAN ZI BBPOM DI JAKARTA..... 292
26. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta..... 305
27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta 326
28. Indeks Manajemen Resiko BBPOM di Jakarta 338

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 347
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA..... 767
3.4 REALISASI ANGGARAN 779

BAB IV 795

KESIMPULAN DAN SARAN 795

4.1. KESIMPULAN 795
4.2. SARAN 796

LAMPIRAN 798

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi 6
Gambar 1. 2 Geografis Provinsi Daerah Khusus Jakarta 11
Gambar 3. 1 Indeks Efektivitas KIE Obat & Makanan (tatap muka/media) 216

Gambar 3. 2 Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Pengawasan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan..... 259
Gambar 3. 3 Publikasi Pendaftaran Pendampingan melalui Inovasi JakFast..... 260
Gambar 3. 4 Pelaksanaan Visitasi Sarana Produksi..... 261
Gambar 3. 5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik..... 262
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap 2 terkait Label Pangan Olahan, Penggunaan BTP, Informasi Nilai Gizi, dan Simulasi Registrasi Produk 263
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap 3 terkait Label Pangan Olahan, Penggunaan BTP, Informasi Nilai Gizi, dan Simulasi Registrasi Produk 264

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SDM BBPOM di Jakarta (per Desember 2025) 9
Tabel 1. 2 *Matriks Ringkasan Analisis SWOT* 55
Tabel 2. 1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator 67

Tabel 2. 2 *RKT tahun 2025* 70
Tabel 2. 3 PK tahun 2025..... 73
Tabel 2. 4 *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja* 80
Tabel 2. 5 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan. 84
Tabel 2. 6 *Perhitungan NKO Periodik* 85
Tabel 2. 7 Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO). 86
Tabel 2. 8 Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja tahun. 87
Tabel 2. 9 Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan. 88
Tabel 3. 1 Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja. 90

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 97
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi KInerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 98
Tabel 3. 4 *Matriks Rekomendasi*. 101
Tabel 3. 5 *Nilai Tingkat Efisiensi* 102
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 105
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 106
Tabel 3. 8 *Matriks Rekomendasi* 108
Tabel 3. 9 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 110
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 114
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 115
Tabel 3. 12 *Matriks Rekomendasi*. 119
Tabel 3. 13 *Nilai Tingkat Efisiensi* 120
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 122
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi KInerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 123
Tabel 3. 16 *Matriks Rekomendasi*. 125
Tabel 3. 17 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 126
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 130
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 130
Tabel 3. 20 *Matriks Rekomendasi*. 133
Tabel 3. 21 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 134
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 137
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 137
Tabel 3. 24 *Matriks Rekomendasi*. 139
Tabel 3. 25 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 140
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 144
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 145
Tabel 3. 28 *Matriks Rekomendasi*. 147
Tabel 3. 29 *Nilai Tingkat Efisiensi* 148
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 151
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 151



Tabel 3. 32 *Matriks Rekomendasi*. 153
Tabel 3. 33 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 154
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 156
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 157
Tabel 3. 36 *Matriks Rekomendasi*. 161
Tabel 3. 37 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 162
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 164
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 165
Tabel 3. 40 *Matriks Rekomendasi*. 166
Tabel 3. 41 Nilai Tingkat Efisiensi. 167
Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 171
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 171
Tabel 3. 44 *Matriks Rekomendasi*. 173
Tabel 3. 45 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 174
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 177
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029. 178
Tabel 3. 48 *Matriks Rekomendasi*. 180
Tabel 3. 49 *Nilai Tingkat Efisiensi*. 181
Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025. 183
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 184
Tabel 3. 52 *Matriks Rekomendasi* 185
Tabel 3. 53 *Nilai Tingkat Efisiensi* 187
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025..... 192
Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 194
Tabel 3. 56 *Matriks Rekomendasi* 197
Tabel 3. 57 Nilai Tingkat Efisiensi 200
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025..... 202
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 203
Tabel 3. 60 Matriks Rekomendasi 205
Tabel 3. 61 Nilai Tingkat Efisiensi 207
Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029 210
Tabel 3. 63 Nilai Tingkat Efisiensi 213
Tabel 3. 64 Nilai Tingkat Efisiensi 223
Tabel 3. 65 Nilai Tingkat Efisiensi 232
Tabel 3. 66 Nilai Tingkat Efisiensi 240
Tabel 3. 67 Nilai Tingkat Efisiensi 248
Tabel 3. 68 Matriks Rekomendasi 265
Tabel 3. 69 Nilai Tingkat Efisiensi 267
Tabel 3. 70 Matriks Rekomendasi 272
Tabel 3. 71 Nilai Tingkat Efisiensi 273
Tabel 3. 72 Matriks Rekomendasi 278
Tabel 3. 73 Nilai Tingkat Efisiensi 279
Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi 288
Tabel 3. 75 Nilai Tingkat Efisiensi 290
Tabel 3. 76 Matriks Rekomendasi 303
Tabel 3. 77 Nilai Tingkat Efisiensi 305



Tabel 3. 78 Nilai Tingkat Efisiensi 322
Tabel 3. 79 Matriks Rekomendasi 331
Tabel 3. 80 Nilai Tingkat Efisiensi 332
Tabel 3. 81 Matriks Rekomendasi 345
Tabel 3. 82 Nilai Tingkat Efisiensi 347
Tabel 3. 83 Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Tahun 2025 783
Tabel 3. 84 Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis 785



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta yang selanjutnya disebut BBPOM di Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan beredar di wilayah pengawasan Provinsi Daerah Khusus Jakarta aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BBPOM di Jakarta mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, tugas fungsi dan kewenangan BBPOM di Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Kontribusi BBPOM di Jakarta terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Jakarta menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Pelaksanaan tugas fungsi BBPOM di Jakarta bersifat dinamis, penuh tantangan, dan membutuhkan kolaborasi berbagai *stakeholder* mengingat kompleksitas Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota yang menjadi pusat produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Perubahan kebijakan suprasistem terkait inovasi teknologi, globalisasi, pola konsumsi masyarakat mengharuskan BBPOM di Jakarta untuk selalu bersikap



responsif dan *agile*. Oleh karenanya perlu ditetapkan strategi baru yang dituangkan dalam Rencana Strategi BBPOM di Jakarta untuk RPJM 2025-2029.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM. Renstra dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk tetap sinergis dengan Renstra Badan POM serta relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Jakarta bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

   Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

   a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
   d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
   e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
   f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
   i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
   j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
   k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.



1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional. Perkuatan koordinasi internal dilaksanakan melalui penugasan Ketua Tim pada 4 (empat) kelompok fungsi yaitu Pengujian, Pemeriksaan, Informasi dan Komunikasi serta Penindakan. Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan mengenai aspek strategis yang dimaksud:

a. Lingkungan Internal

Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Balai Besar POM di Jakarta memiliki total SDM pada tahun 2025 yaitu 158 dengan rincian sebanyak 109 PNS, 1 CPNS dan 17 PPPK termasuk PPPK paruh waktu, serta 31 tenaga *outsourcing* yang terdiri dari satpam, *frontliner,* petugas kebersihan, dan teknisi. Tenaga *outsourcing* yang dikelola oleh perusahaan penyedia jasa meliputi 11 orang tenaga kebersihan, 5 orang pengemudi, 2 orang teknisi, 2 orang tenaga administrasi, dan 2 orang petugas penerima tamu yang dikelola oleh perusahaan penyedia jasa. Untuk tenaga keamanan, sebanyak 7 orang petugas keamanan dan 1 orang koordinator.

Balai Besar POM di Jakarta memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang didominasi relevan pada bidang pengawasan obat dan makanan seperti Apoteker, Farmasi, Biologi, Teknologi Pangan, Kimia, dan Hukum. Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Jakarta mendapatkan tambahan 1 orang CPNS dengan latar belakang pendidikan S1 Intelejen dari Sekolah Tinggi Intelejen Negara (STIN) yang memperkuat fungsi penindakan obat dan makanan. Selain itu jumlah PPPK mengalami peningkatan seiring dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 (enam) orang hingga Desember 2025. Dari sisi komposisi gender, persentase pegawai laki-laki tercatat sebesar 16,22%, sedangkan pegawai perempuan mendominasi dengan persentase sebesar 83,78%.

Tingkat Pemenuhan kebutuhan pegawai untuk PNS dan PPPK tahun 2025 sebesar 75% meningkat dari tahun sebelumnya yang pemenuhannya hanya 68,05%, dan masih terdapat *gap* sebesar 25%, sehingga kondisi bezetting belum sepenuhnya memenuhi



kebutuhan organisasi. *Gap* kebutuhan terbanyak terdapat pada jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama dan PFM Ahli Muda, dan pada fungsi ketatausahaan masih terdapat *gap* kebutuhan untuk jabatan fungsionali arsiparis, perencana, analis SDM, penata laksana barang, dan pranata SDM. Sebagai upaya untuk mengurangi *gap* kebutuhan pegawai tersebut, selain dari penerimaan pegawai baru melalui CPNS dan PPPK, juga dilakukan melalui keikutsertaan Balai Besar POM di Jakarta dalam Program Magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sejak Desember 2025. Program ini dilaksanakan melalui proses seleksi sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja, dengan masa pelaksanaan magang selama enam bulan hingga Mei 2026. Melalui program tersebut, Balai Besar POM di Jakarta menerima sebanyak 5 (lima) peserta magang, yang terdiri atas 3 (tiga) orang dengan penugasan sebagai Asisten Evaluasi dan Dokumentasi Iklan untuk mendukung pencapaian target indikator pengawasan iklan, serta 2 (dua) orang dengan penugasan sebagai Analis Data dan Informasi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan pendampingan UMKM. Upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ideal sesuai hasil perhitungan analisis beban kerja (ABK). Di sisi lain, keterbatasan sarana prasarana juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat gedung kantor Balai Besar POM di Jakarta yang terdiri dari 5 (lima) lantai dengan luas bangunan sebesar 2.407 m² saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan ruang kerja tambahan bagi SDM maupun penempatan peralatan laboratorium, seiring dengan tuntutan pengembangan metode analisis terkini.



Rincian kebutuhan dan pemenuhan secara terperinci sebagai berikut :

SIREN SDM | Dashboard

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	CASN / Mutasi	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Jakarta	14	Struktural	1	1	0	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Jakarta	12	Struktural	1	1	0	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	12	Fungsional	0	0	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	10	Fungsional	1	1	0	0	100%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	Fungsional	0	0	0	0	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	0	1	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	0	1	0%
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	0	1	0%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	Fungsional	1	1	0	0	100%
10	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	0	100%
11	Arsiparis Ahli Muda	9	Fungsional	1	0	0	1	0%
12	Arsiparis Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	0	100%
13	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	2	0	0	2	0%
14	Arsiparis Penyelia	8	Fungsional	1	0	0	1	0%
15	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	2	0	0	2	0%
16	Penata Laksana Barang Mahir	8	Fungsional	1	0	0	1	0%
17	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	3	1	0	2	33%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	Fungsional	23	23	0	0	100%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	56	31	0	25	55%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	57	27	0	30	47%
21	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	7	Fungsional	0	8	0	-8	100%
22	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8	Fungsional	0	4	0	-4	100%
23	Perencana Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	0	1	0%
24	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	2	0	0	2	0%
25	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	3	3	0	0	100%
26	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	2	2	0	0	100%
27	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Fungsional	1	1	0	0	100%
28	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	0	100%
29	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	0	100%
30	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	0	0	1	0%
31	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	1	0	0	100%
32	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	Fungsional	1	0	0	1	0%
33	Asisten Kelola Obat dan Makanan	5	Pelaksana	0	1	0	-1	100%
34	Operator Layanan Operasional	0	Pelaksana	0	3	0	-3	100%
35	Operator Layanan Operasional	5	Pelaksana	0	2	0	-2	100%
36	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	8	0	-8	100%
37	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	0	1	0	-1	100%
38	Pengelola Layanan Operasional	6	Pelaksana	0	2	0	-2	100%
39	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	0	2	0	-2	100%

Tabel 1. 1 SDM BBPOM di Jakarta (per Desember 2025)

Kompetensi SDM merupakan pilar utama dalam menjamin kredibiilitas hasil pengawasan obat dan makanan. Penguatan kompetensi teknis dan manajerial memberikan dampak hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan analisis risiko yang objektif dan akurat. Pada tahun 2025,



2. Sumber Daya Lainnya

   Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m^2 dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

   Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta di antaranya adalah: (1) mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017; (2) digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020; (3) program UMKM Jawara dan Kerling Jakarta sejak tahun 2021; (4) fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020; (5) layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021; serta (6) UPT Balai Besar/Balai POM yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. LAILA 24, Jak Konek, Eco Office Lab, KIE online selayar, kupi pagi

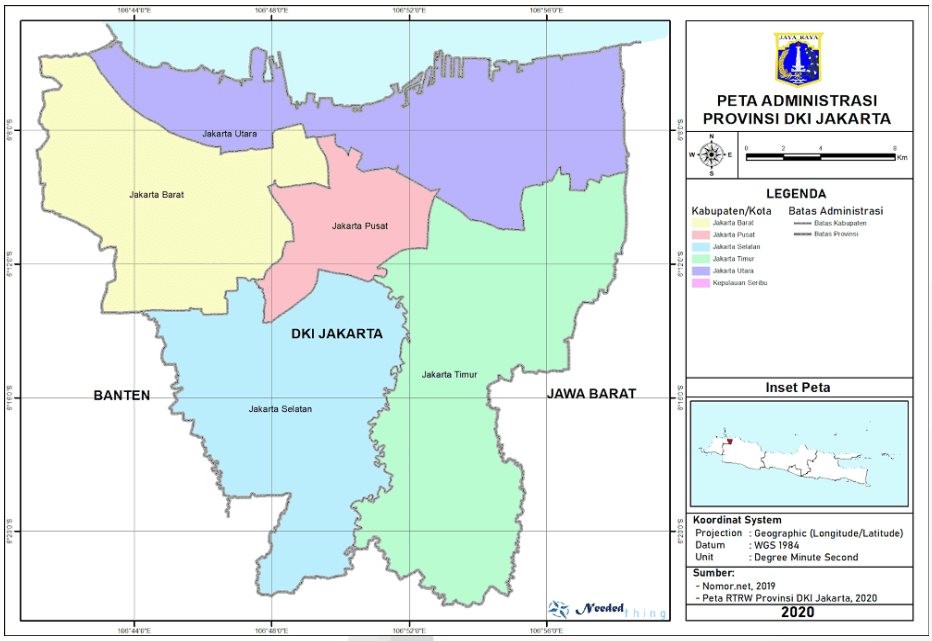
b. Lingkungan Eksternal

   Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut :

   1. Kondisi Geografis dan Demografis



Provinsi Daerah Khusus Jakarta terletak pada 6°12’ LS dan 106°48’ LS dengan luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar 662,33 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,34 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.165 jiwa/km^2 pada tahun



2025.

Gambar 1. 2 Geografis Provinsi Daerah Khusus Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

   Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana

produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

1.5. ASPIRASI STAKEHOLDER

BBPOM di Jakarta memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas yang bersifat *agile*, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Jakarta dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergen*t, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Jakarta dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BBPOM di Jakarta dapat mengimplementasikan penyesuaian kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karenanya, BBPOM di Jakarta membuka berbagai kanal untuk seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Jakarta 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia dapat menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara khusus.



Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat

dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2025. Responden survey adalah masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selain itu, setiap tahunnya, BBPOM di Jakarta melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pengawas (*Ombudsman*), Instansi Pemerintah terkait, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BBPOM di Jakarta meningkatkan peran bukan hanya sebagai pengawas namun juga sebagai mitra kolaborasi
2. BBPOM di Jakarta secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan digitalisasi dan media sosial
3. BBPOM di Jakarta dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat sesuai kewenangan



1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan

permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Jakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Jakarta dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang



holistik dan kolaboratif, BBPOM di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Jakarta tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Jakarta periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Jakarta, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.7. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Jakarta, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Jakarta di masa depan. Berikut ini adalah



kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BPOM mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

   Kepala UPT BBPOM di Jakarta dipilih melalui seleksi terbuka yang bersifat adil, transparan dan obyektif berbasis manajemen talenta dengan tetap mengedepankan penilaian rekam jejak untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Kepala UPT BBPOM di Jakarta selama lima tahun terakhir telah berganti sebanyak 4 (empat kali). Namun hal ini tidak mengubah komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM

   untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini terlihat dengan rapot kinerja yang secara konsisten terus meningkat, penyempurnaan sarana prasarana sesuai peraturan perundangan undangan terkini dengan tetap memperhatikan aspek



kemudahan dan kenyamanan pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia secara komprehensif, pengelolaan kinerja anggaran dan akuntabilitas yang semakin terukur serta implementasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BBPOM di Jakarta yang dibina sampai dengan 2024 mencakup *pentahelix* yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Akademisi (Universitas Pancasila), Pelaku Usaha dan Asosiasi (Ikatan Apoteker Indonesia), Kelompok Masyarakat (Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Daerah Khusus Jakarta) dan Media (Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta). Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi terlihat dengan digitalisasi pada tiap proses bisnis yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM. Kolaborasi yang baik ini secara nyata telah mampu mengefisienkan anggaran dan memberikan *outcome* langsung kepada masyarakat. *Highlight* kegiatan kolaborasi diantaranya penyediaan konten KIE Obat dan Makanan pada videotron di 14 (empat belas) titik strategis Kota Jakarta dan penayangan konten pada angkutan transportasi umum Trans Jakarta dan MRT secara berkala. Apabila mengeluarkan anggaran, penayangan konten pada videotron dan transportasi umum dapat mencapai Rp5.000.000.000 per tahun, namun dengan advokasi pimpinan serta kolaborasi yang tersistem dengan baik, BBPOM di Jakarta dapat menayangkan konten secara lebih luas dan tanpa biaya.

Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Jakarta sebagai bukti nyata komitmen pimpinan untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:



a) Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 s.d sekarang
b) Predikat Pelayanan Prima sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang
c) Sertifikasi ISO 9001:2018 sejak tahun 2011
d) Akreditasi SNI ISO IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2003
e) Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang
f) Berperan aktif mendukung Satu Dekade Opini WTP BPOM dikarenakan BBPOM di Jakarta merupakan lokus pemeriksaan BPK tiap tahunnya dan seterusnya
g) Terbaik 1 *Agent of Change* dan Terbaik 2 Pegawai Berprestasi (HUT ke-24 BPOM
h) Juara Umum dan Kategori Inovasi Terbaik Green Laboratory
i) Terbaik III Pelaksanaan SAKA POM Tahun 2025
j) Penghargaan UPT BPOM Terbaik Pendampingan UMK Pangan Olahan
k) Penghargaan sebagai "Badan Publik Predikat Informatif" pada kegiatan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta Award) Tahun 2025"
l) Peringkat Kedua Kategori PPID Pelaksana UPT dengan Predikat Badan Publik Informatif pada Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik BPOM Tahun 2025
m) Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
n) Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

BBPOM di Jakarta telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta



kelompok masyarakat. Kerjasama ini memungkinkan percepatan pelaksanaan tugas fungsi, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar yang berdampak langsung untuk melindungi masyarakat Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BBPOM di Jakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan, tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Jaringan kerja sama yang solid dengan pemangku kepentingan dibuktikan melalui kegiatan kolaboratif yang bersifat dinamis pada setiap fungsi BBPOM di Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi Pemeriksaan
   a) Inovasi Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) merupakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini dilakukan dengan membuka layanan pada titik strategis di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah layanan dan mempercepat waktu layanan. Program yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 ini, telah mendapat apresiasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas terkait
   b) Inovasi Sultan Betawi (Konsultasi dan Layanan Informasi Sertifikasi bersama BBPOM di Jakarta) diinisiasi pada tahun 2021 berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka loket layanan



di Mal Pelayanan Publik Provinsi Daerah Khusus Jakarta setiap hari Selasa. Kerjasama ini menjadi solusi dari kendala jauhnya lokasi kantor BBPOM di Jakarta.

c) UMKM Jaw@ra (UMKM Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman) berkolaborasi sejak Tahun 2022 bersama Dinas PPKUKM telah membina 475 UMKM yang menghasilkan 2.571 izin edar. Jumlah ini jauh di atas target yang ditetapkan untuk BBPOM di Jakarta dan dilakukan tanpa adanya tambahan personil dan anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah menggunakan anggaran kolaborasi terpadu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan membentuk JakOfficer yaitu SDM PemProv yang diberdayakan sebagai perpanjangan tangan

d) petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan UMKM. Sebagai upaya keberlanjutan program, UMKM Jaw@ra bersama Dinas PPKUKM menghidupkan Rumah Produksi Bakso Bersama di Rumah Susun yang mendukung Astacita Ketiga Penciptaaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan. Komitmen BBPOM di Jakarta telah dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai UPT BPOM terbaik dalam pengelolaan kegiatan pendampingan UMK pangan olahan.

2) Fungsi Penindakan

Kolaborasi fungsi penindakan dengan Kantor Bea Cukai Pos Pasar Baru melahirkan inovasi Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta). Sistem ini dibangun untuk mencegah masuknya produk impor ilegal melalui jalur barang kiriman pos kepada pribadi. Inovasi ini mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di hulu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan impor ilegal serta melindungi produk domestik dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor



ilegal. Selain itu, Laron Baja memberikan jaminan bagi petugas Bea Cukai dalam memberikan keputusan tegah atau rilis.

Kolaborasi penindakan Obat dan Makanan dengan skema *Criminal Justice System* dilaksanakan bersama Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta lembaga pengawasan sektoral lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Intelijen Daerah (BINDA), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Penghargaan yang diperoleh BBPOM di Jakarta fungsi penindakan adalah sebagai berikut:

a. Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat" pada 30 Juni 2025
b. Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat" pada 30 Juni 2025

3) Fungsi Pengujian

Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta selalu berupaya meningkatkan kemampuan uji agar dapat berkontribusi maksimal dalam pengawasan obat dan makanan. Selain melaksanakan pengujian sampel pengawasan rutin, laboratorium Balai Besar POM di Jakarta juga berkontribusi dalam penanganan sampel kasus, termasuk sampel kasus KLB Keracunan Pangan.



Laboratorium BBPOM Jakarta juga mendukung program fasilitasi UMKM yang dicanangkan oleh Badan POM melalui pengujian gratis untuk peningkatan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing di pasar internasional.

Salah satu bukti komitmen laboratorium BBPOM Jakarta dalam peningkatan kemampuan uji adalah pengembangan metode pengujian yang cepat dan valid melalui inovasi Biomolecular Testing of Pathogenic Bacteria (MONSTERA) yang mendapatkan penghargaan juara ketiga dalam lomba Inovasi pengujian laboratorium BPOM. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan realtime PCR untuk deteksi cepat bakteri pathogen.

Laboratorium Balai Besar POM Jakarta juga telah menerapkan konsep Green Laboratory, yaitu konsep operasional laboratorium yang mengutamakan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui inovasi *Eco Office Lab*. Inovasi ini mendorong semua personil untuk berupaya melakukan efisiensi listrik, efisiensi air, efisiensi kertas dan penanganan limbah yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Komitmen BBPOM Jakarta dalam penerapan Green Lab ini telah menorehkan prestasi sebagai Juara satu dalam kategori Inovasi Green Laboratory dan Juara Umum pada lomba Penerapan Green Laboratorium Badan POM tahun 2025.

Sejalan dengan penerapan inovasi *Eco Office Lab*, secara bertahap Balai Besar POM di Jakarta juga mulai menerapkan digitalisasi dalam pencatatan (Eclos, Simolat dan Gerak Pandai), digitalisasi penatausahaan BMN dan barang persediaan (CCBMN) serta digitalisasi dalam pembuatan laporan hasil pengujian (FLASH). Saat ini semua unit kerja di Badan POM telah menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk pelaporan hasil pengujian, baik untuk pengujian sampel rutin dalam rangka pengawasan maupun sampel pihak ketiga. Untuk pelaporan pengujian sampel pihak ketiga, BBPOM Jakarta



berperan besar dalam pengembangan SIPT sampel pihak ketiga dengan dieskalasinya inovasi SiPiket (Sistem Informasi Sampel Pihak Ketiga) ke dalam SIPT. Semua system digitalisasi yang telah dibangun tersebut ke depannya diharapkan dapat dikembangkan menjadi sistem digitalisasi laboratorium yang terintegrasi (LIMS).

Dalam rangka unjuk kinerja laboratorium, meningkatkan jaminan mutu hasil pengujian dan ruang lingkup kemampuan uji laboratorium, laboratorium BBPOM di Jakarta telah menyelenggarakan uji banding antar laboratorium untuk laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional.

BBPOM di Jakarta juga berperan aktif pada kegiatan *Food Security* pada *event* internasional yang dihadiri VVIP dan tamu negara serta penyelenggaraan persidangan sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Dalam program Makanan Bergizi Gratis yang merupakan Program Prioritas Presiden, laboratorium BBPOM di Jakarta turut mendukung melalui kontribusi sebagai narasumber untuk peningkatan kompetensi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditugaskan sebagai kepala SPPG, melakukan pengujian di SPPG, dan melakukan pemastian penyebab keracunan melalui pengujian sampel, serta berkoordinasi dan melaporkan hasil pengujian kepada Deputi 3 Badan POM.

4) Fungsi Infokom



Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melahirkan penayangan konten pada videotron dan media luar ruang transportasi umum. Hal ini memberikan jangkauan penerima KIE yang lebih luas di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tanpa tambahan anggaran. Komitmen BBPOM di Jakarta terhadap keterbukaan informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerinthan yang trasnparan, akuntabel, dan partisipatif untuk penyediaan informasi publik yang transparan, telah dibuktikan dengan diperolehnya peringkat kedua kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan predikat Badan Publik Informatif, dan penghargaan sebagai "Badan Publik Predikat Informatif" dengan nilai E-monev sebesar 95,8 yang disampaikan pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu kegiatan SAKA POM telah mampu membentuk 6 SAKA POM dengan jumlah anggota 243 yang akan berperan sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Jakarta melalui Krida Informasi Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan serta Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan. Komitmen BBPOM Jakarta dalam pelaksanaan SAKA POM ini telah menorehkan prestasi penghargaan sebagai terbaik III pelaksanaan SAKA POM 2025 yang diberikan oleh Pramuka Jakarta atas dedikasi dalam pembinaan generasi muda melalui SAKA BPOM, yang menegaskan komitmen pimpinan dalam pemberdayaan masyarakat. BBPOM di Jakarta secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan pameran berskala nasional seperti Pekan Raya Jakarta, SMESCO dan Festival Urban Farming 2025

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BBPOM di Jakarta

BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan manajemen ASN berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 221 tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN



Badan POM dengan menempatkan kualifikasi dan kapabilitas ASN sebagai aset untuk mendorong eksistensi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

ASN BBPOM di Jakarta merupakan *Human Capital* yang memiliki peran utama dalam keberhasilan pengawasan obat dan makanan sehingga diperlukan program dan kegiatan pembelajaran kompetensi ASN dengan strategi yang tepat. Pengembangan kompetensi ASN BBPOM di Jakarta dilaksanakan dengan prinsip relevan (sesuai kebutuhan), mudah diaplikasikan (*Applicable*), memiliki dampak (*impactful*) serta mudah diakses (*accessible*). Sejak tahun 2022, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik teknis maupun manajerial dilakukan dengan memanfaatkan platform IDEAS dari PPSDM yang dapat diakses secara online dengan mudah dan lebih efisien.

Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan BBPOM di Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai diantaranya:

a. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal

   Sejak tahun 2020 – 2024 sebanyak 13 orang pegawai telah selesai melaksanakan tugas belajar baik ke jenjang Sarjana (S1) maupun Pascasarjana (S2) dan sebanyak 14 pegawai lainnya masih melaksanakan tugas belajar dalam maupun luar negeri dengan pendanaan dari BPOM maupun Non BPOM. Program peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal diprioritaskan untuk

   Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Keterampilan yang dituntut untuk menempuh Pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah lulus akan dialihkan pada jenjang Jabatan Fungsional Keahlian. BBPOM di Jakarta memiliki 14 pejabat fungsional PFM tingkat Keterampilan, 2 diantaranya akan purnabakti dalam waktu 7 tahun ke depan dan 12 pegawai lainnya sedang tugas belajar ke jenjang S1.



b. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, bimtek, workshop/seminar dan lain-lain.

   Tahun 2025 BBPOM di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun setiap tahunnya. Perencanaan pengembangan kompetensi yang disusun didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas fungsi dan jabatan masing-masing.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

   BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki oleh BBPOM di Jakarta antara lain: ICPMS (*Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), GCMS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*), RTi-PCR (*Real time - Polymerase Chain Reaction*) dan HPLC dengan berbagai detektor, di antaranya ELSD (*Evaporative Light Scattering Detector).* Terdapat beberapa peralatan canggih lain yang dimiliki laboratorium BBPOM di Jakarta seperti LCMS-MS yang dipindahkan ke laboratorium UPT lain dikarenakan kebijakan regionalisasi laboratorium.

   Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

   Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Jakarta selaras dengan ekosistem digital Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Intervensi digital dipilih mengingat Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki nilai tertinggi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023 (Kominfo 2023) sebesar 51,07 (https://imdi.sdmdigital.id/home) serta indeks literasi digital sebesar 3,59 yang lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 3,54. (https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-provinsi).



Hal ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh BBPOM di Jakarta untuk menjalin sinergi pemanfaatan SPBE. Penggunaan aplikasi secara online mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pada fokus Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Selain itu pemanfaatan media digital berperan penting dalam Pembangunan Ekonomi Hijau yang salah satunya akan nampak dari pengurangan media informasi secara fisik melalui *leaflet*, *pamflet* dan buku berbahan kertas.

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, komunikasi publik dengan konten media sosial yang menarik dan informatif, berperan besar untuk mewujudkan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas

BBPOM di Jakarta merupakan bagian dari jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap UPT dalam jaringan Lab POM dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, dengan pengujian mikrobiologi dan kimia. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui regionalisasi laboratorium, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat serta



mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional

6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

   BBPOM di Jakarta berperan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BBPOM di Jakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

   Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan



produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BBPOM di Jakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

   Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Pandemi Covid19 pada Tahun 2020 merupakan bencana global yang mampu dihadapi secara responsif oleh Badan POM. Pada era pandemi, BBPOM di Jakarta bergerak cepat dan berpartisipasi aktif sebagai salah satu laboratorium Badan POM yang mendapat sertifikat NAR untuk pengujian sampel Covid19. Berbagai inovasi muncul seperti audit dan konsultasi secara daring, pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana KIE, agar tugas fungsi tetap dapat dilaksanakan secara optimal ditengah berbagai hambatan dan keterbatasan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Badan POM merupakan organisasi yang *agile* dan adaptif.

   Selain itu, program prioritas Badan POM diimplementasikan dengan optimal di BBPOM di Jakarta, seperti kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan, inovasi regulasi misalnya terkait stunting, *cosmetic refilling* (kosmetik isi ulang), pengembangan probiotik, kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah.

8. Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan saat ini masih menjadi pusat perekonomian nasional dan global yang memiliki kemudahan berbagai akses



infrastruktur dan teknologi, potensi kolaborasi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kekuatan BBPOM di Jakarta dalam optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi pengawasan.

1.8. KELEMAHAN *(WEAKNESS)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Jakarta dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan

1. Keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) secara signifikan mempengaruhi kapasitas Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) hingga Desember 2025, tingkat pemenuhan SDM baru mencapai 75,74%, dengan kebutuhan ideal sebanyak 169 pegawai dan ketersediaan SDM sebanyak 128 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan pegawai sebanyak 41 orang, yang berdampak langsung pada keterbatasan jangkauan dan intensitas pengawasan.

Dengan tingkat kompleksitas wilayah, kepadatan penduduk, serta jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang sangat besar,



keterbatasan SDM menyebabkan tidak seluruh sarana dan masyarakat dapat dijangkau secara optimal melalui kegiatan pengawasan dan pemberdayaan. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan pada seluruh objek pengawasan, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan inspeksi serta pengawasan produk. Kondisi ini meningkatkan risiko beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas dalam jangka waktu yang lebih lama di masyarakat.

Selain berdampak pada fungsi pengawasan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM juga membatasi kapasitas BBPOM di Jakarta dalam melaksanakan kegiatan komunikasi risiko, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya konsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hingga Desember 2025, pelaksanaan fungsi Informasi dan Komunikasi di BBPOM di Jakarta masih didominasi oleh Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dengan jumlah yang terbatas, tanpa didukung oleh tenaga fungsional khusus seperti pranata humas yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi kelembagaan.

Kondisi tersebut turut berdampak pada keterbatasan kemampuan organisasi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan SDM dengan kompetensi spesifik berimplikasi pada menurunnya efisiensi dan efektivitas operasional, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan pengawasan berbasis risiko.

Secara keseluruhan, dampak keterbatasan jumlah dan distribusi SDM tidak hanya dirasakan pada aspek operasional internal BBPOM di Jakarta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap optimalisasi perlindungan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menegaskan urgensi perlunya penguatan kebijakan pemenuhan dan pengembangan SDM secara terencana dan berkelanjutan guna memastikan terjaganya standar



pengawasan obat dan makanan yang tinggi serta pemenuhan ekspektasi publik terhadap kinerja pengawasan BPOM.

2. *Gap* kompetensi pegawai pada kompetensi manajerial dan sosial kultural

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BBPOM di Jakarta menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Jakarta untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan.

Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BBPOM di Jakarta berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2025, menunjukkan sebanyak 27,10% pegawai telah memiliki kompetensi optimal (nilai kompetensi lebih dari 90), sebanyak 33, 64% memiliki kompetensi cukup



optimal (nilai kompetensi antara 78 sd 90) dan sebanyak 39,25% masih kurang optimal. Banyaknya pegawai yang kurang optimal pada kompetensi manajerial dikarenakan adanya perpindahan jabatan dari sebelumnya baik melalui kenaikan jabatan maupun pengangkatan ke dalam jabatan baru yang menyebabkan perubahan level standar kompetensi jabatan.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/*gap* kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki *gap* tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun *gap* kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini.

Strategi yang signifikan mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini,

dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global.



Layanan perizinan terkait langsung dengan beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan peninjauan ulang peraturan dan segregasi wewenang. Hal ini didasari dengan beberapa peraturan yang tidak sinergi serta pembagian fungsi kewenangan yang tumpang tindih. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang obat dan makanan.

4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tusi BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BBPOM di Jakarta meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Saat ini BBPOM di Jakarta terus berupaya memenuhi kriteria sarana prasarana layanan publik seperti area parkir, lobby layanan, area bermain anak, laktasi, area disabilitas dan seterusnya. Namun keterbatasan luasan area kantor BBPOM di Jakarta menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana layanan publik terutama pada sisi luasan sesuai kriteria yang ditetapkan pada *Grand Design* Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 227 Tahun 2024. Selain itu masih terdapat sarana yang belum dimiliki oleh BBPOM di Jakarta yaitu rumah dinas pimpinan, fasilitas perkantoran termasuk meubelair yang modern, serta media informasi digital yang representatif dan canggih.

5. Kesenjangan Kapasitas Laboratorium

Dengan terbitnya kebijakan regionalisasi, terdapat kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM)



yang dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pengawasan obat dan makanan. Kesenjangan kapabilitas ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Keterbatasan luasan BBPOM di Jakarta berpengaruh besar terhadap pemenuhan standar peralatan yang berdampak pada terbatasnya kemampuan uji dan kompetensi personil. Sehingga apabila terdapat kasus khusus seperti Kasus KLB, tidak dapat direspon dengan cepat.

6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

7. Implementasi Pengarusutamaan Gender Belum optimal

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan



belum memadainya ketersediaan data terpilah baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja), maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

1.9. PELUANG (OPPORTUNITY)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa BBPOM di Jakarta telah sejalan dengan program pengawasan keamanan obat dan makanan Nasional. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

   Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang memutar roda ekonomi secara domestik, nasional bahkan global. Dengan jumlah penduduk sebesar 11 juta jiwa, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan pasar produk obat dan makanan yang potensial dan tengah berkembang. Hal ini mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Jakarta berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.



Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Jakarta kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Jakarta dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BBPOM di Jakarta memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dari Provinsi menuju pasar nasional dan pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BBPOM di Jakarta dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BBPOM di Jakarta tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BBPOM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara



tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

   Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

   Adaptasi BPOM terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BBPOM di Jakarta untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BBPOM di Jakarta dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

   BBPOM di Jakarta menggunakan integrasi aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2025. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan



obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi. Dalam pelaksanaan teknisnya, BBPOM di Jakarta mengembangkan layanan digital untuk untuk memudahkan petugas dan masyarakat pengguna layanan seperti layanan konsultasi, informasi dan pengaduan online 24 jam, nomor antrian online, pengajuan persetujuan denah PBF online. Selain itu, BBPOM di Jakarta bekerjasama bersama *stakeholder* terkait untuk memperluas layanan melalui strategi KIE online JakKonek yang terintegrasi pada *website stakeholder* .

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. BBPOM di Jakarta siap mengimplementasikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia



3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah. Peluang BBPOM di Jakarta untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas seperti yang saat ini telah dibangun antara BBPOM di Jakarta dan Universitas Pancasila, dapat diperluas menjadi fasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan serta hilirisasi hasil penelitian *civitas academica* untuk pengembangan/diversifikasi produk baru. BBPOM di Jakarta merupakan lokus visitasi dalam kegiatan kolaborasi dengan lembaga internasional yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran keselarasan regulasi dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan diimplementasikan oleh BBPOM di Jakarta melalui Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 330 Tahun 2024. Tindak lanjut dari pembentukan TKPPOM adalah kolaborasi kegiatan yang lebih intensif bersama pemangku kepentingan. Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi dan jejaring



yang dapat mendukung pencapaian asta cita selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM.

Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat membantu BPOM untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.

4. Tingginya antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

   Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Jakarta memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Jakarta dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

   Indikator keberhasilan edukasi publik salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks efektivitas KIE. Sejak ditetapkan pada tahun 2020, Indeks efektivitas KIE BBPOM di Jakarta terus meningkat semula 93,02 menjadi 96,73 pada tahun 2024 (berada pada kategori Sangat Efekif).

   BBPOM di Jakarta memiliki inovasi JakKonek sebagai Stategi Digitalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung Ekosistem Digital di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Strategi ini meningkatkan pengetahuan dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai media, baik berupa media luar ruang, media sosial maupun penggunaan *Augmented Reality* untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya secara interaktif.



Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BBPOM di Jakarta dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

5. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

   Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.



Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

6. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi



industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan



nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BBPOM di Jakarta telah mengimplementasikan dukungan penuh untuk kualitas hilirisasi pengembangan obat bahan alam dan kosmetik hasil suatu penelitian menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka serta kosmetik baru. Hal ini terlihat dari inisiasi kerjasama dengan Universitas Pancasila.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

1.10. ANCAMAN (*THREAT)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat



merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

   Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform *e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

   Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya



menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

   Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

   Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya



adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antarlembaga belum sinergis

   BBPOM di Jakarta sebagai pelaksana teknis pada garda terdepan, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Kondisi koordinasi antarlembaga yang belum sinergis, merupakan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara *real-time* adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

   Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antarlembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan



prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

   Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Sebagai UPT, BBPOM di Jakarta harus mampu menghadapi tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.



Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang tepat agar kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

   Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.



Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

   Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.



Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

   Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

   Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa



regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste.*

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

   Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan



masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Strength	*Weakness*
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat **2.** Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid **3.** Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM **4.** Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi **5.** Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas **6.** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat **7.** Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini **8.** Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara	**1.** Keterbatasan jumlah dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) **2.** *Gap* kompetensi pegawai terutama pada kompetensi manajerial dan sosialkultural **3.** Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi **4.** Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai **5.** Kesenjangan kapabilitas laboratorium **6.** Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki **7.** Implementasi pengarusutamaan gender belum optimal



Opportunities	*Threats*
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 6. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis Kesehatan Global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Isu lingkungan dan keberlanjutan 8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Tabel 1. 2 *Matriks Ringkasan Analisis SWOT*

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang diacu BBPOM di Jakarta. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan, BBPOM di Jakarta dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BBPOM di Jakarta berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Jakarta untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Jakarta dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:



1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:

   Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Jakarta . Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:

   BBPOM di Jakarta berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:

   BBPOM di Jakarta mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat:

   Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Jakarta adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jakarta menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait



pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BBPOM di Jakarta berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2. MISI BBPOM DI JAKARTA 2025 – 2029

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan



Dalam menjalankan visi tersebut BBPOM di Jakarta menerapkan budaya ASN BERAKHLAK.

2.3 TUJUAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta:
   Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Jakarta dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta:
   Melalui tujuan ini, BBPOM di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong



masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Jakarta berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta: Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Jakarta dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di wilayah kerja BBPOM di Jakarta: Tujuan:
   Melalui tujuan ini, BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan



dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.4 SASARAN KEGIATAN BBPOM DI JAKARTA 2025-2029

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wiayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO



3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

SK 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah



kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3 : Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting



dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan



mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:



Tabel 2. 1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1.Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	1.Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1.Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1.Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
			3.Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			4.Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
			5.Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			6.Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
			7.Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			8.Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			9.Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			10.Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			11.Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
			12.Persentase Label Produk Tembakau dan/ Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar
			13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta
			14.Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
			15.Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
		2.Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16.Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	2.Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di	3.Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17.Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
			18.Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan



Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
	wilayah kerja BBPOM di Jakarta		19.Jumlah desa pangan aman
			20.Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
2.Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	3.Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	4.Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21.Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
3.Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	4.Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	5.Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	22.Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta
		6.Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	23.Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
4.Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	5.Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien	7.Layanan Publik UPT yang prima	24.Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta
		8.Terwujudnya tata kelola	25.Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta



Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
pelayanan publik yang prima dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan	serta Layanan Publik yang Prima di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26.Nilai AKIP BBPOM di Jakarta
			27.Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta
			28.Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor HK.02.02.7A.09.24.233 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta yang sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 2 RKT tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		03 - Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	02 - Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	01 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	03 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		02 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		03 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		04 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		05 - Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	04 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	05 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	92,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6	06 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,7
		02 - Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	07 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
8	08 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
9	09 - Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	01 - Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	10 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,91
11	11 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,41
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	84,67
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4



2. 6 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Jakarta.

Tabel 2.3 PK tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,8
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67
2	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	16,9



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
6	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,52
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor: PR.01.01.21.06.25.237 tanggal 23 Juni 2025 Undangan Penyusunan Bimbingan Teknis Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM Tahun 2025-2029. Berdasarkan surat tersebut telah dilakukan kesepakatan antara pihak pengampu IKU dan UPT berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025.

Sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tanggal 14 Agustus 2025 mengenai proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029



yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Atas hal tersebut BBPOM di Jakarta telah melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi capaian indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 87% BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 97,44% dengan persen capaian sebesar 112%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan kesempatan untuk reviu target pada tahun 2025. Target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli, dilakukan perubahan target menjadi 89,75% atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta. Diusulkan naik dengan pertimbangan hasil pemantauan capaian Pusat dan UPT.
2. Realisasi capaian indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 85, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 99,60 dengan persen capaian sebesar 117,18%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 92 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
3. Realisasi capaian indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 85, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi



sebesar 96,21 dengan persen capaian sebesar 113,18%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 91 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.

4. Realisasi capaian indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder" bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 93,77 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 87,86 dengan persen capaian sebesar 93,70%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 88 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
5. Realisasi capaian indikator "Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 92, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 97,33 dengan persen capaian sebesar 105,79%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 93,5 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
6. Realisasi capaian indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 80, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 87,97 dengan persen capaian sebesar 109,96%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan



perubahan target yaitu menjadi 91 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.

7. Realisasi capaian indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 95,52 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 94,46 dengan persen capaian sebesar 98,89%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 95,25 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
8. Realisasi capaian indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 75 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 88,70 dengan persen capaian sebesar 118,27%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 91 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
9. Realisasi capaian indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 91,4 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 98,26, dengan persen capaian sebesar 107,51%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 94,8 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.
10. Realisasi capaian indikator “Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 44,58 BBPOM di Jakarta



memperoleh realisasi sebesar 48,94 dengan persen capaian sebesar 109,78%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas perubahan pada target tahun Renstra 2025-2029 yaitu target menjadi 16,9% atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta.

11. Realisasi capaian indikator “Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” bulan Juli Tahun 2025 dengan target indikator sebesar 72,8 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 75,6 dengan persen capaian sebesar 108,15%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2025 target IKU ini kemudian dilakukan revisi atas *baseline* realisasi bulan Juli dilakukan perubahan target yaitu menjadi 82 atas kesepakatan bersama antara pihak pengampu IKU ini dengan BBPOM di Jakarta. Diusulkan naik dengan pertimbangan hasil pemantauan capaian Pusat dan UPT.



2.7 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4 *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja*

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	678.432.000
	02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	97.400.000
	03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	92	92	92	92	92	559.436.800
	04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48.950.720
	05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	55.943.680
	06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,5	80,2	92,64	92,98	93	93,77	93,77	88	88	88	88	88	87.757.200
	07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	92	92	92	92	92	92	92	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	65.817.900



Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	65.817.900
	09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	577.875.000
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	288.937.500
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	48.156.250
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	678.432.000
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	48.156.250
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65,1	65,1	69,9	69,9	69,9	69,9	80	80	80	82	7.826.592.000
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												16,67	34.964.800
02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	13.680.000



Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
03 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	9.733.228.000
	18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	25	45	70	70	80	80	95	100	15	516.930.000
	19	Jumlah desa pangan aman			30	50	70	70	70	80	80	80	100	5	779.693.000
	20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	50	70	100	100	100	100	100	100	118.779.000
04 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7,43	14,86	22	29,72	37,15	44,58	88,29	90	94	98	16,9	341.171.000
05 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392.564.000
06 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452.653.000
07 - Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	577.890.000
08 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93,5	5.679.535.750
	26	Nilai AKIP UPT BPOM												83,52	5.079.535.750
	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5.079.535.750
	28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05	5.079.535.750
														Total	45.007.401.000



2.8 METODE PENGUKURAN

A. Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
b. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
c. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
d. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Jakarta sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capain setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 2. 5 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						

4						
5						
6						
Total Capaian PK (4)						
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						
Predikat NKO (6)						

Tabel 2. 6 *Perhitungan NKO Periodik*

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja
2) Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian.



Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80 < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60 < x ≤ 80%	
Kurang	20 < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0 ≤ x ≤ 20%	

Tabel 2. 7 Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan (tahun 2025) dengan target jangka menengah (tahun 2029), capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun bersangkutan (tahun 2025) dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029) sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun bersangkutan (tahun 2025) dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun bersangkutan (tahun 2025) dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029) sebesar <70% (x < 70).	

Tabel 2. 8 Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja tahun bersangkutan (tahun 2025) dengan Target jangka menengah (tahun 2029)

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input}\ IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$



Tingkat Efisiensi dihitung sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 9 Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dari 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja

Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Sasaran Strategis	Capaian Real per SK	Capaian per SK sudah normalisasi	No	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
						Target	Realisasi	%Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,03%	104,95%	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	89,75	99,79	111,19%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
			2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Desember	26,00	27,78	106,85%	Sangat Baik	-	106,85%
			3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	92,00	100	108,70%	Sangat Baik	-	108,70%
			4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Desember	100,00	100	100,00%	Baik	-	100,00%
			5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	96,21	105,73%	Sangat Baik	-	105,73%
			6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Desember	88,00	91,55	104,03%	Sangat Baik	-	104,03%
			7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	93,50	98,69	105,55%	Sangat Baik	-	105,55%
			8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	96,44	105,98%	Sangat Baik	-	105,98%
			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	95,25	96,34	101,14%	Sangat Baik	-	101,14%
			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	92,85	102,03%	Sangat Baik	-	102,03%
			11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Desember	94,80	99,12	104,56%	Sangat Baik	-	104,56%
			12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Desember	85,00	90,4	106,35%	Sangat Baik	-	106,35%



Sasaran Strategis	Capaian Real per SK	Capaian per SK sudah normalisasi	No	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
						Target	Realisasi	%Capaian			
			13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	Desember	100,00	103,41	103,41%	Sangat Baik	-	103,41%
			14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Desember	82,00	88,3	107,68%	Sangat Baik	-	107,68%
			15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Desember	16,67	16,67	100,00%	Baik	-	100,00%
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,45%	100,45%	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	64,00	64,29	100,45%	Sangat Baik	-	100,45%
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,12%	100,12%	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Desember	87,06	87,47	100,47%	Sangat Baik	-	100,47%
			18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Desember	15,00	15	100,00%	Baik	-	100,00%
			19	Jumlah desa pangan aman	Desember	5,00	5	100,00%	Baik	-	100,00%
			20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Desember	1,00	1	100,00%	Baik	-	100,00%
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110,00%	110,00%	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Desember	16,90	24,05	142,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	109,34%	109,34%	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Desember	70,00	76,54	109,34%	Sangat Baik	-	109,34%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	104,17%	104,17%	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Desember	90,00	93,75	104,17%	Sangat Baik	-	104,17%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	105,11%	105,11%	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Desember	4,70	4,94	105,11%	Sangat Baik	-	105,11%
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,23%	98,23%	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Desember	93,50	93,61	100,12%	Sangat Baik	-	100,12%
			26	Nilai AKIP UPT BPOM	Desember	83,52	81,33	97,38%	Baik	-	97,38%
			27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Desember	5,00	5	100,00%	Baik	-	100,00%
			28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Desember	3,05	2,91	95,41%	Baik	-	95,41%
											2896,66%
											103,45%
											Istimewa



Sasaran Kegiatan 01

Meningkatknya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)

   a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)



30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring)
3. Renlak kategori kelas terapi

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling
2. Ketentuan evaluasi penandaan
3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot : 20%)

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (a1 + a2) / 2



Keterangan

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*Service Level Agreement*/SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji

= (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / Jumlah sampel yang diuji) × 100%

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan

= (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

= (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

a1 = Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ Target sampel sesuai Pedoman Sampling dan renlak) × 100%



a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji

= (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan

= (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

= (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

a1 = Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ Target sampel sesuai Pedoman Sampling dan renlak) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian



b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

= (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

= (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar



2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Pada RKT, sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah UPT dengan indikator persentase sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar memiliki target 100, berbeda dengan nomenklatur dan target pada PK, RAPK dan Renstra. Hal ini dikarenakan target pada RKT disusun tahun n-1 (yaitu pada tahun 2024) yang bersifat prakiraan. Perubahan revisi nomenklatur indikator dan target pada PK, RAPK dan Renstra di tahun berjalan yaitu Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 89,75.

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	89,75	99,79	111,19	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **89,75%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **99,79%**. Hal ini menghasilkan capaian kinerja sebesar **111,19%**, yang menunjukkan bahwa realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, terdapat selisih positif sebesar **10,04 poin** dari target, yang mengindikasikan kinerja unit pengelola IKU berada di atas ekspektasi.

Capaian sebesar 111,19% menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam menindaklanjuti sampel sediaan farmasi berisiko sesuai ketentuan. Secara manajerial, kondisi ini dapat diartikan bahwa strategi pengawasan, proses tindak lanjut, serta pengendalian mutu berjalan optimal atau bahkan lebih progresif dibandingkan perencanaan awal.

Namun demikian, sesuai dengan **Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman SAKIP**, nilai capaian di atas 110% perlu

dilakukan **normalisasi menjadi maksimal 110%**. Kebijakan ini bertujuan menjaga konsistensi penilaian kinerja agar tidak terjadi distorsi evaluasi akibat over-achievement yang terlalu tinggi.

Kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” dalam tabel merujuk pada perlunya proses normalisasi atau evaluasi lanjutan sebelum penetapan kategori akhir (misalnya sangat baik, baik, cukup, atau kurang). Artinya, meskipun secara angka menunjukkan over-achievement, klasifikasi kinerja belum dapat ditetapkan tanpa mengikuti ketentuan teknis penilaian yang berlaku.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi KInerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	89,75	94,75	99,79	-	111,19	105,32	Tercapai/ melampaui 

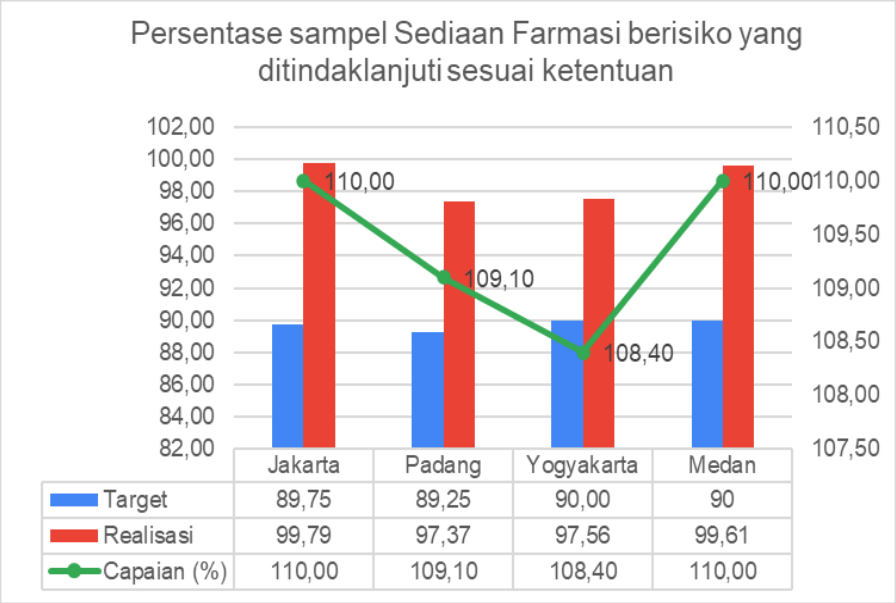
Pada tahun 2025, target tahunan ditetapkan sebesar **89,75%,** sedangkan realisasi mencapai **99,79%**, dengan tingkat capaian sebesar **111,19%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target yang direncanakan dalam kerangka jangka menengah.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar **94,75%**, realisasi tahun 2025 sebesar **99,79%** telah berada di atas target jangka menengah tersebut. Secara persentase, capaian terhadap target Renstra telah mencapai **105,32%**, yang berarti bahwa



hingga tahun berjalan, kinerja telah melampaui ekspektasi akhir periode perencanaan strategis.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang paling tinggi adalah BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Medan. Sedangkan yang paling rendah adalah BBPOM di Padang. Namun demikian, semuanya melampaui target. Target yang ditetapkan untuk masing-masing Balai berbeda, sehingga nilai capaiannya juga berbeda. Persentase capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Medan berturut-turut adalah 111,19% dan 110,68% sehingga harus dinormalisasi menjadi 110%, merupakan persentase capaian yang tertinggi, sementara persentase capaian BBPOM di Yogyakarta adalah yang terendah, namun masih masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan ini menggambarkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan efektif dan relatif merata di seluruh wilayah. Perbedaan capaian lebih mencerminkan variasi tingkat optimalisasi kinerja, bukan perbedaan kualitas yang signifikan.

Dengan demikian, secara nasional dapat disimpulkan bahwa program pengawasan pada indikator ini telah dilaksanakan dengan sangat baik dan konsisten di keempat wilayah ini.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.
Rincian realisasi untuk masing-masing komoditi adalah sebagai berikut :

Komoditi Sediaan Farmasi	Realisasi
Obat	99,80%
Obat Bahan Alam	96,34%
Suplemen Kesehatan	100%
Kosmetik	100%

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama ini tergantung pada kesesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian (sampling dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengujian dilakukan dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling dan memenuhi *timeline* pengujian serta pelaporannya melalui SIPT hampir seluruhnya memenuhi *timeline* yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling), pemenuhan target sampling dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (untuk obat) atau persentase tindak lanjut surat dari Kedeputian 2 untuk OBA, SK dan kosmetik. Sebenarnya kendala dalam pelaksanaan pengujian selalu ada, antara lain kondisi alat yang tiba-tiba rusak, tidak tersedianya reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang atau kebutuhan pengujian lainnya, namun selalu dapat diatasi dengan cepat sehingga pelaksanaan pengujian tetap berjalan lancar.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut adalah :



- Adanya koordinasi yang cukup baik di internal BBPOM Jakarta (antara tim sampling, tim pengujian dan tim penerima sampel di bagian Tata Usaha) maupun dengan Balai lain di Regiona Semarang, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian serta tindak lanjutnya dapat berjalan dengan baik.
- Komitmen semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sudah cukup tinggi, baik tim di internal BBPOM Jakarta maupun tim di Balai lain dalam Region Semarang. Komitmen ini antara lain dalam mematuhi Pedoman Sampling dan Pengujian, Petunjuk Teknis Regionalisasi maupun ketentuan lain yang ditetapkan Badan POM, juga komitmen dalam melakukan pengujian dan pelaporannya sesuai *timeline* yang ditetapkan.

Meskipun tidak ada kendala yang berarti dan pelaksanaan sampling dan pengujian telah berjalan dengan baik, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain juga tetap perlu ditingkatkan.

Tabel 3. 4 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Meningkatkan koordinasi di internal Balai mauoun dengan Balai lain	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain	31 Des 2025	Y	O-6	Waktu sampling obat yang semakin lama di sarana serta ketersediaan item dan jumlah obat
			Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara ketat		Y	1 : O-2 2 : O-4	1.Penyelesaian sampel mikrobiologi melewati batas



								akhir waktu pengujian 2. Keterlambatan pelaporan atau input data di SIPT

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 5 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	99,79	111,19%	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%	1,11	0,11	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,11 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara



maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang melebihi target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang dihasilkan dari pengukuran dan pelaporan berfungsi sebagai umpan balik bagi organisasi. Pemanfaatan informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.

Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator persentase sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.



2. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.



(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.

j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025



Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	26	27.78	106.85	Sangat Baik	

Pada tahun 2025 BBPOM di Jakarta telah memberikan KIE terkait Farmakovigilan kepada 90 sarana pelayanan kesehatan di wilayan DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, 25 (27,78%) diantaranya telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan melalui aplikasi e-meso. Sehingga capaian IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM didapatkan sebesar 106,85% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

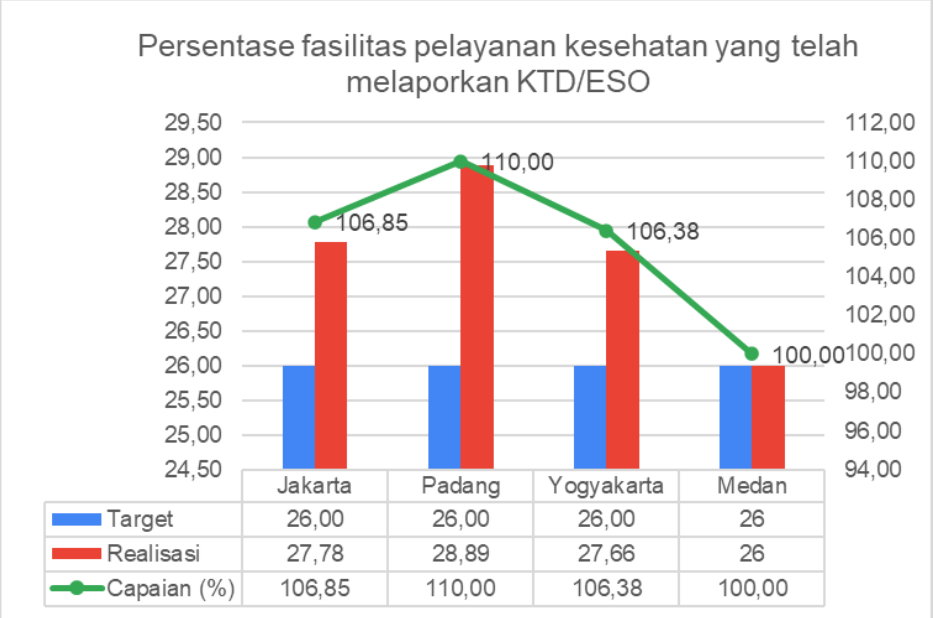
Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	30	27,78	-	106,85	92,60	Akan tercapai 

Target IKU Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 26%, sedangkan target jangka menengah (Renstra 2025–2029) pada tahun 2029 sebesar 30%. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 27,78%,



sehingga capaian terhadap target 2025 sebesar 106,85%. Jika dibandingkan dengan target 2029, realisasi 2025 tersebut setara dengan 92,60% dari target 30%, sehingga indikator ini berada pada kategori “Akan tercapai”.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	26,00	26,00	26,00	26
Realisasi	27,78	28,89	27,66	26
Capaian (%)	106,85	110,00	106,38	100,00

Berdasarkan grafik, perbandingan realisasi kinerja antar unit kerja untuk indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, seluruh unit memiliki target yang sama yaitu 26%. Pada tahun 2025, realisasi tertinggi dicapai oleh Padang sebesar 28,89% dengan capaian 110,00%, diikuti Jakarta sebesar 27,78% (capaian 106,85%) dan Yogyakarta sebesar 27,66% (capaian 106,38%). Sementara itu, Medan mencapai realisasi 26% dengan capaian 100,00%, sesuai target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 berhasil dicapai karena dilakukan

monitoring rutin kepada sarana target. Monitoring dilakukan secara aktif melalui komunikasi langsung (chat) untuk mengingatkan, menindaklanjuti kendala pelaporan, serta memastikan sarana secara disiplin melakukan pelaporan KTD/ESO. Ke depan, upaya perbaikan tetap dilanjutkan melalui monitoring berkala, namun mekanismenya direncanakan lebih efektif dengan pendampingan melalui pertemuan daring (Zoom) sehingga koordinasi, klarifikasi kendala, dan penyamaan pemahaman sarana dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur.

Tabel 3. 8 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Kegiatan pembuatan akun karena kegiatan KIE dilakukan secara daring	Menyusun dan melaksanakan program KIE terstruktur mulai tahun 2025 yang akan dilanjutkan pada 5 tahun berikutnya yang mencakup pelatihan blended (daring dan luring)	Pada tahun 2026, bimtek farmako vigilans dilakukan secara hybrid. pada undangan, peserta diminta untuk membuat akun sebelum bimtek berdasarkan buku panduan	-	Y	S1	sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat (MESO) kepada BPOM
		Mayoritas peserta kegiatan merupakan penanggung jawab kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan, sementara keluhan dari pasien umumnya	Melibatkan dokter dan tenaga klinis lainnya dalam kegiatan KIE, sekaligus membangun panduan dan sistem pendukung farmakovigilans di seluruh jenjang layanan	Pada 2026 Bimtek menyajikan materi tentang mengalirkan data dari dokter yang mendiagnosa kepada	-	Y	S1	sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat



		diterima oleh dokter	kesehatan untuk meningkatkan partisipasi pelaporan KTD secara merata	petugas input				(MESO) kepada BPOM

Berdasarkan Tabel 3.9, terdapat dua isu utama yang perlu ditindaklanjuti untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO*. Pertama, masih terdapat kendala pada pembuatan akun karena kegiatan KIE dilakukan secara daring, sehingga diperlukan penguatan program KIE yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tindak lanjut yang direncanakan adalah pelaksanaan bimtek farmakovigilans secara **hybrid**, serta mewajibkan peserta membuat akun sebelum bimtek dengan mengacu pada buku panduan, agar kesiapan sarana dalam pelaporan meningkat. Kedua, partisipasi pelaporan KTD masih belum merata karena mayoritas peserta kegiatan merupakan penanggung jawab kefarmasian, sementara keluhan pasien umumnya diterima oleh dokter. Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi diarahkan pada pelibatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam kegiatan KIE, disertai penyusunan panduan dan sistem pendukung farmakovigilans di seluruh jenis layanan kesehatan. Ke depan, materi bimtek juga perlu diperkuat dengan penekanan pada alur pengaliran data dari dokter yang mendiagnosa kepada petugas input, sehingga proses pelaporan menjadi lebih lancar, konsisten, dan merata.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan pemantauan dan pendampingan pelaporan kepada sarana target. Kegiatan yang paling berkontribusi adalah monitoring rutin melalui komunikasi langsung (chat) untuk memastikan sarana melakukan pelaporan, menindaklanjuti sarana yang



belum melapor, serta membantu penyelesaian kendala teknis/non-teknis dalam proses pelaporan. Selain itu, koordinasi internal dan pemetaan sarana target turut memperkuat fokus tindak lanjut sehingga intervensi dapat dilakukan tepat sasaran. Ke depan, program/kegiatan pendukung ini akan ditingkatkan efektivitasnya melalui monitoring terjadwal dan pendampingan daring (Zoom) agar proses konfirmasi, pembinaan, dan penyamaan pemahaman sarana dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan berdampak pada konsistensi pelaporan.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 9 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,78	106,85	2.000.000	2.000.000	100%	1,00	0	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0,98 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran " Efisien". Upaya efisiensi anggaran pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) secara daring/online, sehingga kebutuhan biaya operasional (perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi, dan dukungan pertemuan luring) dapat diminimalkan tanpa mengurangi substansi pelaksanaan kegiatan. Dengan strategi ini, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus lebih hemat, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat disimpulkan "Efisien".

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO digunakan

sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa monitoring rutin kepada sarana target melalui komunikasi langsung (chat) efektif dalam mendorong kepatuhan pelaporan, sehingga metode tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk memperkuat tindak lanjut dan mempercepat penyelesaian kendala, pada tahun berikutnya monitoring direncanakan dilakukan lebih terstruktur melalui pertemuan daring (Zoom). Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis tahun 2025 yang dilakukan secara online menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pembinaan kepada sarana.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi :

   1. Kesesuaian target sampel UPT
   2. Kesesuaian parameter uji
   3. Ketepatan pengambilan kesimpulan
   4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
   5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian



e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan: Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A1 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang



belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :



((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)/Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	92	100,00	108,70	Sangat Baik	

Pada tahun 2025, indikator kinerja utama Persentase Sampel Pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029. Target kinerja telah ditetapkan sebesar 92% dengan realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja mencapai 108,70%. Data realisasi tahun pertama penetapan IKU pada 2025 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Dengan tingkat capaian di atas 100%, kinerja pada Tahun 2025 dapat dikategorikan “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	96	100	-	108,70	104,17	Tercapai/ Melampaui

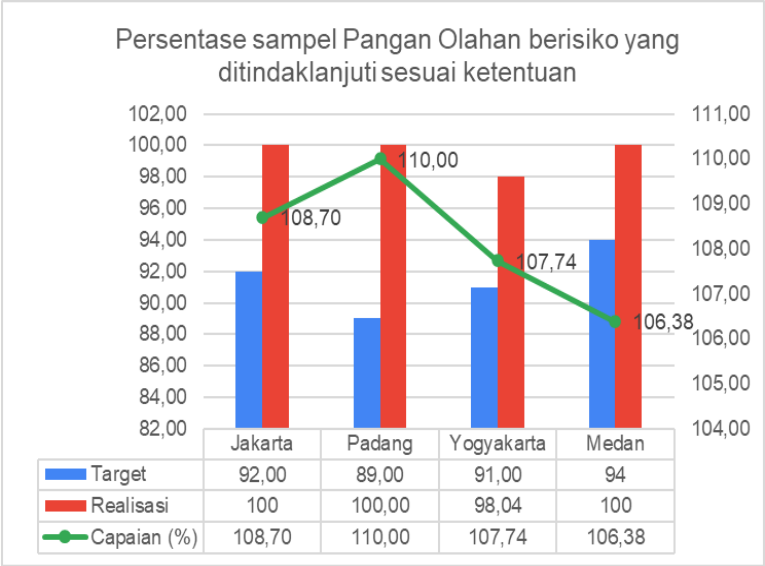
Berdasarkan Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029, indikator kinerja utama “Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” menunjukkan capaian yang sangat baik.

Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar 92%, sedangkan realisasi kinerja yang dicapai mencapai 100% dengan capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 108,70%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan tidak hanya melampaui target tahunan yang telah ditetapkan tetapi juga melampaui target yang direncanakan dalam kerangka jangka menengah.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 96%, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 100% telah berada diatas target jangka menengah tersebut. Secara persentase, capaian target Renstra telah mencapai 104,17%, yang berarti bahwa hingga tahun berjalan kinerja telah melampau ekspektasi akhir periode perencanaan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 telah melampaui target akhir

Renstra, sehingga indikator kinerja utama ini dapat dikategorikan tercapai/melampaui.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain pada indikator "Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan", seluruh unit kerja yang dibandingkan menunjukkan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan dari masing-masing Balai berbeda, sehingga nilai capaian yang dihasilkan juga berbeda.

Realisasi kinerja dari Balai Besar POM di Yogyakarta ditahun 2025 sebesar 98,04% paling kecil dibandingkan dengan Balai besar POM Jakarta, Medan dan Padang dengan nilai 100%. Persentase capaian Balai Besar POM di Padang tahun 2025 sebesar 112,36% dan dinormalisasi menjadi 110% merupakan capaian yang tertinggi, sementara persentase capaian Balai Besar POM di Jakarta, Yogyakarta dan Medan masih masuk dalam kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko secara efektif dan konsisten. Meskipun terdapat variasi tingkat capaian antar unit kerja, seluruhnya berada pada kategori **Sangat baik**, yang

mencerminkan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran kinerja yang ditetapkan

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sampling telah sesuai perencanaannya, pengujian dilakukan dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling dan memenuhi *timeline* pengujian serta pelaporan melalui SIPT hampir seluruhnya memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Sebenarnya kendala dalam pelaksanaan pengujian selalu ada,



antara lain kondisi alat yang tiba-tiba rusak, tidak tersedianya reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang atau kebutuhan pengujian lainnya, namun selalu dapat diatasi dengan cepat sehingga pelaksanaan pengujian tetap berjalan lancar.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut adalah:

- adanya koordinasi yang baik di lingkungan internal (antara tim sampling, tim penerima contoh dan pelaporan di bagian Tata Usaha dan tim pengujian) dan eksternal Balai Besar POM di Jakarta yaitu anggota
- regional Semarang memperlancar pelaksanaan dalam pencapaian target kinerja
- Komitmen semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sudah cukup tinggi baik dari internal Balai Besar POM Jakarta maupun dari Balai anggota region Semarang.
- Komitmen untuk mematuhi Pedoman Sampling dan Pengujian, Petunjuk Teknis Regionalisasi maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh Badan POM
- Komitmen Tim Pusdatin yang terus mengawal seluruh permasalahan yang terjadi terkait pelaporan lewat SIPT sehingga pelaporan pengujian dapat memenuhi *timeline* yang ditetapkan
- Koordinasi yang baik antara lintas sektor mendukung percepatan dalam pemeliharaan dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengujian
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kompetensi penguji terhadap metoda dan alat terbaru terus meningkat dan uptodate.



Tabel 3. 12 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Untuk pengujian tidak ada kendala	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain	31 Des 2025 -	T	O-1	penyelesaian sampel tidak sesuai dengan metoda
		Sampling tidak ada kendala	Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara berkala	31 Des 2025	Y	1 : O-2 2 : O-4	Penyelesaian sampel mikrobiologi melewati batas akhir waktu pengujian Keterlambatan pelaporan atau input data di SIPT

Kendala/permasalahan yang terdapat pada Tabel 3.17. Matriks rekomendasi di tahun 2025 belum dimasukkan dalam daftar dokumen risiko dan akan dimasukkan dalam daftar dokumen risiko di tahun 2026.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025 ini. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dalam pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian baik sangat mendukung pemenuhan target indikator kinerja ini.

Selain itu komitmen dari personil yang mengikuti peningkatan kompetensi personil setiap tahun nya dengan program bimbingan teknis personil baik di poksi



sampling dan poksi pengujian agar dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga wawasan dan kompetensi personil meningkat.

Adanya program evaluasi dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam memonitoring kesesuaian hasil pengujian dari Balai Besar POM di Jakarta

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 13 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel 3.14, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,09 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang melebihi target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang dihasilkan dari pengukuran dan pelaporan berfungsi sebagai umpan balik bagi organisasi. Pemanfaatan informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.



Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan



parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai Formula standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A1, A2, \ldots., An) + (35\% \times B1, B2, \ldots., Bn) + (35\% \times C1, C2, \ldots., Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	100	100,00	100,00	Baik	

Indikator kinerja utama Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator baru yang ditetapkan di RPJMN 2025-2029. Realisasi persentase tahun 2025 merupakan baseline untuk tahun 2026. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai



standar telah mencapai target dengan capaian 100,0% sehingga masuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi KInerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	-	100	100,00	Tercapai/ Melampaui

Persentase realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target di tahun 2029 (100%) dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (100%) dan target tahun 2029 (100%), nilai persentase capaian tetap 100% dan masuk dalam kategori “tercapai/terlampaui”.

Pada Tahun 2025, Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahun berjalan sudah tercapai dan sudah sesuai dengan target yang direncanakan dalam kerangka jangka menengah.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 100% telah sama dengan target

jangka menengah tersebut, sehingga indikator kinerja utama ini dapat dikategorikan tercapai/melampaui.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

d.



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	100,00	100,00	100,00	100
Realisasi	100	100,00	100,00	0
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	0,00

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar, BBPOM Jakarta, Padang dan Yogyakarta sama yaitu 100% dan masuk dalam kategori "tercapai/terlampaui". Sedangkan BBPOM Medan realisasi Persentase sampel KLB Keracunan Pangan sebesar 0% (tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diuji pada tahun 2025).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Pelaksanaan sampling dan pengujian KLB Keracunan Pangan dilakukan sesuai dengan parameter uji di Pedoman Sampling dan penyebab etiologi dari KLB dan dilaporkan sesuai *timeline* pengujian. Laboratorium menerima 39 sampel KLB Keracunan Pangan dan telah selesai dilakukan pengujian (uji kimia dan mikrobiologi). Sampel KLB Keracunan Pangan

yang diterima berasal dari beberapa SPPG dari program Makan Bergizi Gratis pemerintah. Jenis pengujian yang dilakukan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas kesehatan setempat terhadap penyebab etiologi KLB dan berdasarkan etiologi tersebut sampel di sampling untuk dilakukan uji kimia/mikrobiologi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengujian selalu ada antara lain kondisi alat yang tiba-tiba rusak, tidak tersedianya reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang atau kebutuhan pengujian lainnya. Koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia dan koordinasi eksternal dengan lintas sektoral mendukung perbaikan dan penyelesaian terhadap kendala-kendala selama proses pengujian sehingga pelaksanaan pengujian tetap lancar.

Tabel 3. 16 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Untuk pengujian tidak ada kendala	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain	31 Des 26	T	-	-
		Sampling tidak ada kendala	Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Des 26	T	-	-

Kendala/permasalahan yang terdapat pada Tabel 3.17. Matriks rekomendasi di tahun 2025 belum dimasukkan dalam daftar dokumen risiko dan akan dimasukkan dalam daftar dokumen risiko di tahun 2026.



f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 program makanan bergizi gratis sudah berjalan. Komitmen Badan POM dan Balai Besar POM pada program MBG dari pemerintah dilakukan dengan melakukan pengawasan ke sarana produksi dan penyedia makanan MBG. Koordinasi bersama dengan lintas sektor dalam kolaborasi pengawasan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan pada makanan bergizi gratis (MBG).

Namun pada pelaksanaannya kurang cepatnya informasi yang didapatkan oleh petugas BPOM/BBPOM dan terutama kejadian KLB yang sampai menyebabkan terjadinya bahaya kematian seringkali informasi kejadian tidak didapatkan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut dilakukan kegiatan KIE dan audiensi bersama dengan lintas sektor terkait pengawasan terhadap SPPG.

Selain itu petugas yang menangani pengawasan KLB masih terbatas sehingga pada tahun 2025 dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan akan terus berkelanjutan di tahun depan sehingga dengan meningkatnya jumlah petugas dan kompetensinya diharapkan petugas dapat bergerak cepat dalam penanganan KLB Keracunan Pangan yang terjadi.

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan, peningkatan koordinasi dengan Badan POM, Balai Besar / Balai POM dan lintas sektor serta peningkatan kompetensi diharapkan dapat efektif untuk memenuhi target indikator kinerja persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar di tahun 2025.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 17 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100%	699.296.000	699.242.730	99,99 %	**1.00**	**0.00**	**100%**	Efisien



Berdasarkan tabel 3,17 di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang dihasilkan dari pengukuran dan pelaporan berfungsi sebagai umpan balik bagi organisasi. Pemanfaatan informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis. Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif



untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.

Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E+20%F

Keterangan :



A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1+A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :



(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	91	96,21	105,73	Sangat Baik	

Pada tahun 2025 indikator persentase sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ditetapkan di RPJMN 2025-2029. Realisasi persentase sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 merupakan baseline untuk tahun 2026. Persentase sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 105,73% sehingga masuk dalam kategori “sangat baik.”sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 105,73% sehingga masuk dalam kategori “sangat baik.”

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

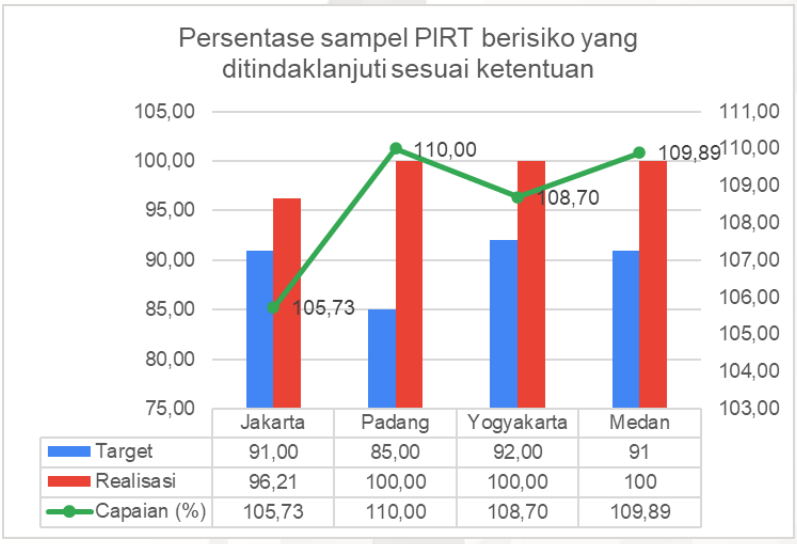
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	95,00	96,21	-	105,73	101,27	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel 3.20 Realisasi kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah melampaui target di tahun 2029 (95%) dengan capaian 105.73%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (96.21%) dan target tahun 2029 (95%), nilai persentase capaian menjadi 101.27%. Nilai ini mengalami penurunan namun masih masuk dalam kategori "tercapai/terlampaui"

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase realisasi BBPOM Jakarta paling rendah dibandingkan dengan BBPOM Padang, Yogyakarta, Medan namun persentase realisasi telah melampaui target tahun 2025. Capaian Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 untuk BBPOM di Jakarta sebesar 105,73% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Padang

sebesar 110% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Yogyakarta sebesar 108,70% (kriteria tercapai/terlampaui) dan BBPOM di Medan sebesar 109,89% (kriteria tercapai/terlampaui). Apabila dilihat lebih rinci target yang ditetapkan oleh BBPOM di Padang lebih kecil yaitu 85% lalu BBPOM Jakarta dan Medan (91%) kemudian BBPOM Yogyakarta sebesar 92%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun telah tercapai ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi belum 100%. Realisasi belum sesuai dengan Target Pedoman Sampling dikarenakan pada TW I terdapat program efisiensi yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah sampel PIRT yang akan di sampling. Untuk pengambilan sampel sesuai dengan target sampel akan dilaporkan di TW II (April).

Program efisiensi anggaran dari pemerintah pada awal bulan Februari tahun 2025 membawa dampak terhadap sampling dan pengujian sampel PIRT tahun 2025. Perencanaan jumlah, waktu sampling dan pengujian sampel yang seyogyanya dilakukan pada TW I dengan jumlah 58 menjadi disampling pada bulan Januari - Februari sejumlah 36 sampel sehingga realisasi jumlah sampel PIRT belum sesuai dengan Target Pedoman Sampling. Perubahan kembali anggaran menjadi normatif 100% tidak menyebabkan perubahan realisasi dikarenakan untuk *timeline* pengambilan sampel tidak sesuai dengan target yaitu di TW I walaupun di TW II jumlah sampling dan pengujian telah dilaporkan semuanya. Banyaknya jenis dan jumlah sampel PIRT yang disampling berdampak terhadap kegiatan samping karena jenis sediaan yang ada di peredaran terbatas sehingga target pengawasan tidak maksimal.



Tabel 3. 20 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kekuatan	Tidak ada kendala	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain	31 Des 2025	T	-	-
			Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Des 2025	T	-	-

Kendala/permasalahan yang terdapat pada Tabel 3.21 Matriks rekomendasi di tahun 2025 belum dimasukkan dalam daftar dokumen risiko dan akan dimasukkan dalam daftar dokumen risiko di tahun 2026.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Koordinasi yang baik

dengan lintas sektor dalam pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian baik sangat mendukung pemenuhan target indikator kinerja ini.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 21 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,21	105,73 %	699.296.000	699.242.730	99,99 %	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel 3.22, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,06 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang dihasilkan dari pengukuran dan pelaporan berfungsi sebagai umpan balik bagi organisasi. Pemanfaatan informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.



Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.

Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
    - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);



- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n.

Contoh:

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA



a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	88	91,55	104,03	Sangat Baik	

Pada Tahun 2025 indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* merupakan indikator baru yang ditetapkan di RPJMN 2025-2029 dengan target pada tahun 2025 sebesar 88%. Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* telah mencapai target dengan capaian 104,03% sehingga masuk dalam kategori "sangat baik"

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

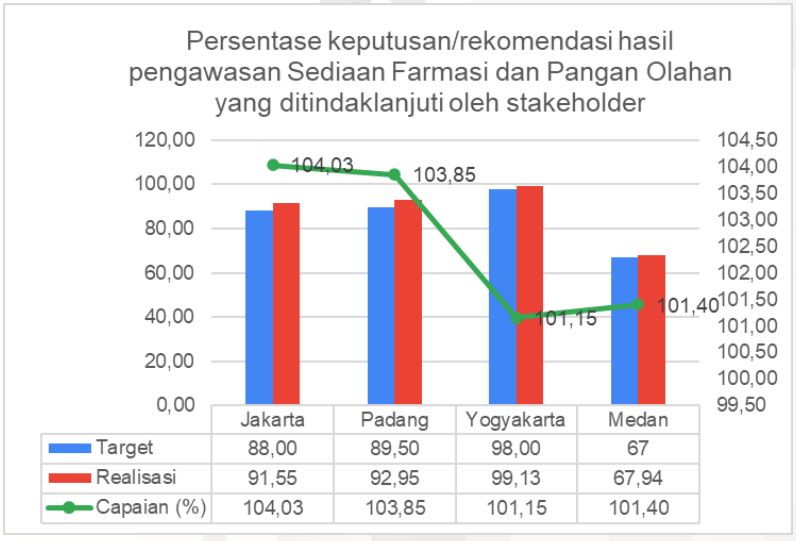
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,00	90,00	91,55	-	104,03	101,72	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel 3.24 Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target di tahun 2029 (90%) dengan capaian 104,03%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (91.55%) dan target tahun 2029 (90%), nilai persentase capaian menjadi 101,72%. Nilai ini mengalami penurunan namun masih masuk dalam kategori "tercapai/terlampaui".

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder BBPOM Jakarta berada di posisi ketiga dengan urutan dari yang tertinggi ke rendah adalah Yogyakarta, Padang, Jakarta dan Medan. Namun persentase hasil

capaian terhadap target, BBPOM Jakarta berada di posisi tertinggi dengan nilai 104.03%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah mencapai target karena sudah dilakukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon, dan melakukan evaluasi data serta memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan pelaku usaha melaporkan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BBPOM di Jakarta

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut :

Tabel 3. 24 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih ada sarana yang belum selesai melakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan	Melakukan sosialisai kepada sarana tentang *timeline* tindaklanjut	Melakukan sosialisasi kepada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan tentang *timeline* tindaklanjut hasil pemeriksaan	31 Des 2025	Y	O-22	Sarana menyampaikan CAPA atau data tambahan (hasil inspeksi audit) melewati *timeline* dan tidak sekaligus



No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
			Menjadikan sarana yang tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan mendapatkan bobot yang tinggi untuk rencana pemeriksaan tahun berikutnya	Menambahkan bobot untuk rencana pemeriksaan tahun berikutnya bagi sarana yang tidak melakukan tindaklanjut				

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tindaklanjut oleh pelaku usaha lama karena ada beberapa faktor yang memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti, terjadi juga kesalahan perhitungan penyebut, harusnya yang dihitung adalah yang telah masuk *timeline* untuk tindaklanjut, tetapi jumlah respon sudah mulai banyak tetapi tidak sebanding dengan banyaknya rekomendasi yang diterbitkan. Oleh karenanya dilakukan rekomendasi perbaikan kinerja dengan melakukan evaluasi data dan memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan, dan melakukan revisi

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 25 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	91,55	104,03%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,04 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan



efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

Evaluasi kinerja UPT dan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait tindak lanjut persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang lintas sektor.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
   3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.



b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
d. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A. % Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi.



Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

B. % Sarprod OBA = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

C. % Sarprod Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%



D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

D. % Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	93,5	98,69	105,55	Sangat Baik	

Sampai dengan akhir tahun 2025, target indikator sarana persentase fasilitas produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti



sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 105,55% sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

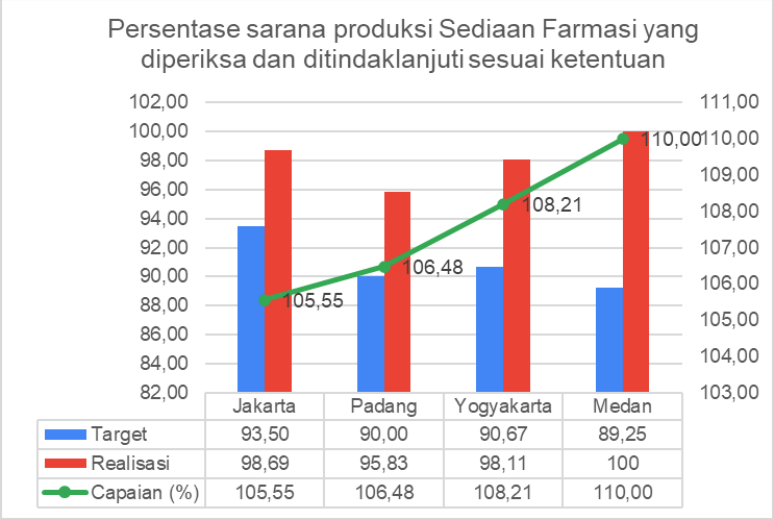
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	98,00	98,69	-	105,55	100,70	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan tabel 3.28 Realisasi kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah melampaui target di tahun 2029 (98%) dengan capaian 105.55%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (98,69%) dan target tahun 2029 (98%), nilai persentase capaian menjadi

100,70.27%. Nilai ini mengalami penurunan namun masih masuk dalam kategori “tercapai/terlampaui”

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, Persentase realisasi BBPOM Jakarta berada pada urutan kedua jika dibandingkan dengan BBPOM Padang, Yogyakarta, Medan. Sedangkan realisasi tertinggi adalah BBPOM di Medan dan yang terendah adalah BBPOM di Padang. Namun persentase realisasi telah melampaui target tahun 2025. Capaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 untuk BBPOM di Jakarta sebesar 105,55% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Padang sebesar 106,48% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Yogyakarta sebesar 108,21% (kriteria tercapai/terlampaui) dan BBPOM di Medan sebesar 110,00% (kriteria tercapai/terlampaui). Apabila dilihat lebih rinci capaian BBPOM di Jakarta paling rendah dibandingkan dengan BBPOM lain. Hal ini disebabkan oleh penetapan target BBPOM di Jakarta paling tinggi (93,50) jika dibandingkan BBPOM pembanding yaitu BBPOM

di Padang sebesar 90%, BBPOM di Yogyakarta sebesar 90,67% dan BBPOM di Medan sebesar 89,25 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dan capaian pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada tahun 2025 dapat tercapai walaupun terdapat penyesuaian target menjadi lebih tinggi namun tetap mendapat capaian dengan kategori Sangat Baik. Hal ini merupakan hasil koordinasi dan monitoring yang efektif sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Tabel 3. 28 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuanr	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	Telah sesuai rencana	31 Des 2025	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Strategi/ Inovasi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Adanya inovasi Roti Buaia yang merupakan inovasi untuk melakukan monitoring tindak lanjut yang dikirimkan oleh pelaku usaha, sehingga pembuatan tindak lanjut dapat dilakukan



monitoring.

2. Adanya pemantauan rutin terhadap pelaksanaan input SIPT oleh petugas yang ditunjuk untuk mencegah adanya keterlambatan pelaporan SIPT
3. Adanya review tindak lanjut secara berjenjang untuk memastikan bahwa tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan pedoman

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 29 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	98,69	105,55 %	219.393.000	219.289.371	99,95 %	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,06 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi



juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
4. Dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk menetapkan/ mengubah peraturan/ kebijakan

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
   1) Ketepatan waktu tindak lanjut
   2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan



% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= *Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* x 100%

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

   Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

   i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);

   ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan

   iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit



a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	91	96,44	105,98	Sangat Baik	

Sampai dengan akhir tahun 2025, target indikator sarana persentase fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 105,98% sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

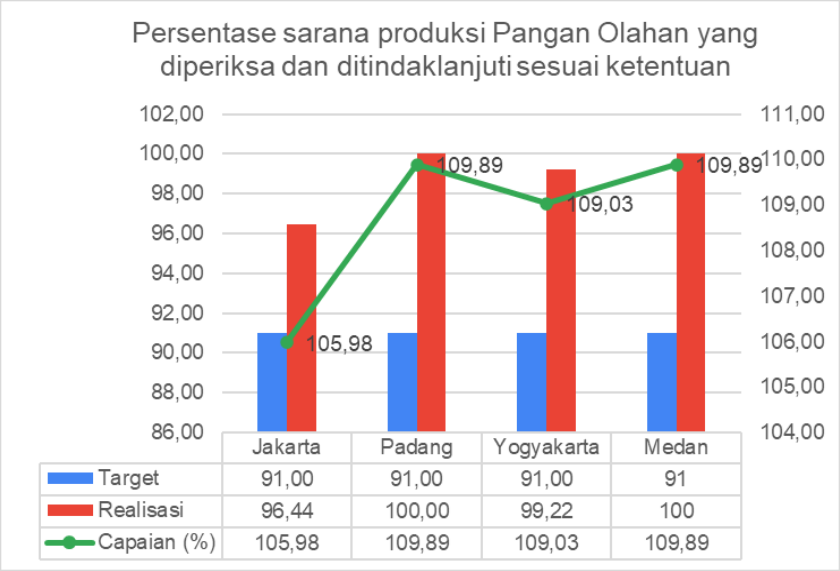
Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	95,00	96,44	-	105,98	101,52	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan tabel 3.32 Realisasi kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah melampaui target di tahun 2029 (95%) dengan capaian 105.98%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (96,44%) dan target tahun 2029 (95%), nilai persentase



capaian menjadi 101,52%. Nilai ini mengalami penurunan namun masih masuk dalam kategori “tercapai/terlampaui”.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	91,00	91,00	91,00	91
Realisasi	96,44	100,00	99,22	100
Capaian (%)	105,98	109,89	109,03	109,89

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, Persentase realisasi BBPOM Jakarta berada pada urutan keempat jika dibandingkan dengan BBPOM Padang, Yogyakarta, Medan. Namun persentase realisasi telah melampaui target tahun 2025. Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 untuk BBPOM di Jakarta sebesar 105,98% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Padang sebesar 109,89% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Yogyakarta sebesar 109,03% (kriteria tercapai/terlampaui) dan BBPOM di Medan sebesar 109.89% (kriteria tercapai/terlampaui). Apabila dilihat lebih rinci capaian BBPOM di Jakarta paling rendah dibandingkan dengan BBPOM lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus terkait sarana produksi pangan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaian yaitu melalui proses klarifikasi dengan pelaku usaha dan diskusi dengan direktorat pengampu di Badan POM. Selain itu terdapat penyesuaian

target di periode Januari-Juli sehingga mempengaruhi capaian tahunan secara keseluruhan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dan capaian pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada tahun 2025 dapat tercapai walaupun terdapat penyesuaian target menjadi lebih tinggi namun tetap mendapat capaian dengan kategori Sangat Baik. Hal ini merupakan hasil koordinasi dan monitoring yang efektif sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Tabel 3. 32 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuanr	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	Telah sesuai rencana	31 Des 2025	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Strategi/ Inovasi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Adanya inovasi Roti Buaia yang merupakan inovasi untuk melakukan monitoring tindak lanjut yang dikirimkan oleh pelaku usaha, sehingga



pembuatan tindak lanjut dapat dilakukan monitoring.

2. Adanya pemantauan rutin terhadap pelaksanaan input SIPT oleh petugas yang ditunjuk untuk mencegah adanya keterlambatan pelaporan SIPT
3. Adanya review tindak lanjut secara berjenjang untuk memastikan bahwa tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan pedoman

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 33 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,44	105,98 %	219.393.000	219.289.371	99.95 %	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,06 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber



daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

1. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

   - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
   - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
   - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.



2. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
3. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
4. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	95,25	96,34	101,14	Sangat Baik	

Tahun 2025 merupakan tahun pertama adanya indikator ini. Pada awal tahun, target indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 95,52, namun berdasarkan hasil evaluasi capaian pada bulan Juli 2025, diperoleh realisasi indikator dengan nilai 94,46 sehingga target tidak tercapai (capaian 98.89%). Oleh karena itu, BBPOM Jakarta mengusulkan penurunan target sehingga diperoleh kesepakatan target dengan pihak pengampu IKU tersebut di Badan POM yaitu 95,25.

Pada tahun 2025, realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan sehingga masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 101,14%



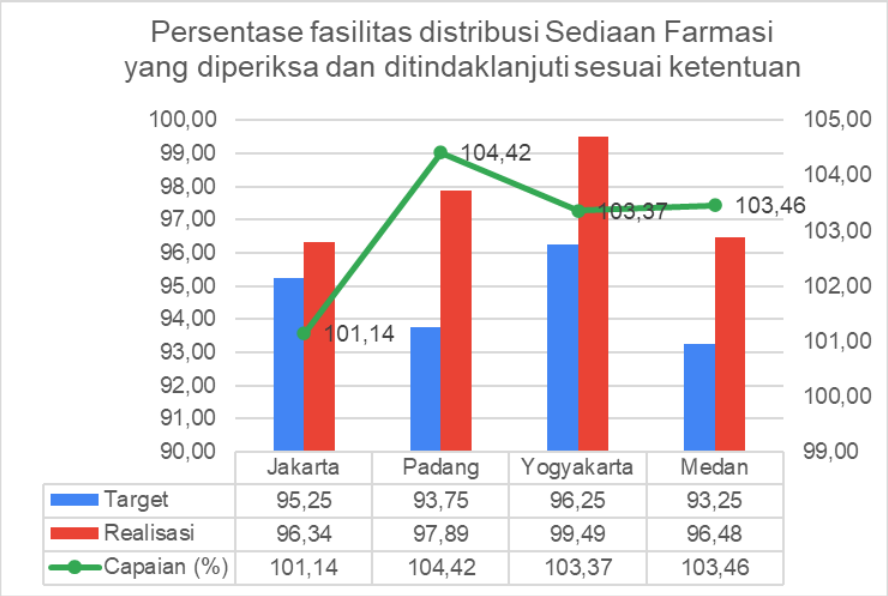
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25	99,50	96,34	-	101,14	96,82	Akan tercapai 

Realisasi indikator ini pada tahun 2025 telah mencapai target, namun tidak terlalu tinggi. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, yaitu 99,50, capaiannya menjadi 96,82. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kinerja guna mendorong peningkatan realisasi indikator ini yaitu dengan meningkatkan kepatuhan dan kesesuaian terhadap pedoman dan peraturan terkait pengawasan obat dan makanan

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	95,25	93,75	96,25	93,25
Realisasi	96,34	97,89	99,49	96,48
Capaian (%)	101,14	104,42	103,37	103,46

Berdasarkan data pada grafik tersebut, realisasi indikator BBPOM Jakarta merupakan yang paling rendah bila dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, Padang dan Medan. Demikian juga untuk capaian, BBPOM Jakarta memperoleh nilai yang paling rendah, namun hal ini tidak dapat dibandingkan mengingat target yang ditetapkan BBPOM Jakarta masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan BBPOM Padang dan Medan.

Pada tahun 2025, merujuk pada surat Sekretaris Utama Badan POM No. B-PR.06.02.2.01.25.06 tanggal perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian *Output* Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2025, target sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa meliputi PBF, Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah total 577 sarana untuk BBPOM Jakarta, 339 sarana untuk BBPOM Yogyakarta, 448 sarana untuk BBPOM di Padang dan 379 untuk BBPOM di Medan. Target BBPOM Jakarta didominasi oleh sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, yaitu sejumlah 339 sarana. Dengan target yang cukup banyak ini serta intensitas kasus yang cukup tinggi untuk PBF dan saryanfar di wilayah Jakarta, sehingga ditetapkan target 95,25 dengan mempertimbangkan *margin of error* karena penanganan kasus membutuhkan waktu yang lama untuk

penyelesaian yaitu melalui proses klarifikasi dengan pelaku usaha dan diskusi dengan direktorat pengampu di Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,34% yang diperoleh dari rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat (97,37%), % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam (93,31%), % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan (97,86%), %fasilitas distribusi Kosmetik (96,81%) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Aspek pendukung indikator masing-masing komoditi adalah sebagai berikut

1. Obat dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan dan Kesesuaian tindak lanjut. Komponen pemenuhan target pemeriksaan bertujuan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahun 2025 komponen ini memperoleh nilai 100%. Sedangkan komponen kesesuaian tindak lanjut ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan. Pada tahun 2025, komponen ini memperoleh nilai 97%.
2. Obat Bahan Alam dihitung dari rata-rata kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan pelaporan, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan kesesuaian serta ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana, demikian juga halnya dengan suplemen kesehatan sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:



Komoditi	Kesesuaian pelaksanaan	kelengkapan Laporan	Akurasi kesimpulan	ketepatan waktu TL
Obat Bahan Alam	100%	73.24%	100%	100%
Suplemen Kesehatan	100%	91.43%	100%	100%

3. Kosmetik dihitung berdasarkan rata-rata dari pelaksanaan inspeksi (100%), kelengkapan/ kualitas pelaporan (89,25%), akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (100%) dan kesesuaian serta ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan (98%)

Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. komitmen terhadap perencanaan yang telah disusun,
2. adanya proses review oleh supervisor independen untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan sanksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan
3. Penunjukan *person in charge* untuk memantau pencapaian indikator secara berkala

Berdasarkan data tersebut, nilai aspek yang paling tinggi menunjang pencapaian target adalah pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan yaitu 97.86%, secara berturut-turut diikuti dengan obat, kosmetik dan obat bahan alam. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan didominasi oleh sarana yang memenuhi ketentuan dibandingkan sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak diperlukan tindak lanjut, mudah disimpulkan dan dilaporkan. Faktor penyebab ketidaksesuaian adalah keterlambatan pelaporan dan tindak lanjut, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring secara ketat terkait dengan ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut.

Tabel 3. 36 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pemeriksaan sarana distribusi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan ketentuan	Telah sesuai rencana	31 Des 2025	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut kegiatan/ program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja:

1. Pengembangan kompetensi teknis petugas sesuai kalender pelatihan dari PPSDM meliputi pelatihan CDOB Junior dan Senior, Pelatihan Inspektur OBA SK. Dengan pengembangan kompetensi ini, dapat meningkatkan pengetahuan petugas dalam melaksanakan pengawasan dan menyusun tindak lanjut serta pelaporan sesuai dengan pedoman
2. Adanya inovasi SIDOEL (sistem/spreadsheet data online pemantauan sarana dan TL) yang berfungsi sebagai database hasil pengawasan



BBPOM di Jakarta sehingga mempermudah monitoring terhadap capaian Indikator Kinerja

3. Adanya inovasi ROTI BUAIA (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta) untuk memantau tindak lanjut yang dihasilkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.37 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25	96,34	101,14%	963.125.000	962.312.322	99.92%	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,01 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran telah sejalan dengan perencanaan target indikator dan dalam pelaksanaannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Namun demikian, dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a) Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

b) Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c) Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

   1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
   2. Ketepatan waktu pelaporan
   3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X 100%

  Keterangan:

  - Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
  - Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah



sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B: Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C: Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	91	92,85	102,03	Sangat Baik	

Pada tahun 2025, BBPOM Jakarta berhasil mencapai target indikator sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Target kinerja telah ditetapkan sebesar 91% dengan realisasi yang berhasil dicapai adalah 92,85% dan tingkat capaian kinerja mencapai 102,03%. Data realisasi tahun pertama penetapan IKU pada tahun 2025 merupakan baseline untuk realisasi tahun berikutnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dengan kategori “Sangat Baik”

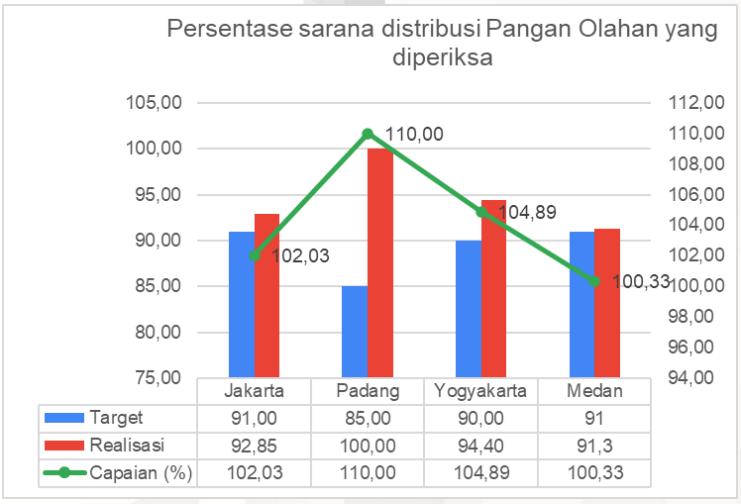
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	95,00	92,85	-	102,03	97,74	Akan tercapai

Berdasarkan Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target akhir periode Renstra yaitu tahun 2029 menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kinerja untuk mencapai target, capaian indikator 97,74%. Diperlukan upaya-upaya untuk mengawal pencapaian target ini. BBPOM Jakarta berkomitmen untuk mencapai target tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik diatas, realisasi indikator berturut-turut dari yang paling tinggi adalah Padang, Yogyakarta, Jakarta dan Medan. Target yang ditetapkan BBPOM Jakarta dan Medan paling tinggi bila dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Medan. Hal ini dikarenakan ada perubahan target yaitu dari 75 menjadi 91 untuk BBPOM Jakarta karena

berdasarkan realisasi bulan Juli, jauh melebihi target. Seluruh UPT berhasil mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini disusun dari beberapa faktor meliputi pemenuhan target yang diperiksa (20% dari total 20%), ketepatan tindak lanjut (65,06% dari 70%), ketepatan waktu pelaporan (7,79% dari 10%). Perlu dilakukan perbaikan terhadap ketepatan tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan.

Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. Komitmen terhadap perencanaan yang telah disusun,
2. Adanya proses review oleh supervisor independen untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan sanksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan
3. Penunjukan *person in charge* untuk memantau pencapaian indikator secara berkala

Tabel 3. 40 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pemeriksaan sarana distribusi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan ketentuan	Telah sesuai rencana	31 Desember 2026	T	-	-



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut kegiatan/ program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja:

1. Pelatihan Food Inspector Muda yang diselenggarakan oleh BBPOM Jakarta dengan bekerjasama dengan PPSDM dan direktorat pengawasan produksi pangan olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran pangan Olahan pada bulan Agustus 2025
2. Adanya inovasi SIDOEL (sistem/spreadsheet data online pemantauan sarana dan TL) yang berfungsi sebagai database hasil pengawasan BBPOM di Jakarta sehingga mempermudah monitoring terhadap capaian Indikator Kinerja
3. Adanya inovasi ROTI BUAIA (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta) untuk memantau tindak lanjut yang dihasilkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 41 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,85	102,03%	963.125.000	962.312.322	99.92%	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,02 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran telah sejalan dengan perencanaan target indikator dan dalam pelaksanaannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Namun demikian, dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak



efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a) Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

b) Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

c) Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

d) Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan



olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

e) Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

f) Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

g) Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

a. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan= a+b2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi Jumlah target iklan yang diawasi x100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b)/2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

b. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

1. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2



2. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
3. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

c. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
   c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

d. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
   c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

e. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
   a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%
   b. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%
   c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%



a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	94,80	99,12	104,56	Sangat Baik	

Nama Indikator	Persentase
% Iklan Obat	99,28%
% Iklan Kosmetik	100,00%
% Iklan OBA	99,84%
% Iklan SK	99,12%
% Iklan PO	97,37%
% Iklan SF dan PO	**99,12%**

Pada tahun 2025 realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan telah mencapai target dengan realisasi 99,12% dari target yang ditetapkan yaitu 94,80%, sehingga diperoleh capaian 104,56% (dengan kesimpulan Sangat Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

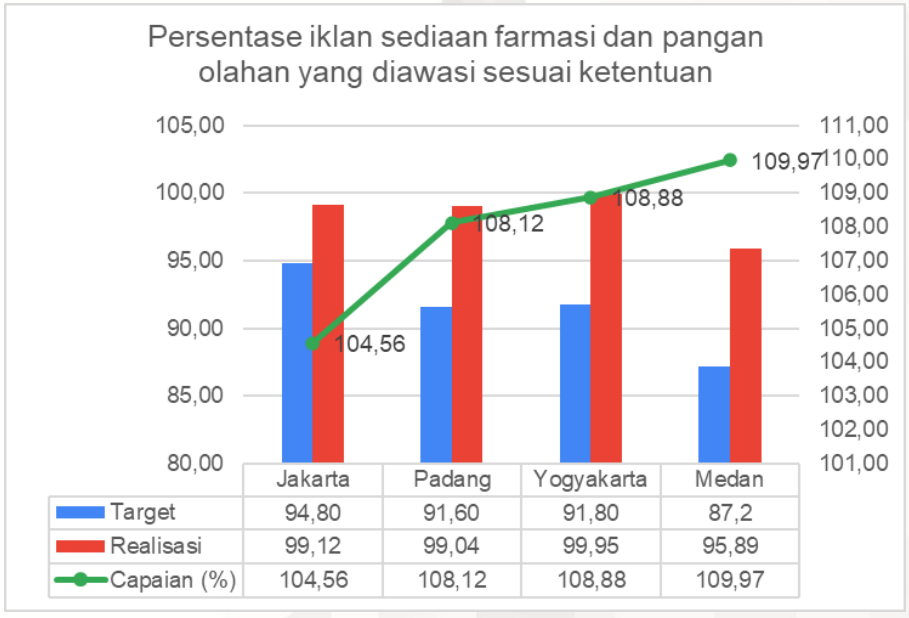
Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori



	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,80	98,00	99,12	-	104,56	101,14	Tercapai/ Melampaui 

Bila dibandingkan dengan target tahun 2025, untuk realisasi indikator tersebut tercapai 104,56% (Sangat baik), namun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu tahun 2029 dengan nilai 98,00% maka capaian pada tahun 2025 adalah 101,14% dengan kesimpulan Tercapai/ Melampaui. Diharapkan realisasi indikator IKU tsb untuk tahun-tahun setelah 2025 dapat memperoleh nilai yang konsisten. Hal ini dilakukan dengan senantiasa memantau realisasi setiap bulan dan triwulan serta melakukan evaluasi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Berdasarkan grafik tersebut, realisasi indikator berturut-turut dari yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan, Yogyakarta, Padang, dan Jakarta. Masing-masing Balai memperoleh realisasi yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Walaupun secara persentase BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi terendah dibanding ketiga Balai Besar lainnya (104,56%), namun target awal yang ditetapkan bagi BBPOM di Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan target dari Balai Besar lainnya, yaitu 94,80%. Selain itu,

hal ini menunjukkan adanya efektivitas kinerja dari pelaksanaan IKU evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, di mana realisasi tidak terlalu jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator ini disusun dari hasil pengawasan iklan beberapa komoditi yakni iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan. Pengawasan terhadap iklan dilakukan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran, dan dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu pelaporan masing-masing komoditi.

Keberhasilan pencapaian target indikator antara lain karena adanya komitmen dari *person in charge* dalam pelaksanaan kinerja sesuai tanggung jawab yang telah diberikan; evaluasi dari supervisor; dan evaluasi setiap triwulan terhadap pencapaian target.

Meskipun target indikator pada tahun 2025 tercapai dengan kategori Sangat Baik, untuk kedepannya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung dalam pelaksanaan evaluasi iklan per media, hal ini dibutuhkan agar pelaksanaan pengawasan iklan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta tercapai target yang konsisten.

Tabel 3. 44 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	Pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana	31 Des 2026	T	-	-



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut kegiatan/ program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja:

1. Pelatihan Evaluasi Iklan dan Penandaan masing-masing komoditi yang tersedia pada platform IDEAS.
2. Adanya *worksheet* yang disusun oleh masing-masing PIC pengawasan iklan yang berfungsi sebagai database dan form evaluasi pengawasan iklan, serta dalam pemantauan pencapaian target indikator.
3. Komitmen dari masing-masing PIC pengawasan iklan dan kerjasama tim Kelompok Substansi dalam memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki untuk pemenuhan target pengawasan iklan untuk seluruh jenis media.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 45 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,8	99,12	104,56%	963.125.000	962.312.322	99.92 %	**1,05**	**0,05**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,05 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran "Efisien". Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran telah sejalan dengan perencanaan target indikator dan dalam pelaksanaannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Namun demikian, dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.



g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang diperoleh dari kegiatan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan efektivitas pengawasan. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan indikator terkait pada periode selanjutnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan sarana distribusi dan produksi sesuai masing-masing komoditi.
3. Informasi kinerja pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja instansi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

12. PERSENTASE LABEL TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

a) Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b) Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c) Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).



d) Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e) Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f) Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Persentase label tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = (A+B)/2.

Keterangan:

a. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
b. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100% .

Keterangan:



- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	85	92,27	108,55%	Sangat Baik	

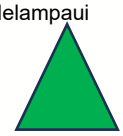
Pada tahun 2025 BBPOM di Jakarta telah mencapai target dengan realisasi 92,27% dari target yang ditetapkan yaitu 85%, sehingga diperoleh capaian 108,55% (dengan kesimpulan Sangat Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat



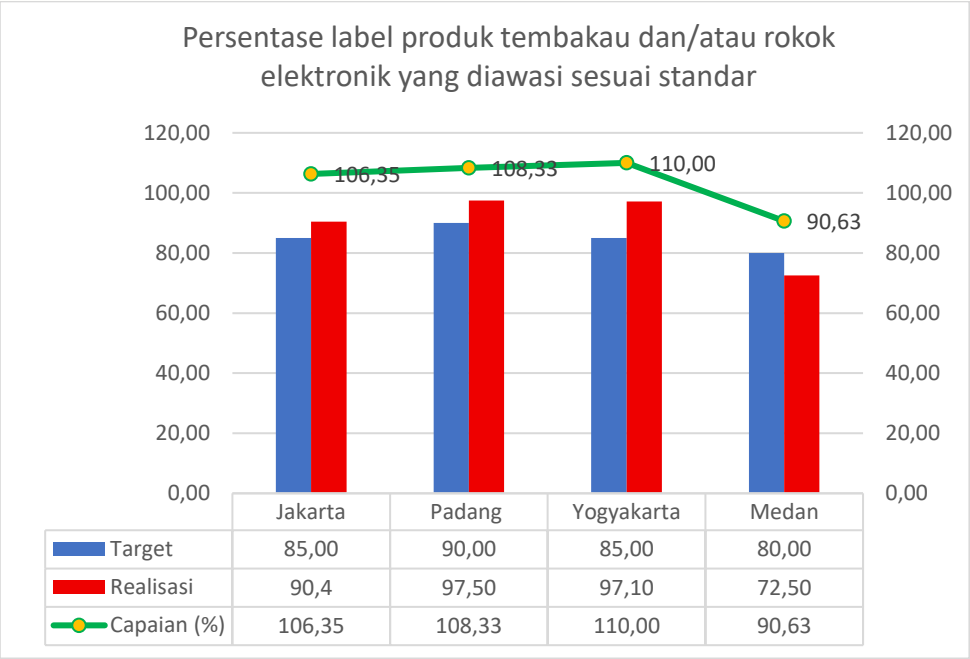
dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	89,00	90,4	-	106,35	101,57	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target akhir periode Renstra yaitu tahun 2029 menunjukkan bahwa capaian indikator tahun 2025 telah melampaui target, capaian indikator 101,57%. Namun BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk mengawal pencapaian target ini hingga akhir tahun periode Renstra yaitu tahun 2029.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	85,00	90,00	85,00	80,00
Realisasi	90,4	97,50	97,10	72,50
Capaian (%)	106,35	108,33	110,00	90,63

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator berturut-turut dari yang paling tinggi adalah Yogyakarta, Padang, Jakarta dan Medan. Target yang ditetapkan Padang paling tinggi bila dibandingkan dengan Jakarta, Yogyakarta dan Medan. Sedangkan untuk realisasi capaian, Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Medan meskipun target Jakarta ditetapkan lebih tinggi dari target Medan. Terdapat perubahan komponen penilaian indikator kinerja di tahun 2025 yaitu persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label dan persentase ketepatan waktu pelaporan label. BBPOM Jakarta menetapkan target 85 sebagai baseline di tahun 2025 berdasarkan realisasi pada tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. Komitmen terhadap perencanaan yang telah disusun,



2. Adanya proses review oleh supervisor independen untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengawasan penandaan label, kesimpulan hasil pemeriksaan serta pemenuhan *timeline* pelaporan
3. Penunjukan *person in charge* untuk memantau pencapaian indikator secara berkala

Tabel 3. 48 Matriks Rekomendasi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	Melaksanakan pengawasan sesuai perencanaan awal	Pelaksanaan pengawasan telah sesuai rencana yang disusun	31 Des 2026	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut kegiatan/ program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja:

1. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Produk Tembakau Tahun 2025 pada tanggal 13 November 2025.
2. Adanya komunikasi aktif antara petugas pengawas penandaan label produk tembakau dengan petugas person in charge KMEI yang dilakukan setiap bulan.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.49 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	90,4	106,35%	1.356.864.000	962.312.322	99.99 %	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,06 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran telah sejalan dengan perencanaan target indikator dan dalam pelaksanaannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Namun demikian, dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang diperoleh dari kegiatan pengawasan penandaan label produk tembakau dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan



efektivitas pengawasan. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain:

1. **Evaluasi Efektivitas Pengawasan**

   Data hasil pengawasan, seperti tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan label (peringatan kesehatan, kandungan, dan informasi lainnya), digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan.

2. **Perbaikan Perencanaan dan Strategi Pengawasan**

   Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area, jenis produk, atau pelaku usaha yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi, sehingga pengawasan selanjutnya dapat difokuskan secara lebih tepat sasaran dan berbasis risiko.

3. **Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja**

   Informasi kinerja pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja instansi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penandaan label produk tembakau kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta

a) Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) : Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.



b) Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) 2) Pelaksanaan Bimtek (B) 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4) Pelaksanaan Publikasi (D) Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara: 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik. 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

c) (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT. 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter Formula: Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025



Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	100	103,41	103,41	Sangat Baik	

Analisa matriks capaian IKU diatas adalah pada tahun 2025 BBPOM di Jakarta telah mencapai target IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta realisasi 103,41 dari target yang ditetapkan yaitu 100 dengan capaian 103,41% kesimpulan IKU tersebut adalah “Sangat Baik”.

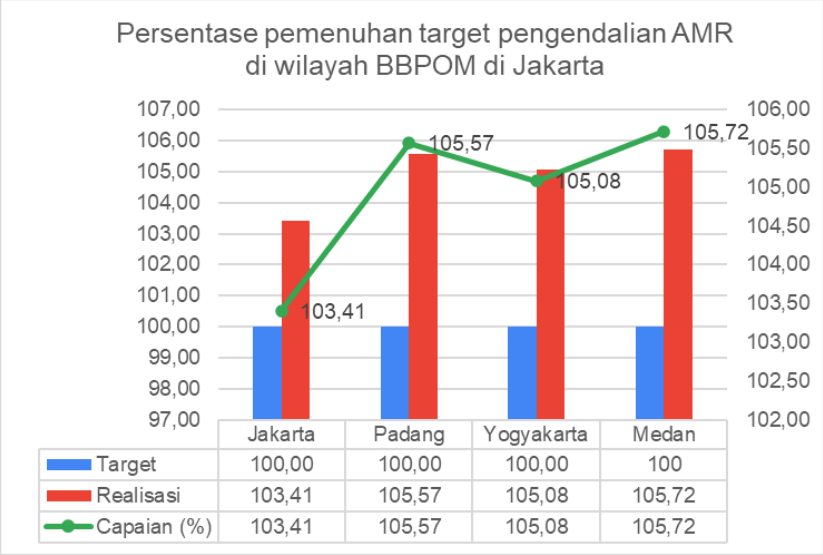
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	100	100	103,41	-	103,41	103,41	Tercapai/ Melampaui

Analisa pada matriks diatas adalah Berdasarkan Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target akhir periode Renstra yaitu tahun 2029 menunjukkan bahwa capaian indikator tahun 2025 telah melampaui target, capaian indikator 103,41%. Namun BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk mengawal pencapaian target ini hingga akhir tahun periode Renstra yaitu tahun 2029.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Analisa grafik diatas adalah berdasarkan grafik diatas, realisasi indikator berturut-turut dari yang paling tinggi adalah Medan, Padang, Yogyakarta, dan Jakarta. Sedangkan untuk realisasi capaian, Jakarta masih lebih rendah dibandingkan UPT lain hal ini dikarenakan terdapat kendala pada pembahasan peraturan sudah lebih dari satu tahun, namun pencanangan program AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum bisa dilakukan karena perda belum terbit. Program AMR masih dilakukan secara parsial di masing-masing pengampu, namun pelaksanaan program tersebut tidak komprehensif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3. 52 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Tim eline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	Pembahasan peraturan sudah lebih dari satu tahun, namun pencanangan program AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum bisa dilakukan karena perda belum terbit. Program AMR masih dilakukan secara parsial di masing-masing pengampu, namun pelaksanaan program tersebut tidak komprehensif	Melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala DInas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tang salah satu pasalnya menyebutkan salah satu pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jajarta, setelah Perda keluar dibuatkan surat ederan yang vberlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih menyukseskan program pengendalian AMR	Melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala DInas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tang salah satu pasalnya menyebutkan salah satu pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jajarta, setelah Perda keluar dibuatkan surat ederan yang berlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih menyukseskan program pengendalian AMR	31 Des 2026	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu pelaksanaan program AMR secara parsial di masing-masing pengampu dan melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus



Jakarta, serta surat edaran yang berlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih mensukseskan program pengendalian AMR.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.53 *Nilai Tingkat Efisiensi*

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	100	103,41	103,41 %	963.125.000	962.312.322	99.92 %	**1.03**	**0.03**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,03 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran telah sejalan dengan perencanaan target indikator dan dalam pelaksanaannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pencapaian target.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

Evaluasi kinerja UPT dan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait tindak dalam melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala DInas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang salah satu pasalnya menyebutkan salah satu pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jajarta, setelah Perda keluar dibuatkan surat ederan yang berlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih menyukseskan program pengendalian AMR.



14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

Laboratorium BBPOM di Jakarta merupakan salah satu laboratorium BPOM yang harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Indikator penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium (SKL). Standar kemampuan laboratorium adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM nomor 161 tahun 2025 tentang Standar kemampuan laboratorium unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM. Standar kemampuan laboratorium merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM untuk:

i. Melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
ii. Melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
iii. Melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
iv. Melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium



Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Laboratorium regional mengkoordinasikan laboratorium UPT dalam satu regional maupun unit kerja terkait dan melakukan pengujian tingkat 4. Laboratorium anggota merupakan UPT yang terdiri dari BB/BPOM yang melakukan pengujian tingkat 3, BPOM di Kabupaten/Kota yang melakukan pengujian tingkat 2 serta LOKA POM yang melakukan pengujian tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Laboratorium Tingkat 4

  Laboratorium tingkat 4 merupakan laboratorium regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Laboratorium Tingkat 3

  Laboratorium tingkat 3 merupakan laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi. Sebanyak 27 Balai Besar dan Balai POM yang bekerja di tingkat provinsi melakukan pengujian dasar kimia, mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan laboratorium tingkat 3 dibawah koordinasi laboratorium balai regional Semarang bersama dengan 8 UPT lain yaitu, BBPOM di Serang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, BPOM di Bogor, BPOM di Tangerang, BPOM di Banyumas, BPOM di Tasikmalaya dan BPOM di Surakarta.

- Laboratorium Tingkat 2

  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;



- Laboratorium Tingkat 1

  Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota. Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

  Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31% x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

(50% x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) /2
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.



d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

(50 x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 (75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota=(nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

(75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.



a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	82	88,3	107,68	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi nilai SKL pada tahun 2025 adalah 88,3 sedangkan target tahun 2025 sebesar 82 maka capaiannya sebesar 107,68 dan termasuk kategori sangat baik.

Capaian nilai SKL tersebut diperoleh dari:

- Persentase pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 85,5

  Nilai pemenuhan standar ruang lingkup merupakan rata-rata hasil pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium kimia dan mikrobiologi. Persentase pemenuhan standar ruang lingkup pengujian kimia obat; kosmetik; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; pangan dan mikrobiologi berturut-turut sebesar 80,0; 94,2; 91,6; 58,4 dan 89,9. Berdasarkan hasil pemenuhan nilai standar ruang lingkup tersebut, laboratorium Pangan memiliki nilai pemenuhan standar ruang lingkup paling rendah diantara laboratorium lain. Laboratorium Pangan harus menentukan strategi pencapaian dengan monitoring yang ketat agar nilai standar ruang lingkupnya dapat meningkat dan sejajar dengan laboratorium lain.
- Persentase pemenuhan standar peralatan sebesar 88,9

  Persentase pemenuhan standar peralatan diperoleh dari nilai rata-rata pemenuhan standar peralatan kimia dan mikrobiologi. Persentase pemenuhan standar peralatan kimia sebesar 91,1 sedangkan persentase pemenuhan standar peralatan biologi adalah 86,6. Standar peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi mengalami peningkatan karena pada tahun 2025 diadakan

penambahan 2 alat kimia dan 3 alat biologi. Alat - alat yang diadakan dalam rangka pemenuhan standar peralatan adalah microwave digester dan timbangan mikro untuk laboratorium kimia, sedangkan untuk laboratorium mikrobiologi diadakan alat inkubator, stomacher dan UV *lamp*. Penambahan peralatan ini selain dapat meningkatkan nilai pemenuhan standar peralatan juga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengujian.

- Persentase pemenuhan MA terverifikasi sebesar 78,4

  Persentase pemenuhan MA terverifikasi dihitung seperti halnya pemenuhan standar ruang lingkup, yaitu diambil dari rata-rata persentase pemenuhan MA terverifikasi dari seluruh laboratorium. Persentase pemenuhan MA terverifikasi laboratorium kimia obat; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; kosmetik, pangan dan mikrobiologi sebesar 60,2; 101,2; 81,6; 60,4 dan 88,7.

- Persentase standar kompetensi laboratorium sebesar 100

  Hasil pemenuhan standar kompetensi laboratorium merupakan penjumlahan dari kompetensi seluruh laboratorium, baik aspek 1 maupun aspek 2. Pemenuhan standar kompetensi laboratorium adalah penggabungan dari nilai kompetensi seluruh laboratorium. Pada tahun 2025 ini seluruh laboratorium dapat mencapai nilai maksimal untuk aspek 1 dan aspek 2. Seluruh laboratorium telah mampu melakukan pengujian terhadap seluruh parameter uji yang ada dalam ruanglingkupnya dengan minimal dua orang yang mampu melakukan pengujian. Capaian ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menyediakan SDM untuk melakukan pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kontribusi terbesar dalam pencapaian nilai SKL berasal dari faktor kompetensi laboratorium. Capaian ini harus dapat dipertahankan pada periode berikutnya agar tidak terjadi penurunan nilai SKL. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kompetensi laboratorium adalah dengan meningkatkan kompetensi penguji yang belum dapat melaksanakan pengujian.



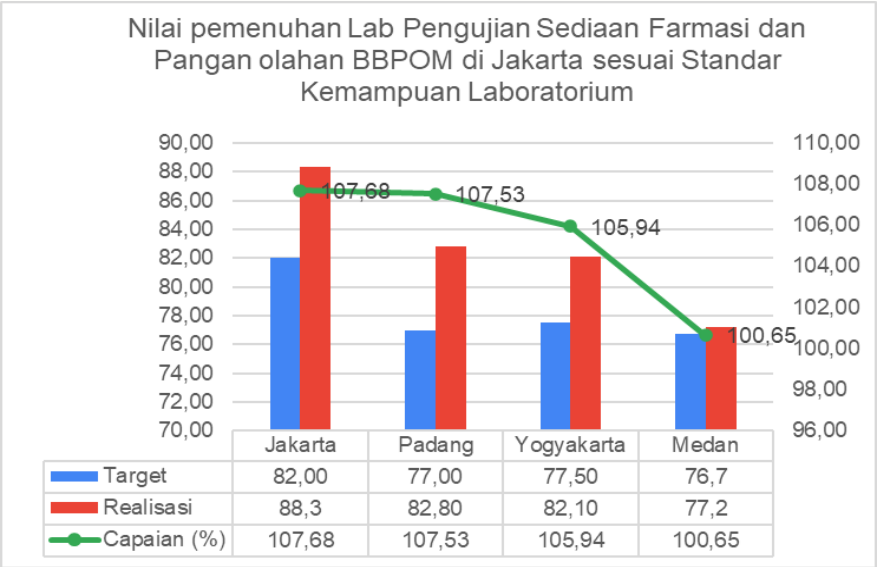
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	82,00	90,00	88,3	-	107,68	98,11	Akan tercapai 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi nilai SKL pada tahun 2025 adalah 88,3 dengan target 82 maka capaiannya 107,68 dan termasuk tercapai. Sedangkan nilai SKL tahun 2025 jika dibandingkan dengan nilai target tahun 2029 sebesar 90 maka capaiannya sebesar 98,11 dan termasuk kategori akan tercapai. Hal ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029 dengan melakukan berbagai langkah strategis. Strategi yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kompetensi, pengadaan alat dan melakukan verifikasi metode analisis. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara ketat dan komprehensif merupakan bagian penting yang harus konsisten dilakukan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Target dan capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium paling tinggi diantara UPT lain yang ada dalam klaster 3, yaitu BBPOM di Padang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Medan. Perbandingan UPT pada klaster 3 kurang relevan untuk BBPOM di Medan, karena BBPOM di Medan termasuk laboratorium tier 4 yang memiliki standar penilaian berbeda dengan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang dan BBPOM di Yogyakarta yang berada pada tier yang sama, yaitu tier 3. Namun demikian, perbandingan target dan pencapaian BBPOM di Jakarta terhadap laboratorium tier 3 lainnya masih berada pada posisi yang paling besar target dan pencapaiannya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa BBPOM di Jakarta memiliki komitmen yang baik dalam penyelenggaraan tata kelola laboratorium.

Penyediaan sumberdaya untuk melakukan verifikasi metode analisis, pengembangan kompetensi, dan pemenuhan peralatan menghasilkan nilai pemenuhan standar kemampuan laboratorium melebihi target yang telah ditetapkan. Konsistensi menjaga unsur penilaian standar kemampuan laboratorium diperlukan agar pencapaian pada masa mendatang dapat dipertahankan bahkan dapat menjadi lebih baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium didukung oleh beberapa hal, antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar ruang lingkup, standar metode analisis terverifikasi, standar kompetensi laboratorium dan standar peralatan secara ketat
2. Pelaksanaan verifikasi metode analisis untuk memenuhi standar ruang lingkup dan standar metode analisis terverifikasi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 47 verifikasi metode analisis untuk pemenuhan nilai standar ruang lingkup dan 57 verifikasi metode analisis untuk meningkatkan nilai standar metode analisis terverifikasi
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan standar kompetensi laboratorium. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan penugasan pengujian.
4. Pelaksanaan verifikasi metode analisis untuk penambahan standar ruang lingkup dilakukan minimal oleh 2 orang penguji. Sehingga nilai pemenuhan kompetensi aspek 1 dan aspek 2 dapat tercapai 100%.
5. Pengadaan alat laboratorium pada tahun 2025. Alat yang diadakan pada tahun 2025 yang mendukung pemenuhan standar peralatan laboratorium adalah microwave digester, timbangan mikro, inkubator, stomacher, dan UV lamp.

Capaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dipertahankan dengan mempertahankan nilai standar kompetensi laboratorium dan standar peralatan. Nilai kompetensi laboratorium memberikan sumbangan penilaian besar dibandingkan dengan unsur yang lain. Pemeliharaan alat laboratorium melalui preventive maintenance dapat menjadi bagian yang dapat dilakukan untuk mempertahankan nilai standar peralatan. Kerusakan alat menjadi faktor yang tidak dapat diprediksi sehingga penyediaan anggaran untuk perbaikan



alat, preventive maintenance dan suku cadang menjadi hal yang sangat penting.

Peningkatan capaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi metode analisis, peningkatan kompetensi dan pengadaan alat laboratorium. Verifikasi metode analisis dilakukan terhadap parameter uji yang standar ruang lingkup dan standar verifikasi metode analisisnya belum tercapai. Peningkatan kompetensi dilakukan terhadap penguji yang belum memiliki kemampuan uji. Alat yang diadakan diutamakan untuk memenuhi standar peralatan.

Tabel 3. 56 *Matriks Rekomendasi*

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	Tidak ada kendala	Dilakukan verifikasi metode analisis terhadap parameter uji yang nilai standar ruang lingkupnya masih nol	Penetapan target tahun 2026 mempertimbangkan capain TW 4 tahun 2025, dengan strategi pemenuhan melalui verifikasi metode analisis	31 Des 2026	Y	O-10 KK-2	Pemenuhan target Standar Ruang Lingkup Obat tidak tercapai Personel uji terpapar virus/bakteri, reagen/bahan kimia
			Verifikasi metode analisis dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang agar pemenuhan kompetensi aspek 1 dan aspek 2 terpenuhi	Mempertahankan pengujian minimal dapat dilakukan oleh 2 orang	31 Des 2026	Y	KK-2	Personel uji terpapar virus/bakteri, reagen/bahan kimia
			Dilakukan pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi	Pengadaan alat laboratorium dan pemeliharaan alat agar	31 Des 2026	Y	A-1	Peralatan Laboratorium ber TKDN yang dibeli kualitasny



No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			standar peralatan	kondisinya senantiasa baik serta			K-2	a tidak sebaik peralatan laboratorium impor Pemblokiran Mandiri dalam rangka efisiensi anggaran APBN
			Dilakukan pelatihan internal untuk meningkatkan komeptensi	Peningkatan kompetensi penguji	31 Des 2026	Y	SDM-02	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak terlaksana sesuai perencanaan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan internal, mengikuti pelatihan eksternal atau pelatihan terpadu yang dilaksanakan oleh PPPOMN untuk meningkatkan standar ruang lingkup, standar metode analisis terverifikasi dan standar kompetensi laboratorium.
2. Melakukan verifikasi metode analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan verifikasi metode analisis ini dapat meningkatkan nilai standar metode analisis terverifikasi. Pelaksanaan verifikasi metode analisis untuk parameter yang belum ada



dalam standar ruang lingkup juga dapat berdampak pada peningkatan nilai standar ruang lingkup.

3. Mengidentifikasi personel penguji yang belum mampu melakukan pengujian untuk parameter uji tertentu agar dapat ditingkatkan kompetensinya sehingga apabila ada mutasi pegawai maka standar kompetensi laboratorium tidak terganggu, terutama pada parameter uji yang hanya mampu dilakukan oleh dua orang dalam laboratorium.
4. Verifikasi metode analisis dilakukan oleh minimal dua orang, agar kompetensi laboratorium selalu terjaga
5. Peningkatan persentase pemenuhan standar peralatan dilakukan dengan perencanaan pengadaan alat laboratorium, akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya
6. Dilaksanakan pemeliharaan alat, monitoring alat dan penggantian suku cadang secara berkala untuk menjaga agar peralatan senantiasa dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk pengujian.
7. Program kalibrasi alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun maupun 3 tahun untuk alat tertentu bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Internasional dan untuk memastikan kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Kegiatan kalibrasi alat dilakukan secara insitu maupun eksitu. Kalibrasi dilakukan oleh PPPOMN dan pihak ke tiga
8. Mengidentifikasi alat-alat laboratorium untuk diremajakan agar sesuai kebutuhan dengan perkembangan terkini. Perencanaan pengadaan alat mengacu pada standar peralatan yang telah ditetapkan
9. Pengadaan suku cadang, reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, alat gelas, bahan penunjang pengujian, perlengkapan



keselamatan kerja, test kit, gas, media ed pendek, bimbingan teknis, dan koordinasi teknis pengujian

10. Berperan sebagai provider uji banding antar laboratorium dalam mengatasi kendala keterbatasan penyelenggara uji profisiensi sebagai penjaminan mutu eksternal pengujian
11. Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian sekaligus sebagai unjuk kerja eksternal dalam penjaminan mutu hasil pengujian.
12. Melakukan reakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk mempertahankan status akreditasi laboratorium.
13. Melakukan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran merupakan salah satu sumberdaya yang mendukung pencapaian kinerja target indikator kinerja. Tabel berikut merupakan analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025.

Tabel 3. 57 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82	88,3	107,68%	6.234.767.453	6.233.767.453	99,99%	**1,08**	**0,08**	**100%**	Efisien



Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,08 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Pada tahun 2025, penggunaan anggaran telah disesuaikan untuk peningkatan capaian kinerja seperti pengadaan alat, suku cadang, kalibrasi, pemeliharaan alat, reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, alat gelas, bahan penunjang pengujian, perlengkapan keselamatan kerja, test kit, gas, media ED pendek, bimbingan teknis, dan koordinasi teknis pengujian.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium
2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Definisi IKSK :

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:



a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
   a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
   b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

   Cara Perhitungan dan Formulasi:
   a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
   b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
   c. Jumlah target dihitung secara kumulatif
   d. Formula Perhitungan:

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	16,67	16,67	100	Baik	

Realisasi persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar 16,67%, yaitu 1 dari 6 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berhasil didampingi dengan mengisi *tools* secara lengkap dan nilai ≥60. Pada tahun 2025, BBPOM di Jakarta telah melakukan advokasi kepada seluruh kabupaten/ kota terkait pelaksanaan penialian kabupaten/ kota



pangan aman. Kemudian dilakukan seleksi, pendampingan, dan pengawalan dalam pengisian *tools* kabupaten/ kota pangan aman. Capaian kinerja dipeoleh sebesar 100.00% dengan kategori Baik karena sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pendampingan dan pengawalan, 6 kabupaten/kota seluruhnya mengirimkan *tools* penilaian dengan hasil Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil memperoleh terbaik kelima dalam penilaian hasil verifikasi dokumen >60 dari tiap regional. Selain itu, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara berhasil memperoleh nilai verifikasi >60. Sehingga pada masa mendatang diperlukan upaya peningkatan koordinasi dalam pendampingan pengisian *tools* penilaian mandiri.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

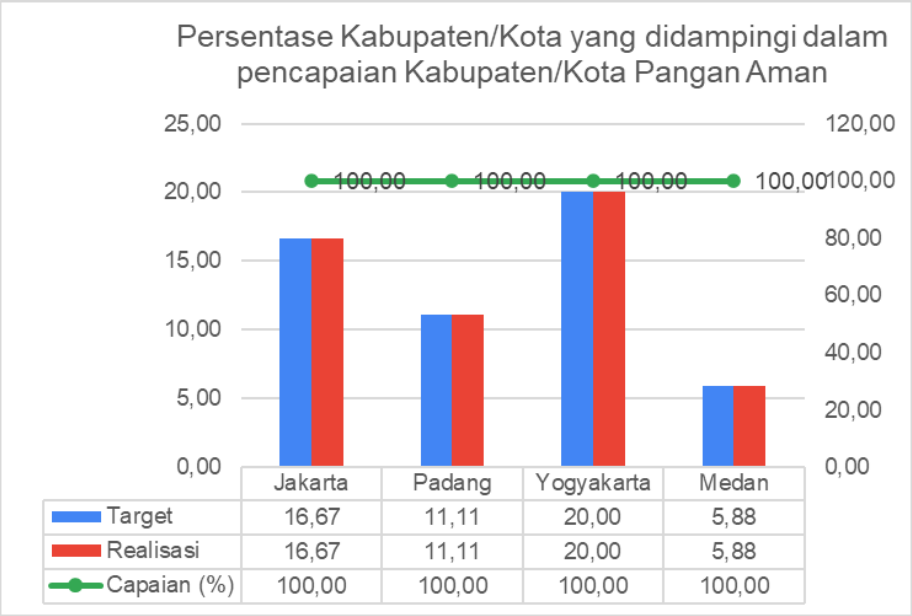
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	83,33	16,67	-	100	20,00	Akan tercapai di tahun 2029 dikarenakan target kumulatif di tahun 2029

Realisasi persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 diperoleh sebesar 16.67%, yaitu 1 dari 6 total keseluruhan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah berhasil didampingi hingga diperoleh nilai verifikasi dokumen >60. Pada tahun 2029, ditargetkan sebesar 83,3%, yaitu sebanyak 5 dari 6 kabupaten/kota sudah berhasil didampingi dalam pencapaian

Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dengan realisasi tahun 2025 ini diperoleh capaian sebesar 20.00% jika dibandingkan dengan target akhir kumulatif jangka menengah tahun 2029. Capaian ini optimis akan dicapai karena melihat tren capaian tahun 2025 telah terdapat 3 kabupaten/kota (50.00%) yang berhasil memperoleh penilaian >60, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Oleh karena itu, target kumulatif tahun 2029 akan tercapai dengan upaya berkelanjutan dalam peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait dalam pendampingan pengisian tools mandiri penilaian kabupaten/kota pangan aman.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	16,67	11,11	20,00	5,88
Realisasi	16,67	11,11	20,00	5,88
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja antar UPT BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan, semuanya telah memperoleh capaian kinerja sebesar 100.00%, kategori Baik, karena realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian kinerja antara lain:

1) Program pendampingan pengisian tools penilaian mandiri secara intensif, sehingga partisipasi OPD terkait dapat optimal dan berdampak positif pada kelengkapan data dukung dan ketepatan waktu pengisian.
2) Intensifikasi koordinasi pemerintah daerah dan lintas OPD di berbagai wilayah, terutama terhadap key person dari masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemahaman tim koordinasi lintas sektor dalam pengisian tools secara mandiri.

Tabel 3. 60 Matriks Rekomendasi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kab/Kota belum optimal dalam mengisi tools penilaian mandiri Kab/Kota Pangan Aman secara lengkap yang mencakup seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi sesuai ketentuan, antara lain disebabkan :	Pada awal tahun 2026 akan dilakukan kembali advokasi dan koordinasi kepada Pemkab/Pemkot Administrasi di DKI Jakarta terkait pelaksanaan penilaian Kab/Kota Pangan Aman dengan fokus terhadap :	Melanjutkan kegiatan Pendampingan terhadap seluruh Kab/Kota Administrasi dalam rangka Penilaian Kab/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai target yang ditetapkan.	31 Des 2026	Y	O-18	Ketidaklengkapan atau tidak tersedianya data dukung Kota/Kabupaten sesuai kriteria penilaian Kota/Kabupaten Pangan Aman



No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		- Pihak Pemkot / Pemkab tidak menetapkan personil khusus atau penanggung jawab (PJ) dari masing-masing OPD pengampu	- Aktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/Kota Administrasi					
		- Kurangnya monitoring oleh Pemkot / Pemkab dalam pengisian tools	- Monitoring dan Evaluasi rutin berkala terhadap pelaksanaan penilaian mandiri tahun 2025 di masing-masing Kab/Kota Administrasi					
		- OPD pengampu tidak memiliki data dukung atau tidak tertib dalam menyimpan dokumen yang dibutuhkan sesuai parameter yang ditetapkan	- Tertib dokumentasi pelaksanaan kegiatan oleh OPD terkai					
		- Jadwal kegiatan di OPD pengampu yang padat berbarengan dengan jadwal pengisian tools penilaian mandiri	- Perencanaan pengisian tools dengan baik					

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		- PJ Pemkot / Pemkab tidak memahami tools penilaian	- PJ secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim pendamping Balai					

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pendukung tercapainya kinerja antara lain adalah pertemuan rutin dengan tim koordinasi yang terdiri atas pemerintah daerah dan OPD terkait dalam proses pendampingan pengisian *tools* dan pemanfaatan media komunikasi daring untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi dalam pengisian *tools* dan pengumpulan data dukung

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 61 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100%	699.296.000	699.242.730	99.99 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan capaian kinerja telah sesuai dengan sumber daya anggaran yang dialokasikan. Untuk mempertahankan tingkat efisiensi ke depannya dapat dilakukan upaya konsistensi dalam pendampingan kabupaten/kota pangan aman.



g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan

   Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan pendampingan capaian kabupaten/kota pangan aman dengan intensifikasi koordinasi dalam pengisian *tools* dan pengumpulan data dukung dalam rangka mengurangi *gap* penilaian mandiri dan hasil verifikasi di akhir periode penilaian.

2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

   Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja

   Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya

   Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.



Sasaran Kegiatan 02

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku

2) Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

3) Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

4) Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:



1. Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025 yang memiliki nomor izin edar.
3. Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	64	64,29	100,45	Sangat Baik	

Sampai dengan akhir tahun 2025, target indikator sarana persentase fasilitas produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 100,45% sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra

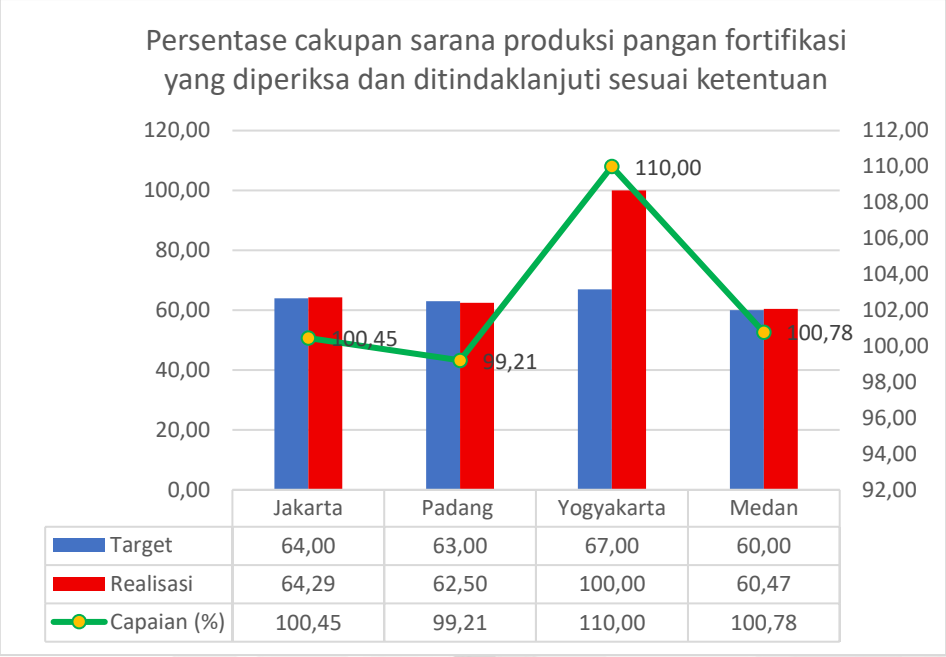
Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2029

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	79,00	64,29	-	100.45 %	81,38%	Akan tercapai 



Berdasarkan tabel 3.60 Realisasi kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 belum melampaui target di tahun 2029 (79%) dengan capaian 81,38%. Bila dibandingkan dengan nilai persentase realisasi yang sama (64,29%) dan target tahun 2029 (79%), nilai persentase capaian menjadi 81,38%. Nilai ini mengalami penurunan namun masih masuk dalam kategori "Akan tercapai". Hal ini disebabkan oleh jumlah sarana produksi pangan fortifikasi periode 2025 baru sejumlah 18 sarana sedangkan pertumbuhan sarana produksi pangan fortifikasi diproyeksikan tumbuh 15% sampai dengan periode 2029.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	64,00	63,00	67,00	60,00
Realisasi	64,29	62,50	100,00	60,47
Capaian (%)	100,45	99,21	110,00	100,78

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, Persentase realisasi BBPOM Jakarta berada pada urutan

kedua jika dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta, Padan dan Medan. Namun persentase realisasi telah melampaui target tahun 2025. Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 untuk BBPOM di Jakarta sebesar 100,45% (kriteria tercapai/terlampaui), BBPOM di Padang sebesar 99,21% (akan tercapai), BBPOM di Yogyakarta sebesar 110,00% (kriteria tercapai/terlampaui) dan BBPOM di Medan sebesar 100,78% (kriteria tercapai/terlampaui).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi dan capaian pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada tahun 2025 dapat tercapai walaupun terdapat penyesuaian target menjadi lebih tinggi namun tetap mendapat capaian dengan kategori Sangat Baik. Hal ini merupakan hasil koordinasi dan monitoring yang efektif sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	Pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana	31 Des 2026	T	-	-



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Strategi/ Inovasi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Adanya inovasi Roti Buaia yang merupakan inovasi untuk melakukan monitoring tindak lanjut yang dikirimkan oleh pelaku usaha, sehingga pembuatan tindak lanjut dapat dilakukan monitoring.
2. Adanya pemantauan rutin terhadap pelaksanaan input SIPT oleh petugas yang ditunjuk untuk mencegah adanya keterlambatan pelaporan SIPT
3. Adanya review tindak lanjut secara berjenjang untuk memastikan bahwa tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan pedoman

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 63 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	64,29	100,45 %	13.680.000	13.645.463	99,75 %	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,01 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,01 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja.

Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan



anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk:

1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Sasaran Kegiatan 03

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

1) Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan



audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

2) Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

3) Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
   1. Sumber atau Narasumber KIE
   2. Konten atau Informasi KIE
   3. Pemahaman Audiens KIE
   4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

4) Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

a) Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

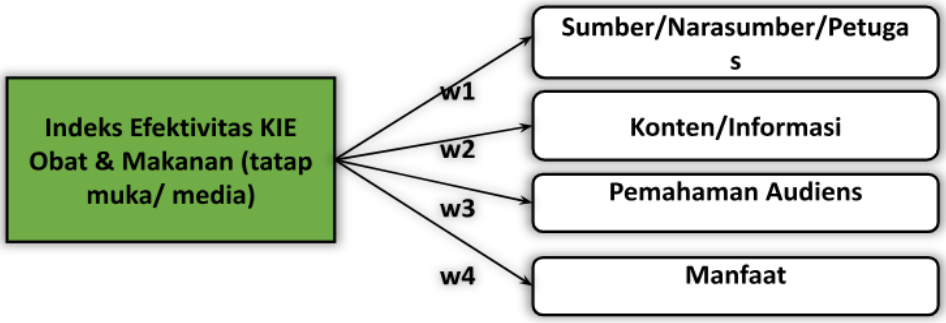
b) Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:





Gambar 3. 1 Indeks Efektivitas KIE Obat & Makanan (tatap muka/media)

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+ s(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	87,06	87,47	100,47	Sangat Baik	

Pada tahun 2025, target Tingkat Efektivitas KIE ditetapkan sebesar 87,06. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 87,47, sehingga menghasilkan capaian kinerja 100,47% dan berada pada kategori sangat baik dengan interprestasi

efektifitas adalah Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE BBPOM Jakarta mampu melampaui target yang telah direncanakan.

Selisih positif antara realisasi dan target mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja telah disusun secara realistis dan didukung oleh implementasi program KIE yang efektif. Capaian tersebut juga mengindikasikan adanya kesesuaian antara strategi, metode, serta sasaran KIE dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, sehingga pesan edukasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara optimal.

Dengan capaian kinerja di atas 100%, dapat disimpulkan bahwa kinerja Tingkat Efektivitas KIE pada tahun 2025 berjalan secara optimal dan akuntabel. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan KIE ke depan, sekaligus mendorong penguatan strategi agar dampak edukasi keamanan obat dan makanan dapat semakin luas dan berkelanjutan

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,7	87,06	96,73	87,47	100,03	100,47

Berdasarkan data kinerja indikator Tingkat Efektivitas KIE, terlihat bahwa pelaksanaan KIE BBPOM Jakarta pada tahun 2024 dan 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang konsisten dan terjaga dengan baik, tercermin dari capaian kinerja yang melampaui target pada kedua tahun tersebut.

Pada tahun 2024, target Tingkat Efektivitas KIE ditetapkan sebesar 96,7, dengan realisasi sebesar 96,73 sehingga menghasilkan capaian kinerja 100,03%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target telah disusun secara realistis dan

didukung oleh implementasi KIE yang efektif, sehingga target dapat tercapai bahkan sedikit melampaui sasaran yang ditetapkan.

Sementara itu, pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 87,06, lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian terhadap tools survei tingkat efektivitas KIE oleh unit pengampu Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,47, dengan capaian kinerja 100,47%. Meskipun secara absolut nilai realisasi dan target tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, capaian kinerja justru menunjukkan peningkatan persentase capaian, dari 100,03% pada tahun 2024 menjadi 100,47% pada tahun 2025.

Penurunan target dan realisasi pada tahun 2025 dapat dimaknai sebagai bagian dari penyesuaian strategi dan pendekatan pelaksanaan KIE, yang mempertimbangkan perubahan konteks, karakteristik sasaran, maupun transformasi metode KIE, termasuk optimalisasi media digital dan segmentasi audiens yang lebih spesifik. Dalam konteks tersebut, capaian kinerja yang tetap melampaui target menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan KIE tetap terjaga meskipun dengan sasaran numerik yang berbeda.

Secara komparatif, kinerja Tingkat Efektivitas KIE pada tahun 2024 dan 2025 sama-sama berada pada kategori sangat baik, karena seluruh target berhasil dicapai lebih dari 100%. Peningkatan persentase capaian pada tahun 2025 mengindikasikan adanya peningkatan ketepatan perencanaan dan eksekusi program KIE, serta kemampuan satuan kerja dalam mengelola kinerja secara adaptif dan akuntabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja BBPOM Jakarta dalam pelaksanaan KIE selama periode 2024–2025 menunjukkan konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan, serta menjadi dasar yang kuat untuk penguatan



strategi KIE pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung peningkatan literasi keamanan obat dan makanan secara lebih luas dan berdampak

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	89,48	87,47	-	100.47 %	97,75%	

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra), target jangka menengah Tingkat Efektivitas KIE yang ditetapkan untuk tahun 2029 adalah sebesar 89,48. Sementara itu, target tahunan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 87,06, dengan realisasi kinerja mencapai 87,47. Capaian tersebut menunjukkan tingkat pencapaian terhadap target tahunan sebesar 100,47%, yang berada pada kategori sangat baik, menandakan bahwa kinerja tahun berjalan telah melampaui sasaran yang direncanakan dalam Renstra.

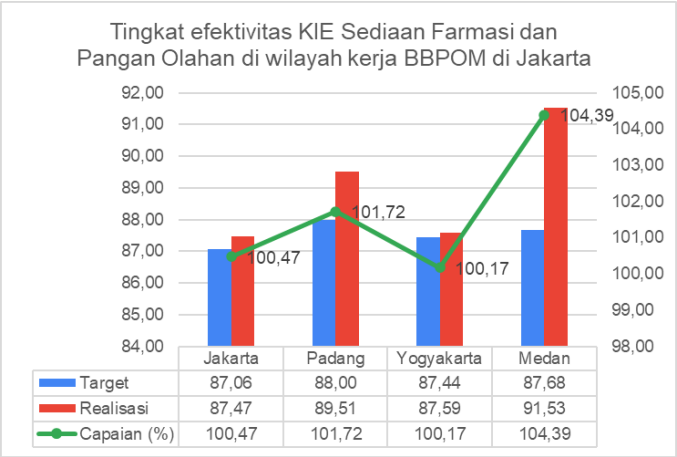
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 97,75%. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun berjalan, capaian kinerja Tingkat Efektivitas KIE telah berada sangat dekat dengan target akhir Renstra. Kondisi ini mencerminkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan KIE BBPOM Jakarta telah berada pada jalur yang tepat (*on track*), serta menunjukkan progres kinerja yang positif dan berkelanjutan menuju sasaran jangka menengah.

Dengan capaian kinerja yang melampaui target tahunan dan mendekati target jangka menengah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KIE selama tahun 2025 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis Renstra. Ke depan, diperlukan upaya penguatan dan konsistensi



strategi KIE agar tren kinerja positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga target jangka menengah tahun 2029 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

d. **Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain**



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tingkat Efektivitas KIE pada tahun 2025, BBPOM Jakarta, Padang, Yogyakarta, dan Medan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian kinerja seluruh unit kerja yang melampaui target masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE di keempat unit kerja telah berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

BBPOM Jakarta memiliki target sebesar 87,06 dengan realisasi kinerja 87,47, sehingga capaian kinerja mencapai 100,47%. Capaian ini menempatkan BBPOM Jakarta pada kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi pelaksanaan KIE yang efektif serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja. Sementara itu, BBPOM Yogyakarta mencatat capaian kinerja 100,17%, dengan realisasi yang relatif dekat dengan target, yang mengindikasikan stabilitas dan keterjagaan kualitas pelaksanaan KIE.

BBPOM Padang dan BBPOM Medan menunjukkan capaian kinerja yang lebih tinggi secara persentase, masing-masing sebesar 101,72% dan 104,49%. Tingginya capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan efektivitas

pelaksanaan KIE yang melampaui ekspektasi perencanaan awal, khususnya di BBPOM Medan yang mencatat realisasi paling tinggi dibandingkan unit kerja lainnya. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh variasi karakteristik wilayah, sasaran KIE, intensitas kegiatan, serta strategi dan metode penyampaian edukasi yang diterapkan oleh masing-masing unit kerja.

Secara komparatif, meskipun capaian BBPOM Jakarta tidak setinggi Padang dan Medan, kinerja yang dicapai tetap berada pada kategori sangat baik dan sejalan dengan capaian unit kerja lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM Jakarta berada pada posisi yang kompetitif dan stabil dalam pelaksanaan KIE. Ke depan, hasil perbandingan ini dapat menjadi dasar untuk penguatan praktik baik (best practices) antar unit kerja, serta mendorong optimalisasi strategi KIE agar efektivitas dan dampak edukasi dapat terus ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tidak ada kendala	Untuk pelaksanaan kegiatan KIE selanjutnya tahun 2026 : - Menyusun perencanaan kegiatan sesuai pedoman - Meningkatkan koordinasi serta kolaborasi dengan stakeholder - Menyusun materi KIE sesuai dengan kebutuhan audiens dan isu terkini	Pelaksanaan kegiatan KIE sampai bulan Desember 2025 telah dilaksanakan.	31 Des 2025	Y	O-11	Masyarakat masih melakukan praktik yang tidak aman terkait obat dan makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1.1.1 Faktor Pendukung

Pencapaian pernyataan kinerja BBPOM Jakarta didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis, khususnya kegiatan KIE yang dirancang secara terencana dan adaptif. Penguatan KIE berbasis segmentasi sasaran serta pemanfaatan media digital berkontribusi



positif terhadap peningkatan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, sinergi antar unit kerja dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan dilakukan penyesuaian kegiatan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan program tetap berada pada jalur pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

1.1.2 Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta heterogenitas karakteristik sasaran KIE. Perbedaan tingkat pemahaman dan akses informasi pada kelompok sasaran tertentu berdampak pada variasi tingkat efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dinamika pelaksanaan kegiatan turut mempengaruhi intensitas dan jangkauan KIE. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan strategi perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat lebih efektif dan merata dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 64 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,47	100,47 %	2.1777.218.000	2.176.741.230	99,98 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 100% dengan kategori efisien. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah



sepenuhnya sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai Hasil pengukuran efisiensi ini menjadi indikator penting perlunya penajaman strategi pengelolaan sumber daya ke depan. Informasi efisiensi dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap desain kegiatan, pengalokasian anggaran, serta pemilihan metode pelaksanaan yang lebih hemat sumber daya namun tetap berdampak.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1. **Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan**

   Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan KIE dengan memperkuat segmentasi sasaran dan metode digital yang lebih efektif. Kegiatan KIE difokuskan pada kelompok sasaran prioritas dengan pendekatan yang lebih interaktif agar berdampak langsung pada peningkatan efektivitas KIE.

2. **Penyesuaian Penggunaan Anggaran**

   Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan KIE yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja.

3. **Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja**

   Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode KIE, dan penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. **Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya**

   Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan



Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

1) Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
2) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
3) intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
4) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
5) Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan
6) Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:



1. Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

7) Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sekolah Full Intervensi

a) Advokasi lintas sektor keamanan pangan
b) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
c) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
d) Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah
e) Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan

Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
5	Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)
Total Skor		100%	



a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	15	15	100	Baik	

Jumlah sekolah yang melalkukan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 sebanyak 15 sekolah. Realisasi ini telah memenuhi target sebanyak 15 sekolah, sehingga diperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori kinerja Baik. Pelaksanaan intervensi sekolah dilakukan dalam dua batch pelaksanaan, yaitu batch 1 terhadap 8 sekolah (Januari-Agustus 2025) dan batch 2 terhadap 7 sekolah (Oktober-November 2025).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	115	15,00	116	15	100,87	100,00

Target jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada dokumen rencana strategis 2020-2024 sebanyak 115 sekolah. Kemudian hingga tahun 2024, telah terealisasi sekolah yang diintervensi sebanyak 116 sekolah dengan rincian 12 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2020, 28 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2021, 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2022, 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2023, dan 26 sekolah di wilayah Kota



Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024. Dengan capaian ini, diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 100.87% dengan katgori sangat baik.

Sedangkan, target dan realisasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2025 adalah sebanyak 15 sekolah. Dengan hasil ini diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	29	15	-	100%	51,72%	Target akan tercapai di tahun 2029

Realisasi kinerja capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sebanyak 15 sekolah. Jika dibandingkan dengan terget, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori baik. Sedangkan, target jangka menengah di tahun 2029 ialah sebanyak 29 sekolah. Dengan capaian kinerja tahun 2025, target renstra pada tahun 2029 optimis akan tercapai dengan melanjutkan strategi pelaksanaan kegiatan intervensi yang efisien dan efektif serta dengan menyesuaikan implementasi mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Salah satu strategi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan teknis, sosialisasi keamanan pangan, dan pengawalan secara daring serta memperkuat koordinasi dengan melalui *platform* digital, seperti melalui *Whatsapp group.*



d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan berturut-turut sebanyak 15, 7, 14, dan 22 sekolah. Jika dibandingkan dengan target, capaian BBPOM di Jakarta dan Yogyakarta sudah memenuhi target dengan capaian sebesar 100,00%. Di sisi lain, BBPOM di Medan berhasil memperoleh capaian kinerja sebesar 110,00% kategori sangat baik, dengan target sebanyak 19 sekolah. Sedangkan, BBPOM di Padang hanya dapat mengintervensi 7 dari target 14 sekolah, sehingga diperoleh capaian sebesar 50.00% dengan kategori kurang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, antara lain:

1) Telah terbentuknya komitmen dukungan dari lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pemerintah daerah, suku dinas pendiidikan, suku dinas

2) kesehatan serta sekolah-sekolah yang diitervensi melalui kegiatan penandatanganan

3) Telah terbentukanya tim dan kader keamanan pangan sekolah yang secara konsisten melakukan impelementasi program dan telah mencapai nilai yang optimal dalam penilaian sertifikasi sekolah.

4) Telah terbentuknya dokumen rencana aksi keamanan pangan mandiri di sekolah sebagai indikator keberhasilan program.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala.	Seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah dilaksanakan karena komitmen, konsistensi pelaksanaan dan tersusunnya rencana aksi	Seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	31 Des 2025	Y	SS-09	Masih terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di sekolah yang sudah mendapatkan intervensi Program PJAS

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 karena telah terbentuknya komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan stakeholder dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk sekolah-sekolah intervensi dengan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan untuk sekolah SD/SMP/SMA/SMK dan Kementerian Agama Wilayah Jakarta Timur untuk madrasah MI/MTs/MA. 15 Sekolah/ Madrasah yang mengikuti seluruh tahapan dengan PJAS Aman yaitu SDN Kayumanis 01, SDN Pulogebang 07, SMPN 255, SMAN 28, SMKN 52, MIN 21, MTsN 21, MAN 2 Jakarta, SDN Munjul 01, SDN Pinang Ranti 04, SDN Pinang

Ranti 01, SMPN 287 Pinang Ranti, SMPN 283 Cipayung, SMAN 88 Pasar Rebo dan SMAN 50 Jatinegara.

Kolaborasi dan sinergi yang baik dalam pelaksanaan program intervensi dengan tim dan kader keamanan pangan sekolah juga menjadi penunjang pelaksanaan tahapan kegiatan dapat selesai sesuai dengan perencanaan dan selesai tepat waktu. Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua *batch.* Namun, hal ini tidak menyebabkan kendala yang berarti karena target kinerja tetap dapat tercapai dengan strategi pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara daring. Diantaranya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah dan pengawalan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 65 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100%	86.280.000	86.007.824	99.68 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa dengan sumber daya anggaran yang telah disediakan digunakan secara efisien guna memperoleh *output* kegiatan intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang optimal yaitu dengan cara memanfaatkan sistem informasi digital dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan tim dan kader keamnaan pangan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran



kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaaan keamanan pangan dengan metode pemberian bimtek dan sosialisasi secara daring dengan menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja

Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya

Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara



intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

2) Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

3) Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

4) Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
   a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
   b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
   c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)
   d) Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober



No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	5	5	100	Baik	

Realisasi Jumlah desa/ kelurahan pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2025 adalah 5 kelurahan. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 5 kelurahan, diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori kinerja baik. Pelaksanaan kegiatan intervensi desa/ kelurahan pangan aman tahun 2025 dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama terhadap 3 kelurahan (Kelurahan Malaka Sari, Pal Meriam, dan Penggilingan) serta tahp dua terhadpa dua kelurahan (Kelurahan Pinang Ranti dan Munjul).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah desa pangan aman	36	5,00	36	5	100,00	100,00



Target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 adalah sebanyak 36 kelurahan. Pada tahun 2020, capaian Desa Pangan Aman adalah sebanyak 5 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah Desa pada tahun 2021 sebanyak 9 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, total 14 desa/kelurahan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi Desa Pangan Aman terhadap 7 desa/kelurahan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total pada 2022 ialah 21 kelurahan. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 7 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan total kelurahan intervensi adalah 28. Pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 8 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total kelurahan intervensi 2020-2024 adalah 36 kelurahan. Dengan realisasi ini, diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00%. Pada tahun 2025 dilakukan intervensi terhadap 5 kelurahan dengan target yang sama, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00% (kategori baik).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Jumlah desa pangan aman	5	8	5	-	100%	62,50%	Target akan tercapai di tahun 2029

Realisasi kinerja capaian jumlah desa/ kelurahan pangan aman tahun 2025 sebanyak 5 kelurahan. Jika dibandingkan dengan terget, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori baik. Sedangkan, target jangka menengah di tahun 2029 ialah 8 kelurahan. Dengan capaian kinerja



tahun 2025, target renstra pada tahun 2029 optimis akan tercapai dengan melanjutkan strategi pelaksanaan kegiatan intervensi yang efisien dan efektif serta dengan menyesuaikan implementasi mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Contohnya penyesuaian kegiatan intervensi dengan metode daring pada pelaksanaan kegiatan pengawalan dan intensifikasi pendampingan tim dan kader keamanan pangan dalam pelaksanaan rencana aksi keamanan pangan melalui pertemuan daring dan *platform* komunikasi digital seperti *Whatsapp group.*

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	5,00	6,00	4,00	4
Realisasi	5	3,00	4,00	4
Capaian (%)	100,00	50,00	100,00	100,00

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja dengan unit-unit kerja lain, diketahui bahwa realisasi jumlah desa/ kelurahan pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan semuanya sudah sesuai target masing-masing, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00% (kategori baik). Adapun jumlah desa/ kelurahan pangan aman tahun 2025 di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan berturut-turut sebanyak 5, 3, dan 4 desa/ kelurahan. Di samping itu, realisasi jumlah desa/ kelurahan pangan aman di wilayah kerja BBPOM di

Padang sebanyak 3 desa/ kelurahan. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 6 desa/ kelurahan diperoleh capaian kinerja sebesar 50.00%, kategori kurang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian kinerja jumlah desa/kelurahan antara lain:

1) Telah terbentuknya komitmen dukungan dari pemerintah daerah, perangkat kelurahan, dan OPD terkait dalam pelaksanaan program intervensi dengan adanya integrasi program dengan kegiatan yang ada di kelurahan, seperti kegiatan PKK, LMK, dan posyandu.
2) Telah terbentuknya tim, kader, dan komunitas keamanan pangan di masing-masing kelurahan intervensi yang secara aktif melaksanakan pendampingan praktik keamanan pangan secara mandiri.
3) Telah terbentuknya dokumen rencana aksi keamanan pangan mandiri di kelurahan-kelurahan sebagai indikator keberhasilan program.
4) Adanya forum komunikasi dengan tim dan kader untuk meningkatkan kapasitas dan *refreshment* materi keamanan pangan melalui inovasi LSC BBPOM Jakarta.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9

1	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala.	Seluruh tahapan program Kelurahan Pangan Aman telah dilaksanakan disebabkan komitmen, konsisten pelaksanaan, tersusunnya rencana aksi serta adanya forkom dan inovasi	Seluruh tahapan program Kelurahan Pangan Aman tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	31 Des 2025	Y	SS-08	Terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi komunitas yang telah diintervensi oleh BBPOM

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian program intervensi Desa/ Kelurahan Pangan Aman tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah daerah, Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan serta OPD terkait dalam hal ini Sudinkes melalui puskesmas, Sudin PPKUKM, Sudin PPAPP, dan Sudin KPKP. Dukungan yang diberikan antara lain adanya integrasi program keamanan pangan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan seperti kegiatan posyandu, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pertemuan PKK, program pendampingan Jakpreneur bagi pelaku usaha pangan, pelaksanaan PMT di posyandu. Keaktifan Tim dan Kader keamanan pangan kelurahan dalam pelaksanaan fasilitasi kepada komunitas serta dalam menyusun rencana aksi keamanan pangan menjadi faktor penentu pelaksanaan program intervensi Desa/ Kelurahan Pangan aman dapat berjalan sesuai dengan target pelaksanaan.

Pelaksanan kegiatan intervensi dilakukan dalam dua tahapan pelaksanan sesuai dengan kebijakan penyesuaian anggaran. Tahap 1 dilakukan intrevensi terhadap tiga kelurahan yang mencakup kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan. Sedangkan, tahap 2 dilakukan intervensi terhadap dua kelurahan yang hanya terdiri atas tahapan intervensi Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas, tidak menyertakan kegiatan fasilitasi. Untuk mitigasi adanya kemungkinan kesenjangan, dilakukan pemberdayaan tim dan kader keamanan pangan untuk



dapat melakukan pendampingan praktik keamanan pangan terhadap komunitas kelurahan yang tertuang dalam dokumen rencana aksi keamanan pangan kelurahan. Sebagai monitoring pelaksanaan program tersebut, dilakukan kegiatan pengawalan dengan strategi penguatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi yang telah terbentuk antara tim dan kader kelurahan-kelurahan yang telah diintervensi.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 66 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
19	Jumlah desa pangan aman	5	5	100%	124.801.000	124.781.000	99,98 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah efektif dan efisien dalam mencapai *output* kegiatan. Optimalisasi peran tim dan kader keamanan pangan dalam pelaksanaan pendampingan keamanan pangan terhadap komunitas melalui integrasi program yang ada di kelurahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan intervensi. Contohnya integrasi program sosialisasi keamanan pangan melalui program posyandu stunting, pertemuan rutin PKK, dan pertemuan rutin LMK.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil



pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan

   Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi desa/ kelurahan pangan aman dengan pelaksanaan pendampingan penerapan keamanan pangan secara mandiri oleh kader keamanan pangan kelurahan sehingga pendayagunaan sumberdaya anggaran dapat lebih efisien.

2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

   Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja

   Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya

   Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana



penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

1) Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2) Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
3) Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
4) Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5) Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
6) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
7) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8) Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April



No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	1	1	100	Baik	

Realisasi jumlah padar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 adalah 1 pasar. Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (kategori baik) karena sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak satu pasar. Pelaksanaan intervensi dapat tercapai dengan adanya komitmen dari lintas sektor terkait, yaitu Perumda Pasar Jaya, dalam mengawal pelaksanaan program intervensi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	1,00	6	1	100,00	100,00



Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2020, capaian Pasar Pangan Aman ialah sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah pasar pada tahun 2021 sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 2 pasar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi pasar terhadap 1 pasar lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga total pada 2022 ialah 3 pasar. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Utara sehingga total pasar intervensi sebanyak 4 pasar. Kemudian pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 2 pasar di di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total intervensi pasar 2020-204 ialah 6 pasar.

Selajutnya pada tahun 2025 telah dilakukan intervensi program pasar panga naman berbasis komunitas terhadap satu pasar di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan capaian kinerja sebesar 100.00% (kategori Baik).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	1	-	100%	50%	proyeksi target akan tercapai di Tahun 2029



Realisasi kinerja capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 sebanyak 1 pasar. Jika dibandingkan dengan target, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori baik. Sedangkan, target jangka menengah di tahun 2029 ialah 2 pasar. Dengan capaian kinerja tahun 2025, target renstra pada tahun 2029 optimis akan tercapai dengan melanjutkan strategi pelaksanaan kegiatan intervensi yang efisien dan efektif serta dengan menyesuaikan implementasi mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Pemanfaatan media sosial sebagia bentuk sosialialisasi keamanan pangan mendukung tercapainya tahapan intervensi dengan memperluas jangkauan penerima pesan keamanan pangan.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	1,00	1,00	1,00	1
Realisasi	1	1,00	1,00	1
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan data jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan, diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Hal ini karena semua target kinerja yang ditetapkan sudah terealisasi sampai dengan akhir tahun 2025.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian kinerja jumlah desa/kelurahan antara lain:

1) Dukungan pelaksanaan program dari Perumda Pasar Jaya sehingga telah terbentuk sinergi program keamanan pangan di pasar intervensi.
2) Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan yang lebih fleksibel dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens.



3) Adanya forum komunikasi dengan pengurus pasar yang memudahkan dalam koordinasi pelaksaan program.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala.	Seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan disebabkan adanya dukungan dan komitmen, pelaksanaan yang konsisten serta adanya forkom dengan pengelola pasar	Seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	31 Des 2026	Y	SS-07	Terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi pasar yang telah diintervensi/ dibina oleh BBPOM

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi kinerja capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 sebanyak 1 pasar. Jika dibandingkan dengan terget, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori baik. Sedangkan, target jangka menengah di tahun 2029 ialah 2 pasar. Dengan capaian kinerja tahun 2025, target renstra pada tahun 2029 optimis akan tercapai dengan melanjutkan strategi pelaksanaan kegiatan intervensi yang efisien dan efektif serta dengan menyesuaikan implementasi mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Pemanfaatan media sosial sebagia bentuk sosialialisasi keamanan pangan mendukung tercapainya tahapan



intervensi dengan memperluas jangkauan penerima pesan keamanan pangan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 67 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100%	30.690.000	30.543.025	99,52 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah efektif dan efisien dalam mencapai *output* kegiatan. Dukungan Perumda Pasar Jaya dalam pelaksanaan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas dan adanya replikasi program mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1.Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas dengan intensifikasi pengunaan media *digital* dan media sosial untuk meningkatkan jangkauan penerima pesan keamanan pangan yang lebih efektif dan efisien.



2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja

Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. **Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya**

Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.

Sasaran Kegiatan 04

Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

21. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:



a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

a) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

b) Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:



a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;



- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan

- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;

2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);

3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan

- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/ Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya.



No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
				Bukti dukung: daftar hadir, nilai *pre post test* dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan



No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	



Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$B = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$C = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	16,9	24,05	142,31	Tidak dapat disimpulkan	●

Capaian pada IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 142,31% perlu di normalisasi menjadi 110% sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM yang merupakan revisi dari Pedoman SAKIP sebelumnya (Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025).

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Jakarta melakukan kerjasama pendampingan UMKM bersama dengan Dinas (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) PPKUKM Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dari program pendampingan fasilitasi kolaborasi tersebut Dinas PPKUKM mengusulkan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) sarana yang tersebar di 5 (lima) wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Melalui mekanisme



visitasi sarana produksi, dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) sarana yang diusulkan terdapat 84 (delapan puluh empat) sarana dapat difasilitasi dan mengikuti rangkaian program pendampingan tahun 2025.

Program fasilitasi kolaborasi bersama Dinas PPKUKM Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mengusulkan sebanyak 84 (delapan puluh empat) sarana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam capaian pendampingan oleh Balai Besar POM di Jakarta di tahun 2025 sehingga total sarana yang difasilitasi menjadi 103 (seratus tiga) sarana yang terbagi menjadi 95 (sembilan puluh lima) UMKM pangan olahan, 4 (empat) UMKM obat bahan alam dan 4 (empat) UMKM kosmetik.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Balai Besar POM di Jakarta melakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yaitu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) yang terbagi menjadi 70 (tujuh puluh) UMKM Pangan Olahan, 3 (tiga) UMKM obat bahan alam dan 3 (tiga) UMKM kosmetik. Adapun jumlah target tersebut dibawah realisasi pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta yang berkolaborasi dengan Dinas PPKUKM Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang mana salah satu komponen kolaborasi pendampingan ialah dengan penganggaran kegiatan bimbingan teknis, pengujian laboratorium dan biaya tenaga pendamping kewirausahaan. Adanya program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut mendukung realisasi UMKM yang memperoleh SPA CPKB, Sertifikat CPOTB Bertahap dan IP CPPOB menjadi jauh melebihi target sehingga nilai capaian mencapai 142,31% di masa efisiensi anggaran.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	16,90	100	24,05	100,00	142,31

Pada tahun 2024, perhitungan target persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap, SPA CPKB dan IP CPPOB berdasarkan proses tahapan pendampingan yang dilakukan dan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat di tahun berjalan, sementara di tahun 2025 perhitungan target berdasarkan jumlah sertifikat yang terbit di tahun berjalan dibandingkan dengan target jumlah kumulatif UMKM yang memperoleh sertifikat hingga tahun 2029. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut mendukung realisasi UMKM yang memperoleh SPA CPKB, Sertifikat CPOTB Bertahap dan IP CPPOB menjadi jauh melebihi target sehingga nilai capaian mencapai 142,31% di masa efisiensi anggaran.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

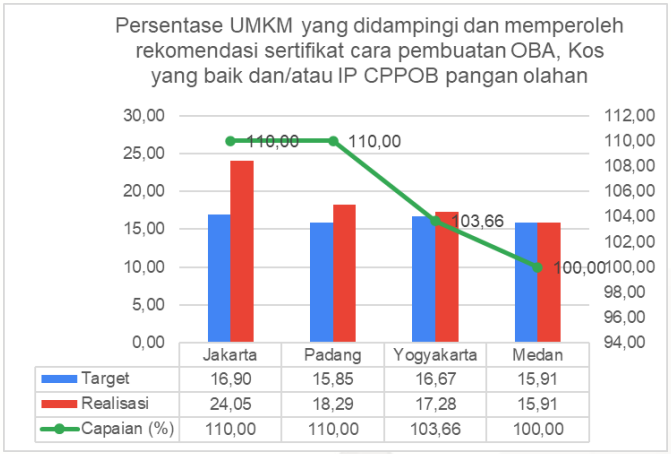
Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,9	95,24	24,05	-	142,31	-	Akan tercapai di tahun 2029 dikarenakan target kumulatif di tahun 2029

Berdasarkan target jangka menengah Renstra 2029, jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap, SPA CPKB dan IP CPPOB ialah minimal (target pembilang) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) UMKM dan maksimal (target penyebut) sebanyak 420 (empat ratus dua puluh)



UMKM. Adapun realisasi di tahun 2025 jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap, SPA CPKB dan IP CPPOB total sebanyak 103 (seratus tiga) UMKM dan realisasi tersebut sudah memenuhi sekitar 24,5% dari target UMKM yang ditetapkan hingga tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	16,90	15,85	16,67	15,91
Realisasi	24,05	18,29	17,28	15,91
Capaian (%)	110,00	110,00	103,66	100,00

Berdasarkan grafik di atas, capaian Balai Besar POM di Jakarta untuk Indikator Kinerja Utama Presentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB, SPA CPKB dan IP CPPOB Pangan Olahan dinormalisasi menjadi 110% dan nilai tersebut diatas rata-rata dari capaian UPT lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik

dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Program pendampingan secara intensif

   Pada tanggal 22 Januari 2025 telah diselenggarakan advokasi lintas sektor dengan beberapa dinas pengampu, akademisi, organisasi pelaku usaha .





Gambar 3. 2 Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Pengawasan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

2. Balai Besar POM di Jakarta memiliki akses yang dibuka secara umum yang diinformasikan baik secara langsung maupun melalui media sosial bagi

masyarakat untuk mendaftarkan dirinya mengikuti program pendampingan melalui inovasi Jak Fast.



Gambar 3. 3 Publikasi Pendaftaran Pendampingan melalui Inovasi JakFast

2. Telah dilakukan visitasi secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi luring pada rentang bulan Februari hingga Juni terhadap calon UMKM yang akan.diikutsertakan pada program fasilitasi untuk pemastian sarana

dan prasarana sebelum dilakukan penetapan UMKM yang akan ikut program fasilitasi .



Gambar 3. 4 Pelaksanaan Visitasi Sarana Produksi

4. Terselenggaranya Bimtek CPPOB tepat waktu untuk Fasilitasi Kolaborasi di lima wilayah administrasi dan untuk Fasilitasi Mandiri dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:





Gambar 3. 5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

5. Terselenggaranya Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II terkait penggunaan BTP, ketentuan label dan informasi nilai gizi, kategori pangan dan parameter
6. uji serta tata cara registrasi produk di sistem E-Reg RBA, berikut pelaksanaan Bimtek Tahap II pada triwulan II :

Tanggal	Wilayah
11 dan 12 Juni 2025	Jakarta Selatan
11 dan 12 Juni 2025	Jakarta Timur
17 dan 18 Juni 2025	Jakarta Utara
16 dan 17 Juni 2025	Jakarta Barat





Gambar 3. 6 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap 2 terkait Label Pangan Olahan, Penggunaan BTP, Informasi Nilai Gizi, dan Simulasi Registrasi Produk

6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap 3

Telah dilakukan untuk memberikan informasi terkait pengantar pangan steril komersial, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan iklan pangan.

Kegiatan dilaksanakan di 5 (lima) wilayah administrasi yang dilakukan fasilitasi. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bimtek adalah sebagai berikut.

Wilayah	Tempat Pelaksanaan Bimtek	Waktu Pelaksanaan Bimtek
Jakarta Timur	06-Nov-25	Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Mebel
Jakarta Selatan	27-Nov-25	Kantor Walikota Jakarta Selatan
Jakarta Barat	28 Oktober 2025	Kantor Walikota Jakarta Barat
Jakarta Pusat	25-Nov-25	Kantor Walikota Jakarta Pusat
Jakarta Utara	19-Nov-25	Kantor Walikota Jakarta Utara



Gambar 3. 7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap 3 terkait Label Pangan Olahan, Penggunaan BTP, Informasi Nilai Gizi, dan Simulasi Registrasi Produk

7. Pelaksanaan Desk CPPOB

1.2 Tahap selanjutnya dari program pendampingan Izin Edar BPOM MD ialah pengajuan Izin Penerapan CPPOB. Berikut daftar sarana UMK Pangan Olahan yang terpilih sebagai penerima program Fasilitasi Kolaborasi berdasarkan *gap assessment* yang telah dilakukan melalui visitasi, konsultasi denah dan mengikuti pengembangan kompetensi dengan keikutsertaannya pada kegiatan bimbingan teknis.

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Binaan
21 Maret 2025	Daring Melalui Zoom Meeting	DKI Jakarta
16 Mei 2025	Daring Melalui Zoom Meeting	DKI Jakarta
19 Mei 2025	Daring Melalui Zoom Meeting	DKI Jakarta
26 Juni 2025	Ruang Rapat Balai Besar POM di Jakarta Jl. As Syafiiyah No.133 Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	DKI Jakarta

Tabel 3. 68 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-2	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**



Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Terdapat kendala dalam pergantian KBLI dan juga penentuan kategori pangan sehingga seringkali kategori pangan perlu direvisi	Dilakukan bimtek peningkatan kapasitas UMKM dengan narasumber dari Badan POM terkait Pangan Steril Komersil, dan Rancangan Iklan dari organisasi profesional	Akan dilaksanakan desk registrasi pangan olahan dan bimtek peningkatan kapasitas umkm berdaya saing	2026	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan berskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.
2. Balai Besar POM di Jakarta mempunyai inovasi UMKM Jaw@ra untuk mengakomodir Inovasi dalam membantu UMKM untuk mendapatkan Ijin Penerapan CPPOB dan Ijin Edar MD baik yang dilakukan internal maupun berkolaborasi dengan Linsek terkait yang dibuat terstruktur pertahap dan dilakukan secara besar - besaran. Inovasi ini berhasil menjadi Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024.
3. Melakukan pelayanan prima berupa Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Informasi Keliling (Kerling) yang dimanfaatkan untuk kegiatan desk CPPOB dalam rangka percepatan penyelelesaian perbaikan dokumen penerbitan Izin Penerapan CPPOB



4. Selain dilakukan program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM juga dilakukan fasilitasi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dari BBPOM di Jakarta. Fasilitasi ini untuk menjangkau pelaku usaha di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional.
5. Untuk menilai komitmen pelaku usaha produksi pangan peserta fasilitasi yang telah terbit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dilakukan audit dalam rangka verifikasi terkait pelaksanaan dan konsistensi pelaksanaan prosedur.
6. Adanya fasilitas untuk pengujian produk di laboratorium BBPOM di Jakarta bagi UMKM yang difasilitasi serta adanya kebijakan potongan 50 (lima puluh) persen untuk biaya registrasi produk dari Badan POM.
7. Adanya kolaborasi dengan Perguruan Tinggi salah satunya adalah Universitas Pancasila dalam rangka pendampingan UMKM Obat Bahan Alam.
8. Adanya program SAPA KAMPUS yang merupakan Inovasi dari Badan POM dalam pemberdayaan komunitas intelektual dalam hal ini mahasiswa sebagai fasilitator keamanan pangan yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi bidang kemanana pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 69 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
21	Persentase UMKM yang didampingi dan	16,9	24,05	142.31%	51.418.000	51.293.750	99,76%	**1,43**	**0,43**	**92%**	Efisien

	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan										

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,43 dengan capaian tingkat efisiensi 92% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.
2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan target UMKM yang memperoleh sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan.

Sasaran Kegiatan 05

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah kerja BBPOM di Jakarta

22. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH UPT

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

i. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
ii. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
iii. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
iv. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.



Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	70	76,54	109,34	Sangat Baik	

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Jakarta terealisasi sebesar 76,54%, lebih besar dari target (70%) sehingga capaiannya mencapai 109,34% yang dikategorikan **Sangat Baik**.

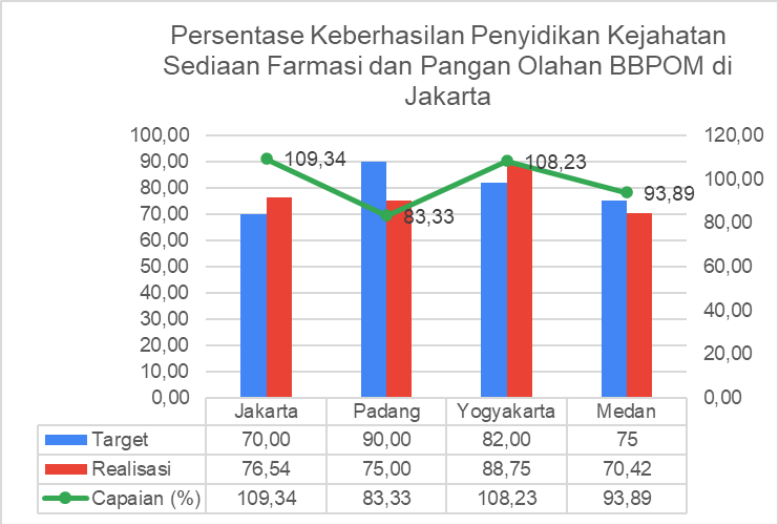
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70	78	76,54	-	109,34	98,13	Akan Tercapai

Jika realisasi kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta tahun 2025 (76,54%) dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (78%), maka capaian pada tahun 2025 ini termasuk ke dalam kategori **Baik** dengan capaian 98,13%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	70,00	90,00	82,00	75
Realisasi	76,54	75,00	88,75	70,42
Capaian (%)	109,34	83,33	108,23	93,89

Capaian Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Jakarta (109,34%) paling tinggi dibandingkan dengan capaian di UPT pembanding, yaitu BBPOM di Padang (83,33%), BBPOM di Yogyakarta (108,23%), dan BBPOM di Medan (93,89%), walaupun target BBPOM di Jakarta paling kecil dibandingkan dengan target UPT pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Jakarta lebih tinggi daripada ketiga UPT lainnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didukung oleh kegiatan di antaranya:

1) Peningkatan kompetensi Penyidik PNS BBPOM di Jakarta:
   a) Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemeriksaan dan Penyidikan;
   b) Bintekkatpuan (Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan) Penyidik Polri dan PPNS Tahun 2025;
   c) Kewenangan Penyidik BPOM dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui *E-Commerce*;
   d) *Workshop* & Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2025;
   e) Workshop PSI (*Pharmaceutical Security Institute*) × BPOM: *Beyond Borders: Tackling Emerging threats of Counterfeit Medicine in Public Health*.
2) Komitmen seluruh penyidik dalam penyelesaian berkas perkara sesegera mungkin agar didapatkan status tetap untuk para terlapor;
3) Peningkatan sinergisme koordinasi bersama Apgakum (Aparat Penegak Hukum) seperti Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan Kejaksaan Negeri di wilayah Daerah Khusus Jakarta.
4) Adanya *tools* (alat bantu) dalam pemantauan kemajuan perkara yang disertai dengan *timeline*, baik di BBPOM di Jakarta, Direktorat Penyidikan BPOM, maupun Instansi Apgakum;
5) *Monitoring* dan evaluasi berkala terhadap kemajuan perkara, yaitu bulanan dan triwulanan dengan disertai mitigasi dan rencana perbaikan ke depannya.

Tabel 3. 70 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**



Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	Keterbatasan anggaran untuk penyelesaian berkas perkara tahun 2025 dan carry over.	Penyelesaian perkara semaksimal mungkin dilaksanakan di bulan Desember tahun 2025 mengoptimalkan anggaran yang ada.	Penyelesaian 7 perkara carry over di tahun 2026.	31 Des 2026	Y	F-12 F-15 F-20 H-1	tidak ada

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didukung oleh kegiatan di antaranya:

1) Kegiatan Intelijen

Kegiatan Intelijen dilakukan untuk mendapatkan target operasi penindakan yang mendukung keberhasilan proses penyidikan.

2) Kegiatan Penindakan

Kegiatan penindakan dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kasus yang akan ditindaklanjuti secara *pro justitia*. Berhasil/tidaknya kegiatan tersebut akan berpengaruh pada persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jakarta.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 71 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70	76,54	109,34 %	392.564.000	392.559.542	99,99 %	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien



Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,09 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Keberhasilan ini disebabkan oleh terselesaikannya perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara dari 5 (lima) perkara baru di tahun 2025 dan terselesaikannya perkara *carry over* sebanyak 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) perkara

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jakarta dapat berupa:

1. Intensifikasi kegiatan intelijen guna mendapatkan target operasi penindakan yang menghasilkan perkara;
2. Revisi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian perkara *carry over* dan perkara tahun berjalan;
3. Monitoring dan evaluasi perkara dilakukan secara rutin guna pemantauan berkala terhadap kemajuan perkara;

Sasaran Kegiatan 06

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta

23. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai



peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

3) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan

1. Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

   a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

   b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

   c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

   Keterangan:

   a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang



dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Tahun 2025	90	93,75	104,17	Sangat Baik	

Keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar terealisasi sebesar 93,75%, lebih besar dari target (90%) sehingga capaiannya mencapai 104,17% yang dikategorikan **Sangat Baik**.

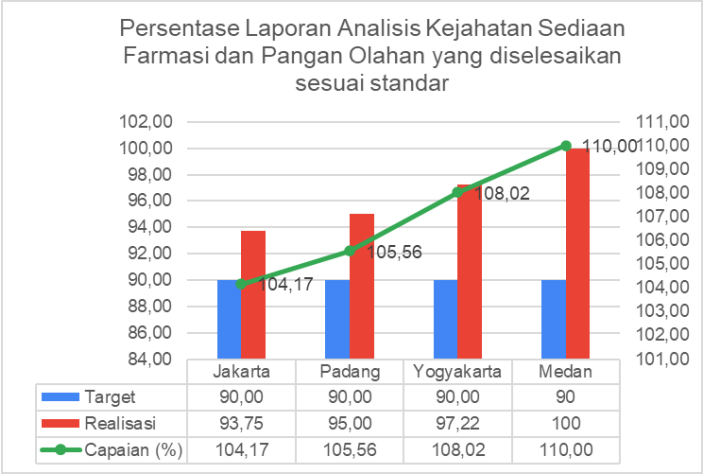
b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)



Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	94	93,75	-	104,17	99,73	Akan Tercapai

Jika realisasi kinerja laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar di BBPOM di Jakarta tahun 2025 (93,75%) dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (94%), maka capaian pada tahun 2025 ini termasuk ke dalam kategori **Baik** dengan capaian 99,73%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



BBPOM di Jakarta berhasil melampaui target capaian keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar BBPOM di Jakarta (104,17%). Walaupun demikian, capaian

ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di UPT pembanding, yaitu BBPOM di Padang (105,56%), BBPOM di Yogyakarta (108,02%), dan BBPOM di Medan (110,00%) dengan target capaian yang sama.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar disebabkan oleh

1) Ketepatan waktu penyampaian laporan patroli siber dan profiling setiap bulannya;
2) Penyampaian laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan penilaian maksimal dari Kepala Balai (100).
3) Rekomendasi cegah tangkal sesuai yang diamanatkan untuk UPT ditindaklanjuti seluruhnya oleh BBPOM di Jakarta.

Tabel 3. 72 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Penyampaian laporan Patroli Siber dan profilling bulan Desember 2025 tepat waktu, realisasi tidak 100% karena masih terimbas capaian Mei dan Oktober 2025 serta nilai tindak lanjut rekomendasi yang kurang dari 100%. Namun jika dibandingkan target tahun 2025	Perbaikan *timeline* penyampaian laporan profilling ke Direktorat Siber BPOM harus tepat waktu	Konsisten menyampaikan laporan Patroli Siber dan Profilling sesuai *timeline* setiap bulannya.	31 Des 2026	Y	F-16	Tidak ada
		Peningkatan pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi	Pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi dari Direktorat		Y	F-16	Tidak ada



Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	(90%) maka capaian masih dengan kategori nilai sangat baik.	yang diberikan dari Direktorat Cegah Tangkal.	Cegah Tangkal.				

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar didukung oleh kegiatan di antaranya:

1. Kegiatan Cegah Tangkal
   a) pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan;
   b) kajian analisis kejahatan obat dan makanan;
   c) penggalangan lintas sektor.

2. Kegiatan Siber

   Patroli Siber dan *Profiling* yang dilakukan secara rutin oleh tim penindakan yang setiap bulannya dievaluasi oleh tim Direktorat Siber Obat dan Makanan

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 73 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	93,75	104,17 %	137.996.000	137.995.294	99.99 %	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien



Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,09 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Keberhasilan ini disebabkan oleh terselesaikannya pelaporan patroli siber, *profiling*,



analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal pada tahun 2025

g. Pemanfaatan Infomasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat berupa:

1. Patroli siber, *profiling*, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal yang dilakukan sesuai standar;
2. Revisi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian patroli siber, *profiling*, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal ;
3. pelaporan patroli siber, *profiling*, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal pada tahun-tahun berikutnya.



Sasaran Kegiatan 07

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan

24. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI JAKARTA

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
   1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)
   2) Profesionalitas SDM (25%);
   3) Sarana Prasarana (18%);
   4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
   5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
   6) Inovasi (12%).

b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03



e. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	4,7	4,94	105,11	Sangat Baik	

Pada tahun 2025, target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta ditetapkan sebesar 4,7. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indeks pelayanan publik mencapai 4,94, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 105,11% dan berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan kategori penilaian Indeks Pelayanan Publik, nilai tersebut berada dalam rentang kategori A (Pelayanan Prima), yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sangat memuaskan dan memenuhi standar pelayanan yang tinggi.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta telah melampaui target yang direncanakan serta berada pada level pelayanan prima. Selisih positif antara realisasi dan target mengindikasikan efektivitas pelaksanaan pada kebijakan pelayanan publik, termasuk penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta kemudahan akses dan kejelasan informasi layanan bagi masyarakat.

Dengan capaian indeks yang masuk dalam kategori A (Pelayanan Prima), BBPOM di Jakarta telah menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan

mutu pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan praktik pelayanan yang telah berjalan dengan baik sekaligus mendorong inovasi pelayanan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik pada periode berikutnya.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	4,70	4,94	4,94	100,82	105,11

Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang konsisten dan berada pada kategori sangat baik. Pada tahun 2024, target indeks ditetapkan sebesar ditetapkan sebesar **4,9** dengan realisasi sebesar **4,94**, sehingga capaian kinerja mencapai **100,82%**. Sementara itu, pada tahun 2025 target indeks ditetapkan sebesar **4,7**, dengan realisasi yang tetap sebesar **4,94**, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi **105,11%**.

Secara komparatif, realisasi Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 menunjukkan stabilitas dibandingkan tahun 2024, dengan nilai realisasi yang sama. Namun demikian, persentase capaian kinerja meningkat secara signifikan pada tahun 2025 seiring dengan penurunan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian perencanaan target yang lebih adaptif, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dipertahankan secara konsisten meskipun target yang ditetapkan berbeda.

Dengan capaian kinerja yang melampaui target pada dua tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan publik BBPOM di Jakarta telah berjalan optimal dan berkelanjutan. Konsistensi realisasi indeks pelayanan publik ini menunjukkan sistem pelayanan yang efektif dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, serta menjadi dasar yang kuat mempertahankan



kategori pelayanan prima untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya

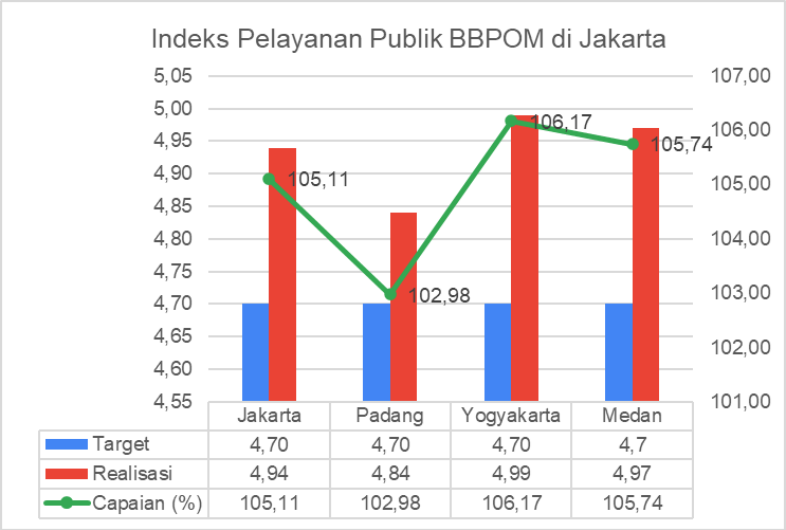
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra), target jangka menengah Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta yang ditetapkan untuk tahun 2029 adalah sebesar 4,90. Pada tahun 2025, target tahunan ditetapkan sebesar 4,7, dengan realisasi kinerja mencapai 4,94. Capaian tersebut menghasilkan tingkat pencapaian sebesar 105,11% terhadap target tahun 2025 dan berada pada kategori tercapai/melampaui.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 100,82%, yang menunjukkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik telah melampaui target akhir Renstra. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta telah berada pada jalur yang tepat dan memberikan hasil yang signifikan lebih cepat dari perencanaan jangka menengah.

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
1.3 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,7	4,90	4,94	-	105,11	100,82	Tercapai/ Melampaui

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	4,70	4,70	4,70	4,7
Realisasi	4,94	4,84	4,99	4,97
Capaian (%)	105,11	102,98	106,17	105,74

Berdasarkan perbandingan kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2025, BBPOM Jakarta, Padang, Yogyakarta, dan Medan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh unit kerja memiliki target yang sama, yaitu 4,7, dan berhasil merealisasikan nilai indeks di atas target, sehingga seluruhnya mencatat capaian kinerja lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada keempat unit kerja telah memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan.

BBPOM Jakarta mencatat realisasi indeks sebesar 4,94 dengan capaian kinerja 105,11%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dipertahankan secara konsisten dan berada pada kategori pelayanan prima. BBPOM Padang mencapai realisasi 4,84 dengan capaian 102,98%, yang meskipun lebih rendah dibandingkan unit kerja lainnya, tetap menunjukkan kinerja yang melampaui target dan berada pada kategori sangat baik. Sementara itu, BBPOM Yogyakarta mencatat realisasi tertinggi sebesar 4,99 dengan capaian 106,17%, yang mengindikasikan optimalisasi kualitas pelayanan publik

yang sangat kuat. BBPOM Medan juga menunjukkan kinerja yang tinggi dengan realisasi 4,97 dan capaian 105,74%.

Secara komparatif, perbedaan capaian kinerja antar unit kerja mencerminkan variasi dalam strategi, inovasi pelayanan, serta karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, capaian BBPOM Jakarta tetap berada pada posisi yang kompetitif dan sejalan dengan capaian unit kerja lainnya. Hasil perbandingan ini menjadi dasar penting untuk penguatan benchmarking dan berbagi praktik baik antar BBPOM, khususnya dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tetap berada pada kategori pelayanan prima secara berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

1.3.1 Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM Jakarta pada tahun 2025 yang melampaui target ditopang oleh konsistensi penerapan standar pelayanan dan komitmen peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan, didukung oleh kompetensi petugas dan kejelasan prosedur, berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, termasuk kemudahan akses informasi dan layanan, turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi pelayanan yang dilakukan secara berkala memungkinkan dilakukannya perbaikan layanan

secara cepat dan tepat, sehingga kualitas pelayanan dapat dipertahankan pada kategori pelayanan prima.

1.3.2 Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Meskipun target telah tercapai dan melampaui sasaran, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan berupa optimalisasi layanan informasi kepada pengguna. Hal ini penting mengingat kendala utama dalam layanan publik sering kali berasal dari ketidakpahaman pengguna terhadap prosedur dan persyaratan, yang berujung pada konsultasi berulang dan memperlambat proses perizinan. *Timeline* : 2026

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik BBPOM Jakarta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta tetap berada pada kategori pelayanan prima pada periode berikutnya.

Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	Tidak ada kendala	Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat diupayakan melalui optimalisasi layanan informasi kepada pengguna. Hal ini penting mengingat kendala utama dalam layanan publik sering kali berasal dari ketidakpahaman pengguna terhadap prosedur dan persyaratan, yang berujung pada konsultasi berulang dan memperlambat proses perizinan.	-	31 Des 2026	Y	O46	Kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat kurang optimal

Berdasarkan matriks rekomendasi, pada indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta tidak terdapat kendala/permasalahan yang signifikan pada



periode pelaporan. Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui optimalisasi layanan informasi kepada pengguna. Penguatan layanan informasi ini menjadi penting karena kendala yang sering muncul dalam layanan publik umumnya bersumber dari ketidakpahaman pengguna terhadap prosedur dan persyaratan, yang dapat berujung pada konsultasi berulang serta memperlambat proses perizinan. Oleh karena itu, fokus perbaikan diarahkan pada penyediaan informasi yang lebih jelas, mudah diakses, dan konsisten agar proses layanan menjadi lebih efektif dan pengalaman pengguna semakin baik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja Kepala BBPOM Jakarta pada tahun berjalan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis serta target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya kinerja secara optimal.

Program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian pernyataan kinerja Kepala BBPOM Jakarta adalah penguatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan akses informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat secara responsif berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat dan capaian Indeks Pelayanan Publik.

Monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkala memastikan setiap pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan target kinerja pimpinan. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyempurnaan program/kegiatan, sehingga kualitas pelayanan publik



dapat dipertahankan pada kategori pelayanan prima dan mendukung keberlanjutan pencapaian pernyataan kinerja Kepala BBPOM Jakarta.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 75 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,7	4,94	105,11 %	577.890.000	577.521.837	99,94 %	**1,05**	**0,05**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,05 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran " Efisien".

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Pelayanan Publik, diperoleh capaian tingkat efisiensi sebesar 100% dengan kategori "Efisien". Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya, sepenuhnya sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai dengan nilai Indeks Pelayanan Publik berada pada kategori sangat baik.

Tingkat efisiensi yang sudah optimal terutama dipengaruhi oleh metode pelayanan publik yang masih didominasi oleh layanan tatap muka. Pola pelayanan tersebut memerlukan dukungan sumber daya yang relatif besar, seperti kebutuhan petugas layanan, ruang pelayanan, serta biaya operasional, dibandingkan dengan metode pelayanan berbasis digital. Selain itu, proses pengaduan dan pengumpulan umpan balik kepuasan masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi turut meningkatkan penggunaan sumber daya.

Meskipun demikian, capaian Indeks Pelayanan Publik yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah terjaga dengan baik. Informasi hasil pengukuran efisiensi ini menjadi dasar untuk melakukan penajaman strategi ke depan, antara lain melalui optimalisasi layanan digital, penyederhanaan alur pelayanan, serta penguatan integrasi sistem pelayanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan



efisiensi penggunaan sumber daya dapat meningkat pada periode berikutnya tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

BBPOM Jakarta memanfaatkan informasi kinerja dari indeks pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan, melalui beberapa langkah strategis:

1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan
   Aktivitas operasional disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sehingga program dan layanan lebih tepat sasaran dan selaras dengan target yang telah ditetapka

2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran
   Alokasi anggaran disesuaikan sesuai prioritas kebutuhan layanan publik, memastikan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai target kinerja.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
   Capaian kinerja dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun area yang perlu perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi atau rencana aksi kinerja.

4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya
   Informasi kinerja menjadi dasar revisi rencana dan indikator kinerja untuk

periode berikutnya, sehingga target lebih realistis, relevan, dan berorientasi hasil.

Dengan pemanfaatan informasi kinerja secara sistematis, BBPOM Jakarta dapat meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas anggaran, dan akuntabilitas organisasi secara berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 08

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

25. NILAI PEMBANGUNAN ZI BBPOM DI JAKARTA

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan unit pelaksana teknis BPOM yang berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan BPOM. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen untuk menerapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Pembangunan zona integritas BBPOM di Jakarta dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta surat edaran Kepala BPOM Nomor 1 tahun 2025 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025.



Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Jakarta telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020 dan berupaya untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Predikat tersebut didasarkan pada pemenuhan persyaratan aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, nilai survei persepsi kepuasan pelayanan dan anti korupsi (SPAK), capaian kinerja yang lebih baik serta nilai persepsi kualitas pelayanan (SPKP) turut mempengaruhi perolehan predikat tersebut. Penilaian zona integritas dilaksanakan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melalui evaluasi lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI). Hasil evaluasi pelaksanaan PMZI BBPOM di Jakarta adalah sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,66	4,00	7,66	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,56	3,50	6,06	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,65	5,00	8,65	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,58	4,14	8,72	**MS**



PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,13	7,50	13,63	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,68	5,00	9,68	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**54,40**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,19	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			17,02	**MS**
TOTAL HASIL						**39,21**	
NILAI PMPZI						**93,61**	

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	93,5	93,61	100,21	Sangat Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BBPOM Jakarta pada periode tahun 2025, yang sebelumnya ditetapkan target kinerja sebesar 93,5 persen, BBPOM Jakarta menghasilkan realisasi kinerja yang dicapai sebesar 93,61 persen. Perbandingan antara target dan realisasi tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,21 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja BBPOM Jakarta tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target kinerja secara kuantitatif. Dengan capaian tersebut, kinerja BBPOM Jakarta pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Baik”, mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal.



Dalam konteks penguatan reformasi birokrasi, capaian kinerja BBPOM Jakarta tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari berbagai inovasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik yang secara berkelanjutan diarahkan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga pada perbaikan proses bisnis internal, transparansi pengelolaan kinerja, serta penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi hasil. Upaya ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mendorong tercapainya kinerja organisasi yang optimal dan berkelanjutan.

Dari perspektif perencanaan kinerja, capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa penetapan target tahun 2025 telah dilakukan secara realistis, terukur, dan berbasis pada kapasitas organisasi, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan sumber daya yang tersedia. Dari sisi implementasi, keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang mampu mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini.

Lebih lanjut, capaian kinerja yang melampaui target juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas fungsi dan efektivitas tata kelola internal BBPOM Jakarta telah berjalan dengan baik. Kompleksitas tugas BBPOM Jakarta sebagai UPT dengan volume dan ragam kegiatan yang tinggi dapat dikelola secara optimal melalui pembagian peran yang jelas, penguatan fungsi pengendalian internal, serta dukungan kepemimpinan yang mendorong budaya kerja berorientasi hasil. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap tercapainya kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dari sudut pandang akuntabilitas kinerja, capaian sebesar 100,21 persen memberikan sinyal bahwa BBPOM Jakarta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian



kinerja. Meskipun secara nominal capaian kinerja telah melampaui target, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberhasilan tersebut harus terus diiringi dengan peningkatan kualitas *outcome* dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,41	93,50	93,01	93,61	101,75	100,12

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja BBPOM Jakarta antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan dinamika kinerja yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, target kinerja sebesar 91,41 persen berhasil direalisasikan sebesar 93,01 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,75 persen. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kinerja organisasi melampaui target sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Memasuki tahun 2025, BBPOM Jakarta menetapkan target kinerja sebesar 93,5 persen dan berhasil merealisasikan kinerja sebesar 93,61 persen, sehingga mencapai capaian kinerja sebesar 100,21 persen dengan kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dari kinerja tahun 2024 telah dimanfaatkan secara efektif dalam penyusunan target dan pelaksanaan kinerja tahun 2025. Selisih antara target dan realisasi pada periode tersebut mencerminkan meningkatnya akurasi perencanaan kinerja serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kinerja organisasi berada pada level yang stabil, terukur, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja antara untuk Indikator Nilai ZI pada tahun 2024-2025 tahun tersebut tidak menunjukkan penurunan kinerja, melainkan menggambarkan pergeseran dari fase akselerasi kinerja menuju fase pemantapan kualitas dan konsistensi kinerja. Keberhasilan tahun 2024 menjadi



landasan bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada tahun 2025 sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi, sehingga mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan keberlanjutan capaian kinerja BBPOM Jakarta

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	95	93,61	-	100,12	98,54	Akan Tercapai

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	95	93,61	-	100,12	98,54	Akan Tercapai

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Renstra menunjukkan tren kinerja BBPOM Jakarta yang positif dan berada pada jalur pencapaian sasaran strategis. Pada tahun 2025, ditetapkan target kinerja sebesar 93,5 persen dan berhasil dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100,12 persen, yang mencerminkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target tahunan. Capaian ini menjadi indikator awal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan jangka menengah.



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 95 persen, capaian kinerja tahun 2025 telah berada di atas target tahunan dan mendekati target akhir Renstra. Proyeksi capaian kinerja tahun 2029 sebesar 98,54 persen menunjukkan bahwa, dengan mempertahankan konsistensi kinerja dan penguatan kualitas pelaksanaan program, BBPOM Jakarta memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra telah diimplementasikan secara efektif.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa realisasi kinerja berada dalam kategori “akan tercapai”. Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi pencapaian target Renstra tahun 2029, dengan catatan bahwa konsistensi pelaksanaan, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, serta penguatan inovasi dan tata kelola kinerja terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran strategis BBPOM Jakarta dalam dokumen Renstra dinilai realistis dan terukur.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain.



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	93,50	90,00	90,00	85,73
Realisasi	93,61	90,21	90,28	87,92
Capaian (%)	100,12	100,23	100,31	102,55

Perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Zona Integritas (ZI) tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh BBPOM yang dibandingkan berhasil memenuhi

bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan, mencerminkan penguatan implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit kerja. BBPOM Jakarta menetapkan target sebesar 93,5 persen dan berhasil merealisasikan kinerja sebesar 93,61 persen, sehingga mencapai capaian kinerja sebesar 100,21 persen. Capaian ini menempatkan BBPOM Jakarta pada kategori sangat baik, sekaligus menunjukkan konsistensi pelaksanaan program penguatan integritas dan pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, BBPOM Padang dan BBPOM Yogyakarta menetapkan target yang relatif sama, yaitu 90 persen, dengan realisasi masing-masing sebesar 90,21 persen dan 90,28 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,23 persen dan 100,31 persen. Sementara itu, BBPOM Medan menetapkan target yang lebih rendah, yaitu 85,73 persen, namun mampu merealisasikan kinerja sebesar 87,92 persen, sehingga mencapai capaian kinerja tertinggi di antara keempat unit, yaitu 102,55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target awal berbeda, seluruh unit kerja mampu mengelola pelaksanaan kinerja ZI secara efektif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ZI tahun 2025 menunjukkan bahwa BBPOM Jakarta berada pada kelompok unit kerja dengan kinerja ZI yang sangat baik dan kompetitif dibandingkan UPT lainnya. Perbedaan capaian antar unit lebih mencerminkan variasi dalam penetapan target dan konteks masing-masing wilayah, bukan perbedaan kualitas komitmen terhadap pembangunan ZI. Hasil ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk saling berbagi praktik baik (best practices) antar BBPOM guna memperkuat konsistensi dan kualitas implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).



Keberhasilan pencapaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas BBPOM Jakarta pada tahun 2025 melampaui target dan berada pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini disebabkan oleh:

a. Adanya mekanisme penentuan anggota tim pembangunan zona integritas
b. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas
c. Adanya penetapan inovasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BBPOM di Jakarta. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 23 inovasi eksternal dan 20 inovasi internal.
d. Sebagian besar inovasi yang telah memiliki SOP
e. Memiliki inovasi dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, yaitu inovasi IKAN TELAT
f. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
g. Pemberian *reward* dan *punishment* mempertimbangkan capaian kerja
h. Telah ditetapkan kebijakan *whistle blowing system*
i. Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan serta kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar
j. Hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi kepuasan pelayanan dan anti korupsi (SPAK) berada di atas persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Kementrian PANRB
k. Konsistensi implementasi reformasi birokrasi yang terintegrasi antara aspek tata kelola, manajemen kinerja, dan akuntabilitas.
l. Komitmen pimpinan dalam mengawal pembangunan ZI, diperkuat dengan peran aktif tim ZI dan agen perubahan, telah mendorong internalisasi nilai integritas dan pelayanan prima secara berkelanjutan.
m. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi proses layanan, serta pemanfaatan inovasi berbasis digital dalam pelayanan dan pengawasan



n. Keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan secara terarah dan berbasis bukti faktual.

Meskipun target telah tercapai, upaya penyempurnaan kinerja tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas capaian di masa mendatang. Peningkatan kualitas capaian tersebut antara lain dilaksanakan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan mekanisme dalam penentuan anggota tim pembangunan zona integritas sesuai kriteria dan mendokumentasikan setiap alurnya
b. Mendokumentasikan arahan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas
c. Menyusun SOP pelaksanaan dari setiap inovasi yang ditetapkan
d. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dengan mencantumkan secara rinci identifikasi kendala yang dihadapi, analisis penyebab, rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut yang jelas dan terukur pada setiap hasil rapat pembahasan.
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penempatan pegawai baru maupun pegawai hasil mutasi internal, dengan mengaitkan pada capaian dan peningkatan kinerja bagi personal dan unit kerja
f. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak sebelum dan sesudah penerapan inovasi, serta menginformasikan tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi periode sebelumnya
g. Menyusun kertas kerja dalam implementasi pemberian *reward and punishment* sesuai kriteria yang ditetapkan unit kerja
h. Melakukan minitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala, dengan mencantunkan secara rinci identifikasi kendala yang



dihadapi, analisis penyebab, rencana tindak lanjut, dan pelaksanaan tindak lanjut dari periode sebelumnya

i. Menyempurnakan *whistle blowing system*, termasuk menampahkan mekanisme penelusuran laporan kepada inspektorat utama
j. Menyusun kertas kerja yang jelas dan sesuai kriteria sebagai dasar dalam menetapkan pemberian penghargaan/sanksi/kompensasi dan melengkapi bukti implementasinya
k. Melaksanakan *continues improvement* dan meningkatkan kualitas dalam pembangunan ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima.

Selain itu, perbaikan kinerja juga dilakukan dalam menghadapi peningkatan standar penilaian WBK/WBBM yang semakin menekankan aspek dampak dan keberlanjutan inovasi. Ke depan, BBPOM Jakarta perlu memperkuat konsistensi internalisasi budaya integritas di seluruh lini organisasi, meningkatkan kualitas dan replikasi inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan langkah perbaikan tersebut, capaian kinerja ZI tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara berkelanjutan menuju predikat WBBM.



Tabel 3. 76 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	Lemahnya pendokumentasian, monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja	Perbaikan proses dokumentasi, monitoring, evaluasi serta pemenuhan saran perbaikan pembangunan ZI dari inspektorat utama	kegiatan kelompok kerja didokumentasikan dengan baik, monev kegiatan kelompok kerja dilakukan secara komprehensif	Triwulan I–II 2026: Reviu rencana aksi ZI dan pemutakhiran eviden pendukung.	Y	O-53	Menurunnya atau stagnannya Nilai Pembangunan Zona Integritas BBPOM Jakarta akibat tidak optimalnya keberlanjutan implementasi reformasi birokrasi, inovasi layanan, dan internalisasi budaya integritas.
	Tingginya kompleksitas tugas dan beban layanan BBPOM Jakarta yang berpotensi mengalihkan fokus pada penguatan dan implementasi pembangunan ZI.	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Nilai Pembangunan ZI ke depan agar dapat melakukan penguatan internalisasi nilai integritas dan budaya pelayanan melalui pembinaan berkelanjutan serta peningkatan kualitas inovasi layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.	Melakukan reviu berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI.	Triwulan III 2026: Penguatan inovasi layanan dan internalisasi budaya integritas.			

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mengembangkan dan mendokumentasikan inovasi pelayanan serta best practices.	Triwulan IV 2026: Evaluasi capaian ZI dan penyempurnaan strategi menuju WBBM.			
			Memperkuat peran agen perubahan dan tim ZI dalam pengawalan implementasi WBK/WBBM.				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian keberhasilan kinerja pembangunan zona integritas melampaui target yang ditetapkan didukung beberapa program/kegiatan, antara lain:

1. Terlaksananya rencana aksi agen perubahan yang menekankan pada *core values* ASN BerAKHLAK dengan mengangkat tema “BPOM menuju World Class Bureucracy” dengan mengoptimalkan digitalisasi serta berdampak pada UMKM
2. Komunikasi internal setiap minggu terkait implementasi zona integritas
3. Program peningkatan awareness dan peningkatan implementasi zona integritas, seperti kegiatan sinergi dengan Jak Officer pada 26 November 2025
4. Kegiatan pembelajaran bersama PPPOMN dan UPT BPOM terkait digitalisasi laboratorium



5. Implementasi sistem manajemen mutu secara konsisten, yaitu ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001: 2027

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 77 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	93,61	100,12%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Pencapaian tingkat efisiensi sebesar 100% mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya organisasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja Zona Integritas (ZI) di Balai Besar POM di Jakarta dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, serta pelayanan publik di wilayah Jakarta.

26. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja
d. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks BBPOM di Jakarta, implementasi SAKIP Tahun 2025 mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang sistematis dan berkesinambungan.
e. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;

(2) Pengukuran Kinerja;

(3) Pelaporan Kinerja;

(4) Evaluasi Kinerja Internal;



(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.



No	Predikat	Nilai	Interpretasi
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	83,52	81,33	97,38	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja SAKIP pada Periode Tahun 2025, BBPOM di Jakarta menetapkan target kinerja sebesar **83,52 persen**. Dari target tersebut,



realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar **81,33 persen**, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar **97,38 persen**. Capaian ini menempatkan kinerja SAKIP BBPOM di Jakarta dalam **kategori "Baik"**, yang menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan manajemen kinerja telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara target dan realisasi yang terjadi, yaitu selisih sebesar negatif **2,19 persen**, menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kinerja pada beberapa aspek tertentu. Namun demikian, selisih tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan tidak secara signifikan menurunkan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan. Tingkat capaian sebesar 97,38 persen mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Capaian kinerja SAKIP BBPOM di Jakarta Tahun 2025 juga mencerminkan keselarasan yang relatif baik antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang digunakan telah mampu menggambarkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan baik pada aspek pre-market maupun post-market. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme cascading kinerja dari tingkat organisasi hingga unit kerja telah berjalan dengan cukup efektif.

Meskipun demikian, belum tercapainya target secara penuh mengindikasikan adanya ruang perbaikan, terutama dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi realisasi kinerja antara lain dinamika perubahan kebijakan, kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan program, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja berbasis SAKIP.

Dari sisi akuntabilitas, capaian SAKIP kategori "Baik" menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta telah mampu menyajikan informasi kinerja yang andal dan



dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja yang disusun telah mencerminkan keterkaitan yang jelas antara anggaran, program, kegiatan, dan hasil yang dicapai. Hal ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terhadap kinerja organisasi.

Ke depan, hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 ini dapat dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Upaya peningkatan kualitas SAKIP dapat difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis *outcome*, penyempurnaan indikator kinerja serta peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai bahan pengambilan keputusan manajerial juga perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi SAKIP BBPOM di Jakarta Tahun 2025 menunjukkan kinerja organisasi yang solid dan terkelola dengan baik. Dengan capaian sebesar 97,38 persen dan kategori “Baik”, BBPOM di Jakarta telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif. Namun demikian, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar pada periode berikutnya target kinerja dapat dicapai secara optimal dan kualitas SAKIP dapat meningkat ke kategori yang lebih tinggi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai AKIP UPT BPOM	83,66	83,52	83,02	81,33	99,23	97,38

Analisis perbandingan kinerja pada tahun 2024-2025 esensial untuk melihat tren pencapaian kinerja, konsistensi perencanaan, serta efektivitas implementasi manajemen kinerja dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, perbandingan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kinerja SAKIP BBPOM di Jakarta. Dari sisi **target nilai AKIP UPT**, pada



Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **83,66**, sedangkan pada Tahun 2025 target tersebut mengalami penurunan menjadi **83,52**. Penurunan target ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dan strategi perencanaan kinerja yang lebih realistis dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, kompleksitas tugas, serta tantangan operasional yang dihadapi BBPOM di Jakarta. Penetapan target yang lebih rendah pada Tahun 2025 dapat diinterpretasikan sebagai upaya organisasi untuk menjaga kualitas pencapaian kinerja agar tetap berada pada kategori "Baik" dengan fokus pada pemantapan proses dan kualitas implementasi SAKIP.

Dari aspek **realisasi kinerja**, terdapat penurunan dari **83,02 pada Tahun 2024** menjadi **81,33 pada Tahun 2025**. Penurunan realisasi ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025. Faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kondisi tersebut antara lain peningkatan kompleksitas pengawasan obat dan makanan, dinamika kebijakan nasional, keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan kualitas kinerja yang harus dipenuhi oleh BBPOM di Jakarta.

Meskipun realisasi kinerja mengalami penurunan, perlu dicermati bahwa **penurunan tersebut masih sejalan dengan penyesuaian target kinerja** yang juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa secara perencanaan, BBPOM di Jakarta telah melakukan antisipasi terhadap potensi tantangan dengan menetapkan target yang lebih moderat. Dengan demikian, realisasi kinerja Tahun 2025 masih mencerminkan kinerja organisasi yang relatif stabil dan terkelola dengan baik.

Jika dilihat dari **capaian kinerja**, pada Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar **99,23 persen**, sedangkan pada Tahun 2025 capaian kinerja menurun menjadi **97,38 persen**. Penurunan capaian sebesar **1,85 persen** ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan target kinerja pada Tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, capaian kinerja Tahun 2025 yang mendekati 100 persen tetap menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.



Perbandingan capaian kinerja pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa **efektivitas pencapaian target pada Tahun 2024 lebih optimal** dibandingkan Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsistensi pelaksanaan program, tingkat kematangan implementasi SAKIP, serta kondisi eksternal yang relatif lebih mendukung pada Tahun 2024. Sementara itu, pada Tahun 2025, meskipun kinerja masih berada pada kategori "Baik", terdapat indikasi perlunya penguatan pada aspek perencanaan berbasis *outcome* dan pengendalian pelaksanaan kinerja.

Secara keseluruhan, tren kinerja SAKIP BBPOM di Jakarta dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 menunjukkan **penurunan tipis namun terkendali** pada target, realisasi, dan capaian kinerja. Kondisi ini tidak dapat diartikan sebagai penurunan kinerja yang signifikan, melainkan sebagai sinyal awal perlunya strategi perbaikan berkelanjutan. Konsistensi capaian yang tetap berada di atas 97 persen menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan efektif, meskipun menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Hasil perbandingan ini menjadi dasar penting bagi BBPOM di Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SAKIP. Fokus perbaikan ke depan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara indikator kinerja dan *outcome* strategis, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara periodik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar pengambilan keputusan strategis juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Jakarta telah menunjukkan **kinerja SAKIP yang konsisten dan akuntabel**. Meskipun terjadi penurunan nilai pada beberapa indikator, kinerja organisasi secara keseluruhan masih berada pada jalur yang positif. Melalui komitmen perbaikan berkelanjutan dan penguatan manajemen kinerja, BBPOM di Jakarta diharapkan mampu meningkatkan capaian SAKIP pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih optimal.



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	95	93,61	-	100,12	98,54	Akan Tercapai

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkelanjutan. Perbandingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penguatan manajemen kinerja, tata kelola, dan akuntabilitas yang direncanakan dalam Renstra SAKIP telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra yang telah diperbarui melalui mekanisme Reviu Renstra dan/atau Evaluasi Renstra, ditetapkan bahwa **target jangka menengah nilai SAKIP pada Tahun 2029 adalah sebesar 84,52 persen**. Sementara itu, hasil pengukuran menunjukkan bahwa **realisasi kinerja SAKIP sampai dengan tahun bersangkutan telah mencapai 96,23 persen**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja SAKIP telah melampaui target jangka menengah Renstra, sehingga status pencapaian kinerja SAKIP dikategorikan **"akan tercapai"**.

Realisasi nilai SAKIP yang lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah mengindikasikan bahwa pelaksanaan komponen-komponen SAKIP, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja, telah berjalan secara efektif dan konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja yang dibangun telah mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan siklus manajemen kinerja instansi.



Capaian ini juga menunjukkan bahwa strategi penguatan SAKIP yang dirumuskan dalam Renstra telah diimplementasikan secara optimal. Upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada *outcome*, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan kinerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP. Dengan demikian, realisasi kinerja SAKIP yang melampaui target jangka menengah tidak bersifat insidental, melainkan merupakan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun realisasi kinerja SAKIP telah melampaui target jangka menengah Renstra, kategori pencapaian “akan tercapai” perlu dimaknai sebagai sinyal positif sekaligus tantangan. Dari sisi positif, capaian ini menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik. Namun, dari sisi tantangan, kondisi ini menuntut organisasi untuk menjaga konsistensi dan kualitas implementasi SAKIP agar capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir periode Renstra.

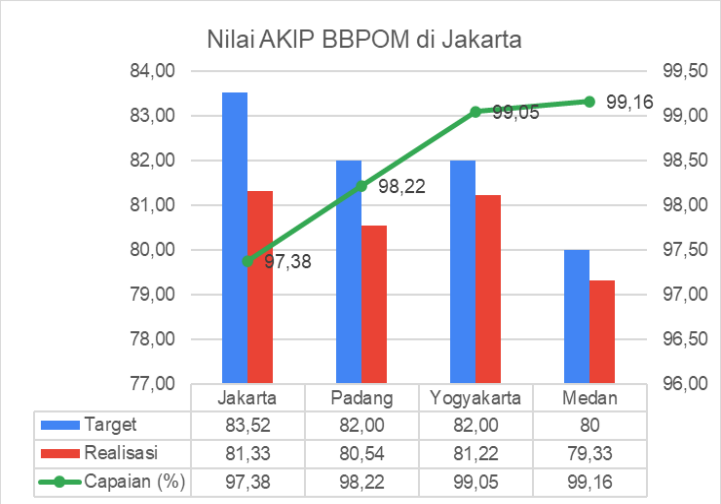
Selain itu, capaian realisasi SAKIP yang lebih tinggi dari target jangka menengah juga menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan target Renstra itu sendiri. Hal ini membuka ruang untuk melakukan penajaman kembali terhadap target dan strategi SAKIP, khususnya agar target yang ditetapkan mampu mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara lebih progresif dan berorientasi pada dampak. Dengan demikian, Renstra SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja **SAKIP** sampai dengan tahun berjalan sebesar **96,23 persen** dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2029 sebesar **84,52 persen** menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada BBPOM di Jakarta telah berjalan sangat baik dan berada di atas ekspektasi perencanaan jangka menengah. Status pencapaian “akan tercapai” menegaskan bahwa penguatan sistem akuntabilitas kinerja telah berada pada jalur yang tepat, dengan catatan tetap diperlukan upaya pengendalian dan



peningkatan kualitas SAKIP secara berkelanjutan agar capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
Target	83,52	82,00	82,00	80
Realisasi	81,33	80,54	81,22	79,33
Capaian (%)	97,38	98,22	99,05	99,16

Perbandingan kinerja AKIP antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan instrumen penting dalam menilai konsistensi implementasi SAKIP, tingkat efektivitas manajemen kinerja, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan. Analisis ini juga memberikan gambaran posisi relatif BBPOM Jakarta dibandingkan dengan UPT lain yang memiliki karakteristik dan tantangan wilayah yang berbeda, khususnya BBPOM di Padang, Yogyakarta, dan Medan pada Tahun 2025.

Dari sisi **penetapan target nilai AKIP Tahun 2025**, BBPOM di Padang dan BBPOM di Yogyakarta masing-masing menetapkan target sebesar **82 persen**, sedangkan BBPOM di Medan menetapkan target yang lebih rendah, yaitu **80 persen**. Perbedaan penetapan target ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi perencanaan kinerja yang mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, tingkat kematangan implementasi SAKIP, serta kapasitas sumber daya dan kompleksitas pelaksanaan kinerja pada masing-masing UPT.

Pada aspek **realisasi nilai AKIP**, BBPOM di Padang berhasil mencapai realisasi sebesar **80,54 persen**, BBPOM di Yogyakarta mencapai **81,22 persen**, dan BBPOM di Medan mencapai **79,33 persen**. Realisasi tersebut menunjukkan

bahwa seluruh UPT mampu mendekati target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat variasi capaian absolut antar UPT. BBPOM di Yogyakarta mencatat realisasi tertinggi di antara ketiganya, yang mengindikasikan pelaksanaan SAKIP yang relatif lebih optimal pada tahun berjalan.

Meskipun realisasi nilai AKIP masing-masing UPT belum sepenuhnya mencapai target secara absolut, hasil penghitungan **capaian kinerja AKIP** menunjukkan tingkat efektivitas pencapaian yang sangat baik. BBPOM di Padang mencatat capaian sebesar **98,22 persen**, BBPOM di Yogyakarta sebesar **99,05 persen**, dan BBPOM di Medan bahkan mencapai **99,16 persen**. Tingginya persentase capaian ini menunjukkan bahwa selisih antara target dan realisasi berada pada tingkat yang sangat minimal dan masih dalam batas toleransi kinerja yang baik.

Jika dianalisis lebih lanjut, capaian kinerja yang mendekati 100 persen pada ketiga UPT menunjukkan bahwa **penetapan target AKIP telah dilakukan secara realistis dan terukur**, serta didukung oleh pelaksanaan SAKIP yang konsisten. BBPOM di Medan, meskipun memiliki target dan realisasi absolut yang paling rendah dibandingkan Padang dan Yogyakarta, justru mencatat capaian kinerja tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian kinerja dan konsistensi pelaksanaan SAKIP di Medan berjalan sangat efektif terhadap target yang ditetapkan.

Sementara itu, BBPOM di Yogyakarta menunjukkan kombinasi yang relatif seimbang antara target, realisasi, dan capaian. Dengan target 82 persen, realisasi 81,22 persen, dan capaian 99,05 persen, BBPOM di Yogyakarta dapat dikatakan memiliki stabilitas kinerja SAKIP yang baik serta tingkat efektivitas pencapaian target yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan kematangan implementasi SAKIP, khususnya dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

BBPOM di Padang juga menunjukkan kinerja SAKIP yang solid dengan capaian 98,22 persen. Meskipun realisasi masih berada di bawah target, selisih yang relatif kecil menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan dengan baik dan memerlukan penguatan minor, terutama pada aspek konsistensi



pelaksanaan dan peningkatan kualitas dokumen SAKIP agar realisasi dapat semakin mendekati target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, perbandingan target, realisasi, dan capaian nilai AKIP Tahun 2025 pada BBPOM di Padang, Yogyakarta, dan Medan menunjukkan bahwa **seluruh UPT berada pada tingkat kinerja SAKIP yang baik dan terkendali**. Tingginya capaian kinerja yang mendekati 100 persen menegaskan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan nilai realisasi secara absolut. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi penguatan benchmarking antar UPT, sehingga praktik baik (best practices) dalam pengelolaan SAKIP dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas di lingkungan BBPOM

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan *timeline* penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja AKIP BBPOM di Jakarta Tahun 2025, ditetapkan target nilai AKIP sebesar **83,53 persen**, sementara realisasi yang dicapai adalah **81,33 persen**, dengan capaian kinerja sebesar **97,38 persen** dan kategori **Baik**. Meskipun capaian kinerja relatif tinggi dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan SAKIP, walaupun jika melihat realisasi nilai AKIP ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja AKIP pada Tahun 2025.

Belum tercapainya target AKIP BBPOM di Jakarta sebesar 100 persen adalah masih perlunya penguatan kualitas implementasi pada beberapa komponen SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja.



Meskipun dokumen perencanaan telah tersedia secara lengkap, keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan *outcome* yang diharapkan belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada penilaian nilai AKIP secara keseluruhan.Selain itu, kompleksitas tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta sebagai UPT dengan cakupan wilayah dan beban kerja yang tinggi turut mempengaruhi konsistensi pelaksanaan SAKIP. Tingginya intensitas kegiatan pengawasan obat dan makanan, baik pada aspek pre-market maupun post-market, berimplikasi pada keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan pendalaman terhadap kualitas dokumen dan proses SAKIP secara menyeluruh.

Faktor lain yang berkontribusi adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara sistematis dalam bentuk perbaikan indikator, penyempurnaan perencanaan, maupun penajaman strategi pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan perbaikan kinerja bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi.Di samping itu, peningkatan standar penilaian AKIP secara nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Penilaian AKIP yang semakin menekankan pada kualitas *outcome* dan dampak kinerja menuntut BBPOM di Jakarta untuk tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menunjukkan bukti kinerja yang lebih substantif. Kondisi

ini menyebabkan nilai realisasi belum sepenuhnya mampu mengejar target yang telah ditetapkan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	Perhitungan target yang ditentukan kembali serta, perubahan dinamis penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kinerja, sehingga mempengaruhi konsistensi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.	Akan dilakukan perbaikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada tahun 2026, dengan cara penguatan pada seluruh komponen SAKIP secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis, penguatan dan pengukuran serta pelaporan, serta optimalisasi evaluasi internal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pelatihan, pendampingan, dan asistensi teknis. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama organisasi. Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan dampak. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja (LKjIP) yang analitis, informatif, dan menggambarkan capaian kinerja secara nyata.Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data kinerja yang akurat dan terintegrasi	**Triwulan I Tahun 2026** Reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja serta indikator AKIP.	**Y**		Keterkaitan antara perencanaan kinerja, indikator kinerja, dan *outcome* belum sepenuhnya kuat pada seluruh unit kerja.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Kualitas implementasi SAKIP belum merata di seluruh unit kerja, khususnya pada aspek keterkaitan antara perencanaan kinerja, indikator kinerja, dan *outcome* yang dihasilkan.Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan penyempurnaan perencanaan kinerja.Peningkatan standar penilaian AKIP nasional yang menuntut bukti kinerja berbasis *outcome* dan dampak belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM.	Melakukan penajaman perencanaan kinerja SAKIP dengan memastikan indikator kinerja lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak.Serta juga menguatkan monitoring dan evaluasi kinerja internal agar hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.	Reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan indikator kinerja) dengan melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dengan fokus pada kualitas *outcome*.	**Triwulan II Tahun 2026**			Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan berikutnya belum optimal.
		Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan dan internalisasi budaya kinerja.	Penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil evaluasi SAKIP. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja dalam pengelolaan dan pengendalian kinerja.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal SAKIP serta penyusunan RTL.			Tingginya beban operasional dan kompleksitas tugas BBPOM Jakarta menyebabkan fokus pada penguatan kualitas SAKIP belum maksimal.
			: Menyempurnakan indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan *outcome* dan mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.				
		Mengadopsi praktik baik (best practices) dari UPT dengan capaian AKIP lebih optimal.		**Triwulan III Tahun 2026**			Peningkatan standar penilaian AKIP yang semakin menekankan kualitas *outcome* dan dampak belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan RTL dan melaporkannya kepada pimpinan. Melakukan evaluasi akhir untuk memastikan efektivitas perbaikan yang telah dilaksanakan.	Implementasi RTL dan peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP. **Triwulan IV Tahun 2026** Evaluasi secara menyeluruh terhadap pengendalian dan pengelolaan kualitas penerapan/implementasi SAKIP untuk pedoman peningkatan di tahun berikutnya			

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja BBPOM di Jakarta, khususnya terkait Nilai Kinerja AKIP Tahun 2025, tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta program kerja dari semua kelompok fungsi di BBPOM jakarta seperti contohnya kegiatan dari Fungsi Pemeriksaan, Infokom, Penindakan, Pengujian dan Tata Usaha. Analisis terhadap program dan kegiatan menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah penguatan perencanaan dan pelaporan kinerja SAKIP. Kegiatan penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja, seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja, telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan manajemen kinerja. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Jakarta mampu menjaga konsistensi antara sasaran



strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan.Program monitoring dan evaluasi kinerja secara internal juga berkontribusi positif terhadap capaian AKIP. Pelaksanaan reviu kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap deviasi kinerja serta mendorong perbaikan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan ini mendukung terciptanya siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam implementasi SAKIP.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 78 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	93,52	81,33	97,38%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74 %	**1,00**	**0,00**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada Tahun 2025, BBPOM di Jakarta memperoleh nilai tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 75 persen. Berdasarkan ketentuan penilaian yang berlaku, capaian tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran berada pada kategori “Tidak Efisien”. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, belum sepenuhnya sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Nilai tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,00 mengindikasikan bahwa secara kuantitatif belum terdapat penghematan anggaran yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian kinerja. Dengan kata lain, capaian kinerja yang diperoleh masih dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif tinggi, sehingga belum menunjukkan adanya efisiensi optimal. Kondisi ini dapat terjadi meskipun capaian kinerja secara umum berada pada kategori “Baik”, yang menunjukkan



bahwa efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek yang berbeda dan perlu dianalisis secara terpisah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah tingginya kompleksitas dan intensitas kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta. Sebagai UPT dengan cakupan wilayah strategis dan volume kegiatan yang tinggi, kebutuhan terhadap dukungan anggaran operasional menjadi relatif besar. Kondisi ini berdampak pada tingginya realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sementara peningkatan capaian kinerja belum sepenuhnya sebanding dengan besaran sumber daya yang digunakan.

Capaian tingkat efisiensi sebesar 75 persen yang dikategorikan “Tidak Efisien” juga menjadi sinyal penting bagi BBPOM di Jakarta untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus menurunkan kualitas kinerja. Upaya peningkatan efisiensi dapat diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis, penguatan perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja BBPOM di Jakarta menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja secara umum berada pada kategori “Baik”, efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal. Nilai tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan capaian 75 persen dan kategori “Tidak Efisien” mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis dan terencana untuk meningkatkan efisiensi pada periode berikutnya. Dengan penguatan integrasi antara perencanaan kinerja dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara optimal, BBPOM



di Jakarta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mencapai kinerja yang optimal.

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja yang dihasilkan melalui laporan kinerja merupakan elemen penting dalam mewujudkan manajemen kinerja yang efektif dan berorientasi pada hasil. Informasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam konteks BBPOM di Jakarta, pemanfaatan informasi kinerja telah digunakan sebagai instrumen utama dalam melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan untuk memastikan pencapaian kinerja yang lebih optimal.

JIka melihat pada penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja, maka Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja serta kegiatan yang kurang berdampak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, BBPOM di Jakarta melakukan penyesuaian aktivitas dan kegiatan, antara lain dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada aspek yang memiliki korelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang dinilai kurang efektif dievaluasi dan disederhanakan, sementara kegiatan yang terbukti mendukung pencapaian kinerja diperkuat dan dioptimalkan. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tanpa menambah beban sumber daya secara signifikan.

Pemanfaatan informasi kinerja juga berdampak pada penyesuaian penggunaan anggaran. Hasil analisis kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian *outcome*. Informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Dengan



demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan input, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, termasuk dalam menilai sejauh mana rekomendasi dan rencana aksi kinerja telah dilaksanakan. Informasi kinerja digunakan untuk memantau progres tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi, sehingga memastikan bahwa perbaikan kinerja dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting bagi pimpinan dalam menentukan langkah-langkah korektif dan preventif untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

Pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja juga berdampak pada penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Informasi mengenai capaian indikator kinerja dan tantangan pelaksanaan kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan, termasuk rencana perubahan indikator kinerja. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada *outcome*. Dengan demikian, perencanaan kinerja pada periode berikutnya diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi riil dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja BBPOM di Jakarta telah memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk pencapaian kinerja berikutnya. Informasi kinerja tidak hanya digunakan sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, evaluasi keberhasilan kinerja, dan penyempurnaan perencanaan kinerja. Dengan pemanfaatan informasi kinerja yang semakin



optimal, BBPOM di Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas pada periode berikutnya.

27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 7 (Tujuh) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

   1. Revisi DIPA (bobot 10%)
   2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
   3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
   4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
   5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
   6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
   7. Capaian *Output* (bobot 25%)

   sedangkan 1 indikator lain yaitu : indikator dispensasi SPM merupakan indikator pengurang nilai IKPA

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

   1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)



2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

f. Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	5	5	100	Sangat Baik	

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2025 adalah 99,42 diperoleh dari nilai IKPA 98,84 dan nilai EKA 100,00. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu target 5 (capaian 90,01 s.d. 100) dengan kategori sangat baik

Capaian nilai kinerja anggaran sebesar tersebut mencerminkan kinerja anggaran BBPOM di Jakarta Tahun 2025 telah efektif dalam pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara.



Tingginya nilai IKPA menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara konsisten sesuai perencanaan, baik dari aspek penyerapan anggaran, ketepatan waktu, maupun kepatuhan administrasi. Sementara itu, nilai EKA yang juga berada pada kategori sangat baik mencerminkan bahwa anggaran yang digunakan telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pencapaian kinerja, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi sebagaimana tercermin dalam analisis efisiensi sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sangat baik dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi.

b. Perbandingan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,9	5,00	91,59	5	101,88	100,00

Berdasarkan informasi tabel diperoleh bahwa terdapat perubahan penetapan nilai NKA dimana nilai yang diperoleh dikonversikan menjadi kategori capaian dengan rentang nilai tertentu.

BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut terwujud sebagai hasil dari peningkatan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan tercapainya nilai 100 untuk 6 indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lainnya

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)



Nama IKU		Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
		2025	2029	2025	2029	2025	2029	
1.4	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,52	84,52	81,33	-	97,38	96,23	Akan Tercapai

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di BBPOM di Jakarta dapat mencapai target yang ada pada Renstra BPOM maupun target dalam perjanjian kinerja menandakan bahwa tingkat kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di BBPOM di Jakarta sudah baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Padang, Yogyakarta dan Medan. Kinerja 4 (empat) UPT ini disajikan pada grafik di atas. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa capaian kelima UPT Balai Besar POM di Jakarta, Padang, Yogyakarta dan Medan sama-sama termasuk dalam kategori “sangat baik” yakni capaian 100

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Nilai kinerja anggaran diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA).

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh tujuh indikator pada penilaian IKPA, terdapat 6 (enam) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian *Output*.

Sedangkan 1 (satu) indikator Deviasi Halaman III hanya mencapai nilai 92,26. Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan pada triwulan II, III dan IV terdapat deviasi pada seluruh jenis belanja yang disebabkan rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran. Capaian indikator ini tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator, dengan kata lain capaian ini juga dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen). Contohnya pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat (anggota DPR) yang tidak sesuai jadwal perencanaan dan belanja modal yang tidak dapat terealisasi di bulan juni 2025 dikarenakan keterlambatan penyedia alat laboratorium

Pada penilaian EKA, indikator penggunaan SBK dan indikator capaian *output* mendapat nilai 100

Tabel 3. 79 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	Tujuh indikator pada penilaian IKPA, terdapat 6 (enam) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian *Output*. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Deviasi Halaman III dengan nilai 92,26 dan sebagaimana penjelasan berikut: Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan pada triwulan II terdapat deviasi sebesar 26,52% pada seluruh jenis belanja yang disebabkan rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan belanja alat aboratorium yang pada mulanya dijadwalkan pada triwulan II baru bisa dilaksanakan secara intensif di triwulan III	- Melaksanakan pengawasan sesuai perencanaan penarikan dana dari awal tahun - Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran	- rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi *output*, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan. - Revisi halaman III DIPA sesuai jadwal - Pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan	**2026** **Triwulan I** Reviu perencanaan kinerja dan pemutakhiran RPD Triwulan II **Triwulan II** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal perencanaan dan pelaksanaan kinerja beserta nilai realisasi anggaran TW I dan II pemutakhiran RPD TW III **Triwulan III** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal perencanaan dan pelaksanaan kinerja beserta nilai realisasi anggaran TW I, II dan III pemutakhiran RPD TW IV **Triwulan IV**	Y		Keterkaitan antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai Tingginya beban operasional dan kompleksitas tugas BBPOM Jakarta menyebabkan fokus pada perencanaan kegiatan belum maksimal.

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal perencanaan dan pelaksanaan kinerja beserta nilai realisasi anggaran TW I, II dan III			

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain Pengelolaan Keuangan, Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di UPT POM. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi *output*, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal dan pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Kemudian dengan selalu mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai upaya untuk menaikkan realisasi RO (rincian *output*) agar bisa melebihi target tanpa menambah alokasi anggaran.

Tabel 3. 80 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	5	5	100%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74 %	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”.

Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2025. Penggunaan anggaran untuk indikator nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta mencapai 99,74%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.335.799.000 dapat direalisasikan sebesar Rp16.293.704.795. Perhitungan TE menunjukkan angka 1,00 yang tergolong kategori efisien.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut :

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala,
2) Revisi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai *timeline* untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang

h. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, dirumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) sebagai upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun mendatang yaitu:

1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

    a. Segera meneliti dan melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA/POK apabila



terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran anggaran kedalam RO Khusus;

b. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia dan tidak melakukanrevisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap paguyang sudah dikontrakkan. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran;

c. Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja;

d. Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

e. Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III DIPA secara akurat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman padatarget penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran serta memperhatikan momen khusus misalnya pelaksanaan pembayaran gaji 13, kegiatan yang tergantung pada musim, memiliki jadwal tertentu, dsb sebagai prediksi pencairan belanja pada Halaman III DIPA;

f. Memanfaatkan secara optimal pemutakhiran RPD Bulanan melalui revisi Halaman III DIPA sesuai periode yang telah ditentukan;



g. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan Satker segera dilakukan revisi DIPA;

h. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir;

i. Memastikan perubahan kebijakan berdampak minimal pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.

j. Apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir” segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan;

k. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim;

l. Menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) BPOM dengan program Prioritas Nasional dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja strategis BPOM, sehingga dapat meningkatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia;

2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran



(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara;

b. Menetapkan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan anggaran kegiatan paling lambat awal Triwulan II Tahun 2026; Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan dan lain-lain. kegiatan dan lain-lain. lain-lain. keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan dan lain-lain.

3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan;
   b. Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu;
   c. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
   d. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
   e. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;

4. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah



selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran. Apabila terdapat keterlambatan dalam penyesuaian tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan, pejabat perbendaharaan Satker dapat dikenakan teguran/sanksi;

b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;

5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
   b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

7. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);



b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

8. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Menyediakan informasi secara akurat dan *real-time* terhadap pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran antara lain melalui laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik;
   b. Meningkatkan kompetensi pejabat perbendaharaan dan mendorong/mewajibkan pemenuhan syarat sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan.

28. Indeks Manajemen Resiko BBPOM di Jakarta

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan



Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko



4) Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = Skor Total 16

Keterangan:

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Tahun 2025	3,05	2,906	95,41	Baik	

Pada Tahun 2025, Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta ditargetkan sebesar **3,05**, dengan realisasi sebesar **2,906**, sehingga tingkat capaian mencapai **95,41%** dan berada dalam kategori **Baik**.



Secara kuantitatif, terdapat selisih sebesar **0,144 poin** dari target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100%, capaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan efektif dan berada pada tingkat maturitas risk aware

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra)

Nama IKU	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	3,4	2,91	98	95,41	85,47	Akan Tercapai

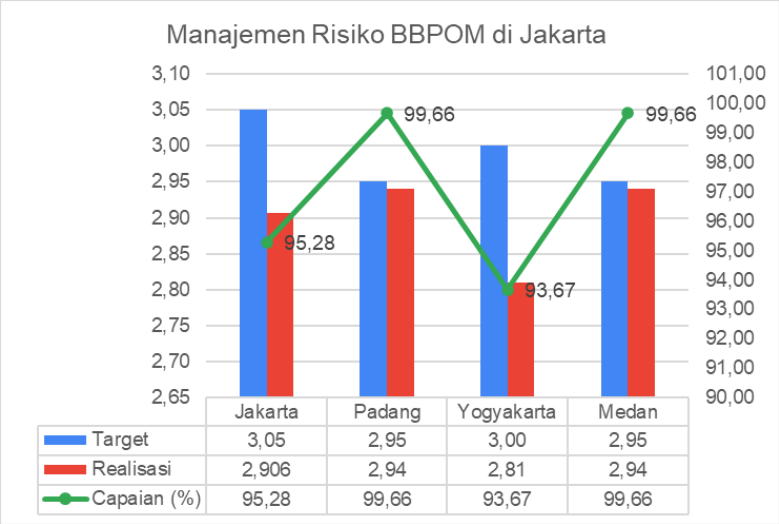
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **3,05**, dengan realisasi sebesar **2,91**, sehingga capaian kinerja mencapai **95,41%**. Berdasarkan kategori yang ditetapkan, indikator ini berada pada posisi **"Akan Tercapai"** dalam perspektif target jangka menengah Renstra

Selisih antara target dan realisasi sebesar **0,14 poin** menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Capaian 95,41% mengindikasikan bahwa sebagian besar komponen sistem manajemen risiko telah diterapkan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi implementasi, kualitas dokumentasi pengendalian, maupun integrasi risiko dalam pengambilan keputusan strategis.

Target Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar **3,40**, sedangkan posisi capaian terhadap target renstra adalah **85,47%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja tahun berjalan cukup baik, masih diperlukan penguatan sistem manajemen risiko agar target akhir periode dapat tercapai secara optimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain





Jika dibandingkan dengan UPT lainnya, capaian **tertinggi** dicapai oleh BBPOM di **Padang dan** BBPOM di **Medan**, masing-masing dengan persentase capaian sebesar **99,66%**. Padang memiliki target 2,95 dengan realisasi 2,94, sedangkan Medan juga memiliki target 2,95 dengan realisasi 2,94. Kedua UPT tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara target dan realisasi, sehingga hampir sepenuhnya memenuhi ekspektasi kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko yang sudah baik.

Sementara itu, capaian **terendah** terdapat pada **Yogyakarta**, dengan persentase capaian sebesar **93,67%** (target 3,00 dan realisasi 2,81). Selisih antara target dan realisasi di Yogyakarta relatif lebih besar dibandingkan UPT lainnya, yang mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek identifikasi risiko, mitigasi, maupun monitoring pengendalian risiko.

Secara komparatif, posisi BBPOM di Jakarta berada di tengah-tengah lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Yogyakarta, namun masih di bawah BBPOM di Padang dan BBPOM di Medan. Meskipun bukan yang tertinggi, perlu dicatat bahwa target Jakarta merupakan yang paling tinggi (3,05), sehingga standar yang harus dicapai juga lebih besar. Dalam konteks ini, capaian 95,41% tetap menunjukkan performa yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai tingkat optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan *timeline* penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Indeks manajemen risiko merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diterapkan pada tahun 2025. Namun, penilaian tingkat maturitas risiko telah dilakukan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan nilai tahun 2024, **nilai maturitas** turun dari 2,938 menjadi 2,906 namun tetap berada pada level *Risk Aware.* Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

a) Belum seluruh pegawai baru telah mengikuti pelatihan manajemen risiko;
b) Tim Manajeme Risiko Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan evaluasi dalam penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register namun kertas kerja penentuan skor risiko belum terdokumentasi;
c) Terdapat risiko inheren dengan level risiko ≥16, namun belum dilakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting;
d) Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko,
e) Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16, namun terdapat ketidaksesuaian antara respon risiko dengan deskripsi tindakan mitigasi,
f) Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal;



g) Belum terdapat cascading untuk indikator indeks manajemen risiko kepada beberapa anggota tim pengelola manajemen risiko sebagaimana tercantum pada SK Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Rekomendasi perbaikan kinerja pengelolaan manajemen risiko

a. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai baru terkait manajemen risiko;
b. Mendokumentasikan kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak;
c. Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level risiko ≥16 dan mendokumentasikan kertas kerja hasil pengujian secara memadai;
d. Melakukan reviu terhadap daftar risiko dan penilaian risiko dan memperbaikinya sesuai dengan catatan kelemahan
e. Melakukan reviu terhadap penentuan respon risiko dan/atau deskripsi tindakan mitigasi pada RTP;
f. Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal;
g. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Manajemen Representatif sebagai pengelola risiko yang tercantum pada SK Tim SPI.



Tabel 3. 81 Matriks Rekomendasi

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal berupa perubahan sumber daya manusia pengelola risiko, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi risiko. Proses identifkasi risiko masih bersifat bottom up. BBPOM di Jakarta belum secara langsung menyerahkan risiko dengan respon risiko > 16 menjadi risiko pimpinan tinggi Madya. Respon risiko yang dipilih masih untuk risiko > 16 adalah share, seharusnya ketika risiko sudah diserahkan ke pimpinan tinggi Madya responnya menjadi Accept. Manajemen risiko belum terintegrasi optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih tebatas pada administratif	Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi risiko secara periodik serta pelaporan tindak lanjut mitigasi. Sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko secara berjenjang Penegasan peran pemiliki risko serta kewajiban pembahasan risiko dalam rapat manajemen.	Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan dampak.	2026	(Risiko ini belum dikelola sebagai risiko pada tahun 2025, namun telah dimasukkan sebagai risiko pada tahun 2026)	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja BBPOM di Jakarta, khususnya terkait Indeks Manajemen Risiko, tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung penguatan Sistem Manajemen Risiko. BBPOM di Jakarta telah memiliki sejumlah program dan kegiatan yang secara struktural mendukung pengelolaan manajemen risiko. Namun, kualitas pelaksanaan dan konsistensi implementasi masih harus ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

Dari sisi keberhasilan, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan. Identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai melalui aplikasi “SIMANIS” namun proses

identifikasi secara bottom up tersebut belum cukup, perlu adanya keterlibatkan pimpinan secara langsung dalam mengidentifikasi risiko, sehingga proses identifikasi bisa berjalan dari semua sudut pandang. Penetapan dan komunikasi selera risiko merupakan langkah strategis yang memperlihatkan adanya komitmen pimpinan dalam membangun tata kelola berbasis risiko.

Namun demikian, beberapa kegiatan belum berjalan optimal sehingga berkontribusi terhadap kegagalan atau belum tercapainya peningkatan pernyataan kinerja. Program peningkatan kapasitas SDM belum menjangkau seluruh pegawai, khususnya pegawai baru, sehingga budaya sadar risiko belum merata. Hal ini menyebabkan kualitas analisis dan pengelolaan risiko belum konsisten di seluruh unit kerja.

Kegiatan dokumentasi dan pengendalian administrasi manajemen risiko juga belum dilaksanakan secara memadai. Tidak terdokumentasinya kertas kerja penentuan skor risiko serta kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko menunjukkan bahwa program penguatan tata kelola belum sepenuhnya efektif. Dampaknya, meskipun kegiatan dilakukan, nilai yang diperoleh dalam penilaian maturitas tidak optimal karena kurangnya eviden pendukung.

Selain itu, kegiatan pengujian efektivitas pengendalian terhadap risiko tinggi belum dilaksanakan secara sistematis. Tanpa pengujian ini, organisasi belum dapat memastikan bahwa pengendalian yang ada benar-benar efektif dalam menurunkan risiko. Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat peningkatan skor maturitas.

Ketidaksinkronan antara analisis risiko dan tindakan mitigasi dalam RTP menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan pengendalian belum sepenuhnya berbasis analisis yang tajam dan terukur. Program penguatan kualitas perumusan respon risiko masih perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan level risiko yang dihadapi.

Di sisi lain, belum adanya mekanisme eskalasi risiko secara formal dan belum dilakukannya cascading indikator indeks manajemen risiko kepada seluruh anggota tim menunjukkan bahwa tata kelola dan akuntabilitas kinerja belum



berjalan optimal. Kegiatan penguatan koordinasi dan pembagian tanggung jawab belum sepenuhnya efektif dalam memastikan bahwa manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama.

Secara keseluruhan, program manajemen risiko telah tersedia dan dijalankan, namun keberhasilannya masih terbatas pada aspek pemenuhan struktur dan proses dasar. Kegagalan atau belum optimalnya pencapaian pernyataan kinerja lebih disebabkan oleh kelemahan pada kualitas implementasi, dokumentasi, pengujian pengendalian, serta tata kelola eskalasi dan akuntabilitas. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, program/kegiatan yang ada sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan capaian kinerja manajemen risiko pada periode berikutnya.

f. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3. 82 Nilai Tingkat Efisiensi

No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	3,05	2,91	95,41 %	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74 %	**1,00**	**0,00**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”.

Dari sisi input (anggaran), pagu yang dialokasikan sebesar **Rp16.335.799.000**, dengan realisasi sebesar **Rp16.293.704.795** atau **99,74%** dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran telah terserap secara optimal.

Namun demikian, jika dibandingkan antara tingkat pencapaian *output* (95,41%) dengan tingkat serapan anggaran (99,74%), terlihat bahwa peningkatan penggunaan anggaran tidak sepenuhnya sebanding dengan capaian kinerja



yang dihasilkan. Indikator efisiensi teknis (TE) tercatat **0,00** dengan capaian TE sebesar **75%** dan dikategorikan **Tidak Efisien**.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun serapan anggaran sangat tinggi, *output* yang dihasilkan belum maksimal sesuai target. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan belum sepenuhnya menghasilkan kinerja yang proporsional. Secara prinsip efisiensi, idealnya capaian *output* minimal sebanding atau lebih tinggi dibandingkan persentase penggunaan input. Dalam kasus ini, input hampir 100%, tetapi *output* masih di bawah target.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi indeks manajemen risiko digunakan untuk mengidentifikasi area lemah dalam penerapan manajemen risiko, seperti aspek dokumentasi, pengujian efektivitas pengendalian, eskalasi risiko dan kompetensi SDM. Hal ini juga menjadi rujukan dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan prioritas penguatan pengendalian risiko.

Indeks Manajemen Risiko menjadi bahan utama dalam forum evaluasi kinerja, baik triwulanan maupun tahunan. Evaluasi tidak hanya melihat nilai akhir indeks, tetapi juga menganalisis setiap risiko yang dapat terjadi dalam setiap proses. Evaluasi juga harus memperhatikan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan

Matrisk rekomendasi yang memuat informasi risiko juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja dan daftar risiko tahun 2026 melalui sapaapip. Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi Indeks Manajemen Risiko harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam siklus manajemen kinerja. Indeks tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan aktivitas, mengoptimalkan anggaran, memperkuat evaluasi, dan menyempurnakan perencanaan kinerja, sehingga BBPOM di Jakarta mampu meningkatkan maturitas manajemen risiko secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif dan akuntabel.



TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	*Timeline*	Data Dukung
A.	*Perencanaan Kinerja*			
a.1	Memastikan penyajian target RKT sesuai dengan dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra.	*Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Tahun 2023 sehingga pada saat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun N sudah disahkan maka dokumen RKT sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dokumen RKT bersifat usulan dan selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024 adalah PK dan RAPK Tahun 2024 dikarenakan RKT Tahun 2024 adalah target yang dirancang pada N-1 hasil kinerja Tahun 2023 dan tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sudah disahkan.*	Desember 2025	1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024
		Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024 dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra disebabkan karena RKT Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Tahun 2023.		2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
		Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebanyak 5 indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu: (1) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, (2) Nilai Pengelolaan Kearsipan, (3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan (5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri		3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024
				4. Dokumen Renstra BBPOM di Jakarta 2020-2024
B.	*Pengukuran Kinerja*			
b.1	Menyempurnakan SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja dengan mekanisme perubahan data kinerja;	*SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01 ,*	Desember 2025	Dokumen SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01
		dilakukan revisi untuk mengatur perubahan data kinerja. Terdapat format BA perubahan data dan sampai dengan bulan Mei 2025 belum terdapat rekap perubahan data kinerja pada link berikut: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpC8BSnmNR_-nuP8vwVb046sdT6ooy4NRVEMAjll_sBCSNKA/viewform		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	*Timeline*	Data Dukung
A.	*Perencanaan Kinerja*			
b.2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	*Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur sesuai dengan dokumen sumber data*	Desember 2025	Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) Tahun 2024 dan 2025
b.3	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim.	*Penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim sudah selaras,* *mencocokkan data RTL dengan sumber dan dengan membuat matriks sandingan dokumen yang dimaksud*	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja 2. Dokumen Laporan Evaluasi Internal 3. Dokumen Laporan pada monev Simetris E-Performance
C.	*Pelaporan Kinerja*			
c.1	Menyampaikan Laporan Kinerja tahunan secara tepat waktu melalui esr.menpan.go.id;	*Laporan Kinerja tahunan telah dilaporkan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id pada tanggal 26 Februari 2025*	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada web esr.menpan.go.id
c.2	Mempublikasikan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta;	*Sudah dilakukan Publikasi Laporan Kinerja Interim pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta*	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada subsite BBPOM di Jakarta
c.3	Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya;	*Laporan Kinerja tahunan telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya pada halaman 75, 82, 89, 97, 103, 112, 119, 125, 134, 140, 146, 151, 158, 163, 168, 173, 178, 185, 190, 195, 201, 206, 212, 227, 234, 240, 251, 257, 263, 269, 276, 282, 287*	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	*Timeline*	Data Dukung
A.	*Perencanaan Kinerja*			
c.4	Menyusun Laporan Kinerja tahunan dengan menyajikan:	Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan:	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024
	1. Matriks tindak lanjut rekomendasi;	1. Matriks tindak lanjut rekomendasi pada halaman 302-317		
	2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja pada halaman 76,84,91,98,104,114,120,127,135,141,146,153,158,164,169,175,180,186,191,196,201,208,213,221,228,235,241,252,259,2564,270,277,283,288		
c.5	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan:	*Laporan Kinerja Interim TW III telah menyajikan:*	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024
	1. Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;	*1. Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja halaman 22-28*		2. Dokumen Laporan Kinerja Interim Tahun 2024 dan 2025
	2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai.	*2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai halaman 51,57,61,68,70,79, 88,92, 96, 104, 109, 113, 118, 125, 131, 137, 142, 147, 152, 158, 165, 176*		
D.	*Evaluasi Internal*			
d.1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP;	*Terlaksanannya pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP dengan mengikuti e-learning Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024*	Desember 2025	Dibuktikan dengan sertifikat Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
d.2	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan:	Laporan Evaluasi Internal telah disusun dengan menyajikan:	Desember 2025	Dokumen Laporan Evaluasi Internal Tahun 2024 dan 2025
	1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya;	1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya;		
	2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai;	2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai;		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	*Timeline*	Data Dukung
A.	*Perencanaan Kinerja*			
	3. Rencana aksi dengan *timeline* yang memadai/memudahkan proses pemantauan/ monitoring sehingga evaluasi internal optimal.	3. Rencana aksi dengan *timeline* yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.		

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Padatnya kegiatan lab Obat (bimtek, uji profisiensi dan sampel yang harus diuji sangat banyak) menyebabkan pemantauan pelaporan SIPTnya ada yang terlewat (namun penyelesaian pengujiannya sesuai *timeline*). Dalam kondisi ini realisasi IKU masih di atas target	1. Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain 2. Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	1. Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	Selesai	Koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT sudah dilakukan dalam bulan berjalan, namun harus tetap dilakukan secara terus menerus	31 Desember 2025	1) Y 2) Y	1) O-6 2) 1 : O-2 2 : O-4	1) Waktu sampling obat yang semakin lama di sarana serta ketersediaan item dan jumlah obat. 2) - Penyelesaian sampel mikrobiologi melewati batas akhir waktu pengujian - Keterlambatan pelaporan atau input data di SIPT
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	1. Kegiatan KIE dilakukan secara daring dalam rangka efisiensi anggaran. Namun, hal ini menyebabkan terkendalanya kegiatan pembuatan akun serta pendampingan peserta dalam pengisian pelaporan ESO melalui platform E-Meso. 2. Mayoritas peserta kegiatan merupakan penanggung jawab kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan,	1. Menyusun dan melaksanakan program KIE terstruktur mulai tahun 2025 yang akan dilanjutkan pada 5 tahun berikutnya yang mencakup pelatihan blended (daring dan luring). 2. Melibatkan dokter dan tenaga klinis lainnya dalam	1. Pada tahun 2026, bimtek farmakovigilans dilakukan secara hybrid. pada undangan, peserta diminta untuk membuat akun sebelum bimtek berdasarkan buku panduan. 2. Pada 2026 Bimtek menyajikan materi tentang mengalirkan data dari dokter yang mendiagnosa kepada petugas input	Selesai		31 Desember 2025	1) Y 2) Y	1) S1 2) S1	1) Sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat (MESO) kepada BPOM. 2) sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		sementara keluhan dari pasien umumnya diterima oleh dokter. Di sisi lain, sistem penanganan farmakovigilans di sarana kefarmasian juga belum matang, sehingga mengakibatkan pelaporan yang tidak optimal	kegiatan KIE, sekaligus membangun panduan dan sistem pendukung farmakovigilans di seluruh jenjang layanan kesehatan untuk meningkatkan partisipasi pelaporan KTD secara merata							(MESO) kepada BPOM
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain 2. Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	1. Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	Selesai	Koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT sudah dilakukan dalam bulan berjalan, namun harus terus dilakukan hingga akhir tahun	31 Desember 2025	1) T 2) Y	1) O-1 2) 1 : O-2 2 : O-4	1) Penyelesaian sampel tidak sesuai dengan metoda 2) - Penyelesaian sampel mikrobiologi melewati batas akhir waktu pengujian. - Keterlambatan pelaporan atau input data di SIPT
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak ada kendala	1. Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain 2. Memperketat pemantauan pengujian dan	1. Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	Selesai	Koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT sudah dilakukan dalam bulan berjalan, namun harus terus	31 Desember 2025	T	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			pelaporan melalui SIPT			dilakukan hingga akhir tahun				
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain 2. Memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	1. Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	Selesai	Sampling sampel IRTP telah diselesaikan pada bulan April 2025	31 Desember 2025	T	-	-
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih ada Sarana yang belum menindaklanjuti	Melakukan pengawasan melekat	Sarana yang belum melakukan tindaklanjut sesuai *timeline* akan dicatat dan untuk pembobotan pengawasan tahun depan akan semakin besar sehingga harus diperiksa awal tahun depan	Selesai	Monitoring dan melakukan reminder	31 Desember 2025	Y	O-22	Sarana menyampaikan CAPA atau data tambahan (hasil inspeksi audit) melewati *timeline* dan tidak sekaligus
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketersediaan anggaran dan tingkat risiko yg telah diindetifikasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi optimal	Selesai	Pemeriksaan sesuai rencana	31 Desember 2025	T	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disesusun sebelumnya	Pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan rencana pelaksanaaan dan penyesuaian realisasi di TW Selanjutnya	Selesai	Pemeriksaan sesuai rencana	31 Desember 2025	T	-	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai pedoman, adanya penugasan tindak lanjut pengawasan dari pusat sehingga pelaksanaan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan	Penyesuaian perencanaan sesuai dengan realisasi	Pelaksanaan pemeriksaan sesuai rencana Dan berkoordinasi dengan pusat	Selesai	Telah sesuai dengan rencana	31 Desember 2025	T	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, kegiatan pengawasan masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun dan akan dikawal untuk tetap mencapai target	Perlu dilakukan monitoring ketat secara berkala untuk memastikan proses pangawasan dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Realisasi telah melebihi target dan sesuai dengan rencana yang telah disusun	Selesai	Telah sesuai dengan rencana	31 Desember 2025	T	-	-
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	Pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana	Selesai	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	31 Desember 2025	T	-	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	Melaksanakan pengawasan sesuai perencanaan awal	Pelaksanaan pengawasan telah sesuai rencana yang disusun	Selesai	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	31 Desember 2025	T	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pembahasan peraturan sudah lebih dari satu tahun, namun pencanangan program AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum bisa dilakukan karena perda belum terbit. Program AMR masih dilakukan secara parsial di masing-masing pengampu, namun pelaksanaan program tersebut tidak komprehensif	Melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala DInas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tang salah satu pasalnya menyebutkan salah satu pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jajarta, setelah Perda keluar dibuatkan surat ederan yang berlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih menyukseskan program pengendalian AMR	Melakukan audiensi lebih lanjut dengan Biro Kerjasama Pemda DKI Jakarta dan Kepala DInas Kesehatan untuk memantau jalannya rancangan peraturan daerah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tang salah satu pasalnya menyebutkan salah satu pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jajarta, setelah Perda keluar dibuatkan surat ederan yang berlaku internal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lebih menyukseskan program pengendalian AMR	Selesai	SK Gubernur ataupun Perda terkait pengendalian AMR di Provinsi Daerah Khusus Jakarta	31 Desember 2025	T	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	Tidak ada kendala	Dilakukan verifikasi metode analisis terhadap	Penetapan target tahun 2026 mempertimbangkan capain TW 4 tahun 2025,	Selesai	1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang	31 Desember 2025	Y	O-10	Pemenuhan target Standar Ruang Lingkup



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
	olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		parameter uji yang nilai standar ruang lingkupnya masih nol	dengan strategi pemenuhan melalui verifikasi metode		lingkup 2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis 4. Melakukan pengujian dengan lebih dari satu penguji 5. Melakukan pengadaan alat laboratorium				Obat tidak tercapai
									KK-2	Personel uji terpapar virus/bakteri, reagen/bahan kimia
			Verifikasi metode analisis dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang agar pemenuhan kompetensi aspek 1 dan aspek 2 terpenuhi	Mempertahankan pengujian minimal dapat dilakukan oleh 2 orang				Y	KK-2	Personel uji terpapar virus/bakteri, reagen/bahan kimia
			Dilakukan pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan	Pengadaan alat laboratorium dan pemeliharaan alat agar kondisinya senantiasa baik serta				Y	A-1	Peralatan Laboratorium ber TKDN yang dibeli kualitasnya tidak sebaik peralatan laboratorium impor
									K-2	Pemblokiran Mandiri dalam rangka efisiensi anggaran APBN
			Dilakukan pelatihan internal untuk meningkatkan komeptensi	Peningkatan kompetensi penguji				Y	SDM-02	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak terlaksana sesuai perencanaan



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kab/Kota belum optimal dalam mengisi tools penilaian mandiri Kab/Kota Pangan Aman secara lengkap yang mencakup seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi sesuai ketentuan, antara lain disebabkan : - Pihak Pemkot / Pemkab tidak menetapkan personil khusus atau penanggung jawab (PJ) dari masing-masing OPD pengampu - Kurangnya monitoring oleh Pemkot / Pemkab dalam pengisian tools - OPD pengampu tidak memiliki data dukung atau tidak tertib dalam menyimpan dokumen yang dibutuhkan sesuai parameter yang ditetapkan - Jadwal kegiatan di OPD pengampu yang padat berbarengan dengan jadwal pengisian tools penilaian mandiri - PJ Pemkot / Pemkab tidak memahami tools penilaian	Pada awal tahun 2026 akan dilakukan kembali advokasi dan koordinasi kepada Pemkab/Pemkot Administrasi di DKI Jakarta terkait pelaksanaan penilaian Kab/Kota Pangan Aman dengan fokus terhadap : - Aktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/Kota Administrasi - Monitoring dan Evaluasi rutin berkala terhadap pelaksanaan penilaian mandiri tahun 2025 di masing-masing Kab/Kota Administrasi - Tertib dokumentasi pelaksanaan kegiatan oleh OPD terkai - Perencanaan	Melanjutkan kegiatan Pendampingan terhadap seluruh Kab/Kota Administrasi dalam rangka Penilaian Kab/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai target yang ditetapkan.	Selesai	Pendampingan terhadap seluruh Kab/Kota Administrasi dalam rangka Penilaian Kab/Kota Pangan Aman tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	31 Desember 2025	Y	O-18	Ketidaklengkapan atau tidak tersedianya data dukung Kota/Kabupaten sesuai kriteria penilaian Kota/Kabupaten Pangan Aman



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			pengisian tools dengan baik - PJ secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim pendamping Balai							
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	Pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana	Selesai	Pelaksanaan sesuai juknis Pusat	31 Desember 2025	T	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala	Untuk pelaksanaan kegiatan KIE selanjutnya tahun 2026 : - Menyusun perencanaan kegiatan sesuai pedoman -Meningkatkan koordinasi serta kolaborasi dengan stakeholder - Menyusun materi KIE sesuai dengan kebutuhan audiens dan isu terkini	Pelaksanaan kegiatan KIE sampai bulan Desember 2025 telah dilaksanakan	Selesai	Pelaksanaan KIE yang direncanakan di bulan Desember 2025 telah terlaksana	31 Desember 2025	Y	O-11	Masyarakat masih melakukan praktik yang tidak aman terkait obat dan makanan.
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	Seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah dilaksanakan karena komitmen, konsistensi pelaksanaan dan tersusunnya rencana aksi	Seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	Selesai	Seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah dilaksanakan	31 Desember 2025	Y	SS-09	Masih terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di sekolah yang sudah mendapatkan intervensi Program PJAS



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
19	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala	Seluruh tahapan program Kelurahan Pangan Aman telah dilaksanakan disebabkan komitmen, konsisten pelaksanaan, tersusunnya rencana aksi serta adanya forkom dan inovasi	Seluruh tahapan program Kelurahan Pangan Aman tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	Selesai	Seluruh tahapan program Kelurahan Pangan Aman telah dilaksanakan	31 Desember 2025	Y	SS-08	Terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi komunitas yang telah diintervensi oleh BBPOM
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	Seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan disebabkan adanya dukungan dan komitmen, pelaksanaan yang konsisten serta adanya forkom dengan pengelola pasar	Seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 telah selesai dilaksanakan	Selesai	Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	31 Desember 2025	Y	SS-07	Terdapat pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di lokasi pasar yang telah diintervensi/ dibina oleh BBPOM
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Terdapat kendala dalam pergantian KBLI dan juga penentuan kategori pangan sehingga seringkali kategori pangan perlu direvisi	Dilakukan bimtek peningkatan kapasitas UMKM dengan narasumber dari Badan POM terkait Pangan Steril Komersil, dan Rancangan Iklan dari	Akan dilaksanakan desk registrasi pangan olahan dan bimtek peningkatan kapasitas umkm berdaya saing	Selesai	Telah dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas UMKM tanggal 4 Desember 2025	31 Desember 2025	T	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			organisasi profesional							
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Keterbatasan anggaran untuk penyelesaian berkas perkara tahun 2025 dan carry over.	Penyelesaian perkara semaksimal mungkin dilaksanakan di bulan Desember tahun 2025 mengoptimalkan anggaran yang ada.	Penyelesaian 7 perkara carry over di tahun 2026.	Selesai	Menyelesaikan perkara yang sudah terbit P21 ke tahap selanjutnya (tahap 2).	31 Desember 2025	Y	F-12 F-15 F-20 H-1	Tidak ada
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Penyampaian laporan Patroli Siber dan profilling bulan Desember 2025 tepat waktu, realisasi tidak 100% karena masih terimbas capaian Mei dan Oktober 2025 serta nilai tindak lanjut rekomendasi yang kurang dari 100%. Namun jika dibandingkan target tahun 2025 (90%) maka capaian masih dengan kategori nilai sangat baik.	Perbaikan *timeline* penyampaian laporan profilling ke Direktorat Siber BPOM harus tepat waktu	Konsisten menyampaikan laporan Patroli Siber dan Profilling sesuai *timeline* setiap bulannya.	Selesai	Menyelesaikan dan menyampaikan laporan : -Patroli Siber dan Profilling di bulan November dengan total laporan sebanyak 12 secara tepat waktu. -Laporan tindak lanjut hasil rekomendasi sebanyak 1 laporan. -Laporan Hasil Kajian Analisis Kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 1 laporan.	31 Desember 2025	Y	F-16	Tidak ada
			Peningkatan pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan dari Direktorat Cegah Tangkal.	Pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal.				Y	F-16	Tidak ada



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala	Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat diupayakan melalui optimalisasi layanan informasi kepada pengguna. Hal ini penting mengingat kendala utama dalam layanan publik sering kali berasal dari ketidakpahaman pengguna terhadap prosedur dan persyaratan, yang berujung pada konsultasi berulang dan memperlambat proses perizinan.	-	Selesai	-	31 Desember 2025	T	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Lemahnya pendokumentasian, monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja	Perbaikan proses dokumentasi, monitoring, evaluasi serta pemenuhan saran perbaikan pembangunan ZI dari inspektorat utama	Kegiatan kelompok kerja didokumentasikan dengan baik, monev kegiatan kelompok kerja dilakukan secara komprehensif	Selesai	Penyusunan SOP untuk semua inovasi tahun 2025	31 Desember 2025	Y	O-53	Menurunnya atau stagnannya Nilai Pembangunan Zona Integritas BBPOM Jakarta akibat tidak optimalnya keberlanjutan implementasi reformasi



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Tingginya kompleksitas tugas dan beban layanan BBPOM Jakarta yang berpotensi mengalihkan fokus pada penguatan dan implementasi pembangunan ZI.	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Nilai Pembangunan ZI ke depan agar dapat melakukan penguatan internalisasi nilai integritas dan budaya pelayanan melalui pembinaan berkelanjutan serta peningkatan kualitas inovasi layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat	Melakukan reviu berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI. Mengembangkan dan mendokumentasikan inovasi pelayanan serta best practices. Memperkuat peran agen perubahan dan tim ZI dalam pengawalan implementasi WBK/WBBM.						birokrasi, inovasi layanan, dan internalisasi budaya integritas.
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Perhitungan target yang ditentukan kembali serta, perubahan dinamis penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kinerja, sehingga mempengaruhi konsistensi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.	Akan dilakukan perbaikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada tahun 2026, dengan cara penguatan pada seluruh komponen SAKIP secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pelatihan, pendampingan, dan asistensi teknis. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama organisasi. Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan dampak. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi	Selesai	Perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi telah sesuai dengan rencana aksi yang harus disesaikan dengan baik	31 Desember 2025	T	-	Keterkaitan antara perencanaan kinerja, indikator kinerja, dan *outcome* belum sepenuhnya kuat pada seluruh unit kerja



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis, penguatan dan pengukuran serta pelaporan, serta optimalisasi evaluasi internal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.	kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja (LKjIP) yang analitis, informatif, dan menggambarkan capaian kinerja secara nyata.Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data kinerja yang akurat dan terintegrasi.						
			Melakukan penajaman perencanaan kinerja SAKIP dengan memastikan indikator kinerja lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak.Serta juga menguatkan monitoring dan evaluasi kinerja internal agar hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal SAKIP serta penyusunan RTL.						



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Kualitas implementasi SAKIP belum merata di seluruh unit kerja, khususnya pada aspek keterkaitan antara perencanaan kinerja, indikator kinerja, dan *outcome* yang dihasilkan.Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan penyempurnaan perencanaan kinerja.Peningkatan standar penilaian AKIP nasional yang menuntut bukti kinerja berbasis *outcome* dan dampak belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM.	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan dan internalisasi budaya kinerja.	Implementasi RTL dan peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP. Evaluasi secara menyeluruh terhadap pengendalian dan pengelolaan kualitas penerapan/implementasi SAKIP untuk pedoman peningkatan di tahun berikutnya						Peningkatan standar penilaian AKIP yang semakin menekankan kualitas *outcome* dan dampak belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tujuh indikator pada penilaian IKPA, terdapat 6 (enam) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian *Output*. Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Deviasi Halaman III dengan nilai 92,26 dan sebagaimana penjelasan berikut: Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan pada triwulan II terdapat	Melaksanakan pengawasan sesuai perencanaan penarikan dana dari awal tahun	Rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi *output*, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan.	Selesai	Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain 1. Pengelolaan Keuangan; 2. Asistensi 3. Penyusunan 4. Perencanaan, 5. Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Bimbingan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);	31 Desember 2025	T	-	-

No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		deviasi sebesar 26,52% pada seluruh jenis belanja yang disebabkan rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan belanja alat aboratorium yang pada mulanya dijadwalkan pada triwulan II baru bisa dilaksanakan secara intensif di triwulan III, namun tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III DIPA	Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran	Revisi halaman III DIPA sesuai jadwal		dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di UPT POM. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi *output*, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal dan pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Kemudian dengan selalu mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai upaya untuk menaikkan				



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
						realisasi RO (rincian *output*) agar bisa melebihi target tanpa menambah alokasi anggaran.				
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal berupa perubahan sumber daya manusia pengelola risiko, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi risiko. Proses identifkasi risiko masih bersifat bottom up. BBPOM di Jakarta belum secara langsung menyerahkan risiko dengan respon risiko > 16 menjadi risiko pimpinan tinggi Madya. Respon risiko yang dipilih masih untuk risiko > 16 adalah share, seharusnya ketika risiko sudah diserahkan ke pimpinan tinggi Madya responnya	Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi risiko secara periodik serta pelaporan tindak lanjut mitigasi. Sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko secara berjenjang Penegasan peran pemiliki risko serta kewajiban pembahasan risiko dalam rapat manajemen.	Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan dampak.	Selesai	-	31 Desember 2025	(Risiko ini belum dikelola sebagai risiko pada tahun 2025, namun telah dimasukkan sebagai risiko pada tahun 2026)	-	-



No.	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		menjadi Accept. Manajemen risiko belum terintegrasi optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih tebatas pada administratif								



3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dengan realisasi tahun 2025 yang melampaui target, informasi kinerja ini menjadi dasar untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah efisien dan tepat sasaran.Anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk pengadaan sampel, pengadaan kebutuhan pengujian terutama reagen dan media mikrobiologi serta biaya perjalanan sampling. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Meskipun capaian tahun 2025 telah melebihi target 100%, namun evaluasi kinerja tetap perlu dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh sampel sedian farmasi yang berisiko tinggi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prioritas risiko. Informasi kinerja ini sangat bermanfaat untuk menentukan baseline target tahun berikutnya Dalam perencanaan periode berikutnya, indikator kinerja dapat disempurnakan dengan menambahkan aspek kualitas, seperti ketepatan waktu tindak lanjut atau efektivitas penanganan terhadap pelaku usaha, sehingga tidak hanya mengukur *output* tetapi juga *outcome* pengawasan.
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa monitoring rutin kepada sarana target melalui komunikasi langsung (chat) efektif dalam mendorong kepatuhan pelaporan, sehingga metode tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk memperkuat tindak lanjut dan mempercepat penyelesaian kendala, pada tahun berikutnya monitoring direncanakan dilakukan lebih terstruktur melalui pertemuan daring (Zoom). Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis tahun 2025 yang dilakukan secara online menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pembinaan kepada sarana
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.



No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemanfaatan informasi kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen seluruh personil yang terlibat dalam program sampling dan pengujian untuk selalu mematuhi ketentuan dalam Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia terbukti sudah efektif untuk mendukung pemenuhan target indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Untuk pelaksanaan kinerja di periode selanjutnya, pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporannya melalui SIPT harus terus diperketat dan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain masih tetap perlu ditingkatkan untuk menjamin konsistensi pencapaian target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Laporan kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder nantinya dapat dimanfaatkan dalam: Evaluasi kinerja UPT dan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait tindak lanjut persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang lintas sektor.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk: 1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan 2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja; 4. Dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk menetapkan/ mengubah peraturan/ kebijakan

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk: 1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan 2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja; 4. Dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk menetapkan/ mengubah peraturan/ kebijakan
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk: 1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan 2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk: 1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan 2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Informasi kinerja yang diperoleh dari kegiatan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan efektivitas pengawasan. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain: 1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan indikator terkait pada periode selanjutnya. 2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan sarana distribusi dan produksi sesuai masing-masing komoditi. 3. Informasi kinerja pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja instansi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Informasi kinerja yang diperoleh dari kegiatan pengawasan penandaan label produk tembakau dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan efektivitas pengawasan. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain: 1. Evaluasi Efektivitas Pengawasan Data hasil pengawasan, seperti tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan label (peringatan kesehatan, kandungan, dan informasi lainnya), digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. 2. Perbaikan Perencanaan dan Strategi Pengawasan Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area, jenis produk, atau pelaku usaha yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi, sehingga pengawasan selanjutnya dapat difokuskan secara lebih tepat sasaran dan berbasis risiko. 3. Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Informasi kinerja pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja instansi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penandaan label produk tembakau kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Laporan kinerja indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium nantinya dapat dimanfaatkan dalam: 1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium 2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. **1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan** Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan pendampingan capaian kabupaten/kota pangan aman dengan intensifikasi koordinasi dalam pengisian tools dan pengumpulan data dukung dalam rangka mengurangi *gap* penilaian mandiri dan hasil verifikasi di akhir periode penilaian. **2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran** Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja. **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja** Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. **4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya** Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk : 1. Meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang. Dengan adanya identifikasi terhadap kendala dan program yang mendukung keberhasilan, dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan 2. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah direkomendasikan 3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemanfaatan informasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja BBPOM Jakarta untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. **1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan** Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan KIE dengan memperkuat segmentasi sasaran dan metode digital yang lebih efektif. Kegiatan KIE difokuskan pada kelompok sasaran prioritas dengan pendekatan yang lebih interaktif agar berdampak langsung pada peningkatan efektivitas KIE. **2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran** Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan KIE yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja. **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja** Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode KIE, dan penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. **4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya** Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan** Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaaan keamanan pangan dengan metode pemberian bimtek dan sosialisasi secara daring dengan menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. **2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran** Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja. **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja** Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. **4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya** Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
19	Jumlah desa pangan aman	**1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan** Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi desa yang melaksanakan pembudayaaan keamanan pangan dengan metode pemberian bimtek dan sosialisasi secara daring dengan menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. **2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran** Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja. **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja** Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. **4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya** Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan** Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BBPOM Jakarta menyesuaikan pelaksanaan intervensi pasar yang melaksanakan pembudayaaan keamanan pangan dengan metode pemberian bimtek dan sosialisasi secara daring dengan menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. **2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran** Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang kurang efisien disederhanakan, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan selaras dengan prioritas kinerja. **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja** Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi berupa penyempurnaan materi, metode pemberian bimtek dan sosialisasi serta penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan. **4. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya** Informasi kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, termasuk penyesuaian target dan rencana penyempurnaan Indikator Kinerja. Penyesuaian dilakukan agar indikator lebih berorientasi pada *outcome* dan dampak kegiatan.



No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Laporan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan nantinya dapat dimanfaatkan dalam: 1. Evaluasi kinerja UPT terkait pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. 2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan target UMKM yang memperoleh sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pemanfaatan informasi kinerja keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jakarta dapat berupa: 1. Intensifikasi kegiatan intelijen guna mendapatkan target operasi penindakan yang menghasilkan perkara; 2. Revisi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian perkara carry over dan perkara tahun berjalan; 3. Monitoring dan evaluasi perkara dilakukan secara rutin guna pemantauan berkala terhadap kemajuan perkara;
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemanfaatan informasi kinerja keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target keberhasilan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat berupa: 1. Patroli siber, profiling, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal yang dilakukan sesuai standar; 2. Revisi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian patroli siber, profiling, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal ; 3. Pelaporan patroli siber, profiling, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal pada tahun-tahun berikutnya.



No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM Jakarta memanfaatkan informasi kinerja dari indeks pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan, melalui beberapa langkah strategis: 1. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan Aktivitas operasional disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sehingga program dan layanan lebih tepat sasaran dan selaras dengan target yang telah ditetapka 2. Penyesuaian Penggunaan Anggaran Alokasi anggaran disesuaikan sesuai prioritas kebutuhan layanan publik, memastikan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai target kinerja. 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian kinerja dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun area yang perlu perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi atau rencana aksi kinerja. 4.Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya Informasi kinerja menjadi dasar revisi rencana dan indikator kinerja untuk periode berikutnya, sehingga target lebih realistis, relevan, dan berorientasi hasil. Dengan pemanfaatan informasi kinerja secara sistematis, BBPOM Jakarta dapat meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas anggaran, dan akuntabilitas organisasi secara berkelanjutan.
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Informasi kinerja Zona Integritas (ZI) di Balai Besar POM di Jakarta dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, serta pelayanan publik di wilayah Jakarta.

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Pemanfaatan informasi kinerja yang dihasilkan melalui laporan kinerja merupakan elemen penting dalam mewujudkan manajemen kinerja yang efektif dan berorientasi pada hasil. Informasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam konteks BBPOM di Jakarta, pemanfaatan informasi kinerja telah digunakan sebagai instrumen utama dalam melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan untuk memastikan pencapaian kinerja yang lebih optimal. JIka melihat pada penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja, maka Informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja serta kegiatan yang kurang berdampak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, BBPOM di Jakarta melakukan penyesuaian aktivitas dan kegiatan, antara lain dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada aspek yang memiliki korelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja. Kegiatan yang dinilai kurang efektif dievaluasi dan disederhanakan, sementara kegiatan yang terbukti mendukung pencapaian kinerja diperkuat dan dioptimalkan. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tanpa menambah beban sumber daya secara signifikan. Pemanfaatan informasi kinerja juga berdampak pada penyesuaian penggunaan anggaran. Hasil analisis kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian *outcome*. Informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan input, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara lebih optimal. Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, termasuk dalam menilai sejauh mana rekomendasi dan rencana aksi kinerja telah dilaksanakan. Informasi kinerja digunakan untuk memantau progres tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi, sehingga memastikan bahwa perbaikan kinerja dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting bagi pimpinan dalam menentukan langkah-langkah korektif dan preventif untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja juga berdampak pada penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Informasi mengenai capaian indikator kinerja dan tantangan pelaksanaan kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan, termasuk rencana perubahan indikator kinerja. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada *outcome*. Dengan demikian, perencanaan kinerja pada periode berikutnya diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi riil dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja BBPOM di Jakarta telah memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk pencapaian kinerja berikutnya. Informasi kinerja tidak hanya digunakan sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, evaluasi keberhasilan kinerja, dan penyempurnaan perencanaan kinerja. Dengan pemanfaatan informasi kinerja yang semakin optimal, BBPOM di Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas pada periode berikutnya.

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, dirumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) sebagai upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun mendatang yaitu: 1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Segera meneliti dan melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA/POK apabila terdapat perubahan kebijakan program/ kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus; b. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran; c. Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja; d. Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; e. Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III DIPA secara akurat sesuaidengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman padatarget penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran serta memperhatikan momen khusus misalnya pelaksanaan pembayaran gaji 13, kegiatan yangtergantung pada musim, memiliki jadwal tertentu, dsb sebagai prediksi pencairan belanja pada Halaman III DIPA; f. Memanfaatkan secara optimal pemutakhiran RPD Bulanan melalui revisi Halaman III DIPA sesuai periode yang telah ditentukan; g. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan Satker segera dilakukan revisi DIPA; h. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; i. Memastikan perubahan kebijakan berdampak minimal pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional. j. Apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir” segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan; k. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim; l. Menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) BPOM dengan program Prioritas Nasional dan meningkatkan koordinasi denganpemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaanprogram kerja strategis BPOM, sehingga dapat meningkatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia; 2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah- langkah sebagai berikut: a. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara; b. Menetapkan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan anggaran kegiatan paling lambat awal Triwulan II Tahun 2026; Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan dan lain-lain. 3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan; b. Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu; c. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan; d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; 4. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran. Apabila terdapat keterlambatan dalam penyesuaian tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan, pejabat perbendaharaan Satker dapat dikenakan teguran/sanksi; b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana; 5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk addendum kontrak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN. 7. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyediakan informasi secara akurat dan *real time* terhadap pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran antara lain melalui laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik; b. Meningkatkan kompetensi pejabat perbendaharaan dan mendorong/mewajibkan pemenuhan syarat sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan.
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Informasi indeks manajemen risiko digunakan untuk mengidentifikasi area lemah dalam penerapan manajemen risiko, seperti aspek dokumentasi, pengujian efektivitas pengendalian, eskalasi risiko dan kompetensi SDM. Hal ini juga menjadi rujukan dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan prioritas penguatan pengendalian risiko. Indeks Manajemen Risiko menjadi bahan utama dalam forum evaluasi kinerja, baik triwulanan maupun tahunan. Evaluasi tidak hanya melihat nilai akhir indeks, tetapi juga menganalisis setiap risiko yang dapat terjadi dalam setiap proses. Evaluasi juga harus memperhatikan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan Matrisk rekomendasi yang memuat informasi risiko juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja dan daftar risiko tahun 2026 melalui sapaapip. Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi Indeks Manajemen Risiko harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam siklus manajemen kinerja. Indeks tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan aktivitas, mengoptimalkan

No.	Nama Indikator	Pemanfaatan Informasi Kinerja
		anggaran, memperkuat evaluasi, dan menyempurnakan perencanaan kinerja, sehingga BBPOM di Jakarta mampu meningkatkan maturitas manajemen risiko secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif dan akuntabel.

3.4 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar 65,22% dari pagu Rp45.007.401.000, maka realisasi periode ini masih **di bawah** target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 92% .

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

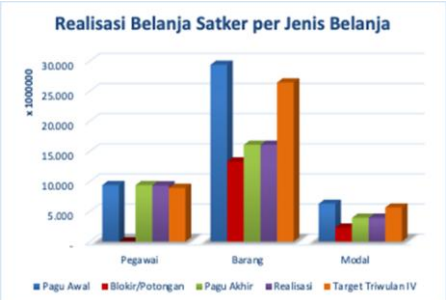
NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432747 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	9,375,915,000	29,355,275,000	6,276,211,000	0	0	0	0	0	0	45,007,401,000
		REALISASI	9,330,695,130 (99.52%)	16,065,560,093 (54.73%)	3,958,173,027 (63.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29,354,428,250 (65.22%)
		SISA	45,219,870	13,289,714,907	2,318,037,973	0	0	0	0	0	0	15,652,972,750
GRAND TOTAL		**PAGU**	**9,375,915,000**	**29,355,275,000**	**6,276,211,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,007,401,000**
		REALISASI	**9,330,695,130 (99.52%)**	**16,065,560,093 (54.73%)**	**3,958,173,027 (63.07%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**29,354,428,250 (65.22%)**
		SISA	**45,219,870**	**13,289,714,907**	**2,318,037,973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,652,972,750**

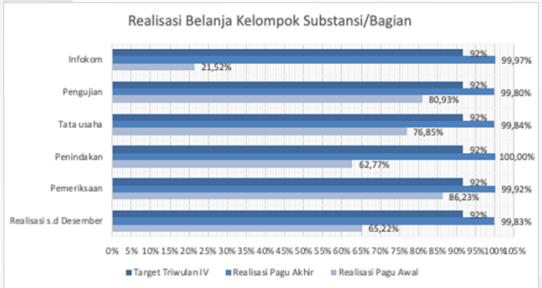
Sumber Data:
https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiAkunES1 08-01-26 17:01:40

2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, atas arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 total blokir otomatis Balai Besar POM di



Jakarta sebesar Rp4.663.526.000. Dan sesuai surat Sestama BPOM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Feb 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, jumlah blokir Balai Besar POM di Jakarta bertambah sebesar Rp15.826.305.000. Kemudian atas dasar surat Sestama BPOM B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, jumlah blokir anggaran yang dimanfaatkan kembali sebesar Rp4.502.209.000. Selanjutnya berdasarkan surat Sestama BPOM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA 2025, besaran anggaran yang dikurangi adalah Rp644.490.000. Berdasarkan Nodin Sestama BPOM No. PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 3 November 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 terdapat pembukaan blokir RO BAH senilai Rp383.595.000, sehingga total efisiensi dari Balai Besar POM di Jakarta menjadi Rp15.604.027.000. Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 dengan pagu dikurangi blokir keseluruhan adalah sebesar **99,83%** dari pagu setelah relaksasi Rp29.403.374.000.





3. Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai **99,52%** dan belanja modal sebesar **63,02%**, sedangkan realisasi terendah adalah belanja barang sebesar **54,73%**. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan IV, berdasarkan pasal 9 PER-

5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja barang minimal 90%, belanja pegawai minimal 95%, dan belanja modal minimal 90%, terdapat selisih lebih sebesar 4,52% pada belanja pegawai; selisih kurang 35,27% pada belanja barang dan 26,98% pada belanja modal .

4. Sampai dengan Desember 2025 deviasi halaman III DIPA secara umum telah terdapat perbaikan, tetapi baru mendapatkan nilai **92,26** dengan persentase rata-rata deviasi kumulatif yang diperoleh sebesar 7,74% dan termasuk kategori **buruk** karena melampaui ambang batas 5% .
5. Sesuai data OMSPAN (dicetak tanggal 8 Januari 2026), nilai IKPA sampai dengan November 2025 adalah **98,84** (Sangat Baik), dan lebih tinggi dibandingkan nilai pada periode yang sama di TA 2024 yaitu 97,93. Namun demikian, nilai IKPA yang diperoleh belum maksimal karena nilai Deviasi Halaman III DIPA yang belum optimal. Deviasi halaman III DIPA tidak dapat mendapat nilai 100 karena beberapa alasan yaitu KIE yang sudah direncanakan tetapi batal dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2025; serta terdapat belanja modal yang tidak dapat terealisasi di bulan Juni 2025 .
6. Perlu diterapkan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:
    1) Fokus dan melakukan percepatan realisasi kegiatan yang terdampak revisi DIPA pembukaan blokir TA 2025;
    2) Pengadaan barang/jasa diprioritaskan dan jika memungkinkan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem belanja digital seperti : e- katalog/e-purchasing dan/atau Digipay Satu;
    3) Mengajukan uang persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran



langsung (Ls) dalam proses pembayaran dan mempercepat revolving UP;

4) Percepatan implementasi belanja dan pembayaran non tunai dengan Digipay Satu, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), atau cash management system;
5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan pelaksana teknis) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, seperti kegiatan apa, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan akan dilaksanakan dan kapan akan diajukan proses pencairan dana yang kemudian datanya nanti akan digunakan untuk pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.

1.4 TINGKAT EFISIENSI

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1



Apabila IE ≥ SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE ≤ SE maka dianggap tidak efisien.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 83 Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Tahun 2025

No			Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		No.		T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	99,79	111,19%	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%	**1,11**	**0,11**	**100%**	Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,78	106,85%	2.000.000	2.000.000	100,00%	**1,07**	**0,07**	**100%**	Efisien
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,21	105,73%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	91,55	104,03%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	98,69	105,55%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,44	105,98%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25	96,34	101,14%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,85	102,03%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,02**	**0,02**	**100%**	Efisien



No		No.	Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,8	99,12	104,56%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,05**	**0,05**	**100%**	Efisien
		12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	90,40	106,35%	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	100	103,41	103,41%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,03**	**0,03**	**100%**	Efisien
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82	88,3	107,68%	6.234.360.000	6.233.767.453	99,99%	**1,08**	**0,08**	**100%**	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	64,29	100,45%	13.680.000	13.645.463	99,75%	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,47	100,47%	2.177.218.000	2.176.741.230	99,98%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100,00%	86.280.000	86.007.824	99,68%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		19	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00%	124.801.000	124.781.000	99,98%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	30.690.000	30.543.025	99,52%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,9	24,05	142,31%	51.418.000	51.293.750	99,76%	**1,43**	**0,43**	**92%**	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70	76,54	109,34%	392.564.000	392.559.542	100,00%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	93,75	104,17%	137.996.000	137.995.294	100,00%	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,7	4,94	105,11%	577.890.000	577.521.837	99,94%	**1,05**	**0,05**	**100%**	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	93,61	100,12%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,52	81,33	97,38%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74%	**0,98**	**-0,02**	**75%**	Tidak efisien
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	5	5	100,00%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien

No			Indikator	*Output*			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		No.		T	R	%	T	R	%				
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	3,05	2,906	95,41%	16.335.799.000	16.293.704.795	99,74%	**0,96**	**-0,04**	**75%**	Tidak efisien

Berdasarkan tabel tersebut, rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara 0,00 – 0,43. Dapat diketahui bahwa dari perhitungan efisiensi anggaran pada 28 indikator utama didapatkan 2 Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai target yaitu Nilai AKIP BBPOM di Jakarta dan Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta. Dari 28 indikator diketahui ada 26 (dua puluh enam) indikator yang "Efisien", tidak efisiennya pemanfaatan anggaran pada 2 indikator pada umumnya disebabkan karena *gap* antara capaian kinerja dan capaian anggaran yang terlalu besar dikarenakan adanya kebijakan efisiensi tahun 2025 sehingga pembiayaan ditekan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja BBPOM di Jakarta.

Tabel 3. 84 Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	*Output*	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,03	99,97	1,05	0,05	100%	Efisien
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,45	99,75	1,01	0,01	100%	Efisien
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,12	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	142,31	99,76	1,43	0,43	92%	Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	109,34	99,999	1,09	0,09	100%	Efisien
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	104,17	99,999	1,04	0,04	100%	Efisien
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	105,11	99,94	1,05	0,05	100%	Efisien
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,19	99,74	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien



erdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 8 sasaran strategis yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, terdapat 7 sasaran strategis yang efisien dan 1 sasaran strategis yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis ini di Tahun 2025 sebesar Rp 16.253.321.018 ,- dari pagu anggaran Rp 16.257.951.000- dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 99,97%. Rata-rata nilai IE adalah 1,05 dengan nilai rata-rata TE adalah 0,05 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi *gap* yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya, KIE farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, serta pengawasan iklan.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp 13.645.463,- dari pagu anggaran Rp 13.680.000,- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99,75%. Rata-rata nilai IE adalah 1,01 dengan nilai rata-rata TE adalah 0,01 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Penggunaan anggaran yang efisien ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja.

Capaian *output* yang sama dengan target dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Kedepan, kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pada periode berikutnya.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp 2.418.073.079,- dari pagu anggaran Rp 2.418.989.000 atau 99,96%. Rata-rata nilai IE adalah 1,00 dengan nilai rata-rata TE adalah 0,00 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan pendampingan sekolah, desa dan pasar. . Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah sepenuhnya sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai Hasil pengukuran efisiensi ini menjadi indikator penting perlunya penajaman strategi pengelolaan sumber daya ke depan. Informasi efisiensi dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap desain kegiatan, pengalokasian anggaran, serta pemilihan metode pelaksanaan yang lebih hemat sumber daya namun tetap berdampak.
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp



51.293.750 dari pagu anggaran Rp 51.418.000- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99,76%. Rata-rata nilai IE adalah 1,43 dengan nilai rata-rata TE adalah 0,43 dengan capaian TE adalah 92% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM untuk memperoleh memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang diserap pada Tahun 2025 sebesar Rp 392.559.542- dari pagu anggaran Rp 392.564.000- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99.99%. Rata-rata nilai IE adalah 1,09 dengan nilai rata-rata TE adalah 0,09 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Keberhasilan ini disebabkan oleh terselesaikannya perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara dari 5 (lima) perkara baru di tahun 2025 dan terselesaikannya perkara *carry over* sebanyak 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) perkara
6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp 137.995.294,- dari pagu anggaran Rp 137.996.000,- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99,99%. Rata-rata nilai IE 1,04 adalah dengan nilai rata-rata TE adalah 0,004 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi *gap* yang terlalu tinggi antara anggaran yang derap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan;



Operasi Intelijen dan Pemberkasan Perkara. Keberhasilan ini disebabkan oleh terselesaikannya pelaporan patroli siber, *profiling*, analisis kerawanan kejahatan, dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal pada tahun 2025.

7. Sasaran Strategis 7: Terlaksananya kegiatan Layanan Publik UPT yang prima yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp 577.890.000,- dari pagu anggaran Rp 577.521.837,- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99,94%. Rata-rata nilai IE 1,05 adalah dengan nilai rata-rata TE adalah 0,005 dengan capaian TE adalah 100% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Efisien.

   Tingkat efisiensi yang sudah optimal terutama dipengaruhi oleh metode pelayanan publik yang masih didominasi oleh layanan tatap muka. Pola pelayanan tersebut memerlukan dukungan sumber daya yang relatif besar, seperti kebutuhan petugas layanan, ruang pelayanan, serta biaya operasional, dibandingkan dengan metode pelayanan berbasis digital. Selain itu, proses pengaduan dan pengumpulan umpan balik kepuasan masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi turut meningkatkan penggunaan sumber daya. Meskipun demikian, capaian Indeks Pelayanan Publik yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah terjaga dengan baik. Informasi hasil pengukuran efisiensi ini menjadi dasar untuk melakukan penajaman strategi ke depan, antara lain melalui optimalisasi layanan digital, penyederhanaan alur pelayanan, serta penguatan integrasi sistem pelayanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat meningkat pada periode berikutnya tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai.



8. Sasaran Strategis 8:Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dan efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Anggaran yang diserap pada Tahun 2025 Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp 65.174.819.180,- dari pagu anggaran Rp 65.343.196.000,- dengan capaian sasaran strategis sebesar 99,74%. Rata-rata nilai IE 0,98 adalah dengan nilai rata-rata TE adalah -0,02 dengan capaian TE adalah 75% kategori pada rata-rata sasaran strategisnya adalah Tidak Efisien. Mengindikasikan bahwa secara kuantitatif belum terdapat penghematan anggaran yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian kinerja. Dengan kata lain, capaian kinerja yang diperoleh masih dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif tinggi, sehingga belum menunjukkan adanya efisiensi optimal. Capaian tingkat efisiensi sebesar 75 persen yang dikategorikan “Tidak Efisien” juga menjadi sinyal penting bagi BBPOM di Jakarta untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus menurunkan kualitas kinerja. Upaya peningkatan efisiensi dapat diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis, penguatan perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun serapan anggaran sangat tinggi, *output* yang dihasilkan belum maksimal sesuai target. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan belum sepenuhnya menghasilkan kinerja yang proporsional. Secara prinsip efisiensi, idealnya capaian *output* minimal sebanding atau lebih tinggi dibandingkan persentase penggunaan input. Dalam kasus ini, input hampir 100%, tetapi *output* masih di bawah target.



Tabel Tingkat Efisiensi per Rincian *Output* Tahun 2025

Rician *Output*		*OUTPUT*			INPUT			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)				
a	*b*	*c*	*d*	*e=d/c*100*	*f*	*g*	*h=g/f*100*				
DR-3165-AEA-Koordinasi	001-Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	137.996.000	137.995.294	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	424	872	205,66	577.890.000	577.521.837	99,9	2,06	1,06	86%	Tidak Efisien
DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	32.375	9.982	30,83	2.155.008.000	2.154.685.901	100,0	0,31	-0,69	75%	Tidak Efisien
DR-3165-BKB-Pemantauan produk	001-Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	73.679.000	73.677.270	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	001-Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	17	54,84	22.210.000	22.055.329	99,3	0,55	-0,45	75%	Tidak Efisien
DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	002-Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	3.330.000	3.330.000	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100,00	65.000.000	65.000.000	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-CBV-Sarana Bidang Kesehatan	001-Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	0	0	0	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	001-Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.343.987.000	2.343.924.426	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	U01-PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA	4	5	125,00	392.564.000	392.559.542	100,0	1,25	0,25	95%	Efisien
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	15	15	100,00	86.280.000	86.007.824	99,7	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Desa Pangan Aman	5	5	100,00	124.801.000	124.781.000	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	30.690.000	30.543.025	99,5	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	90	90	100,00	2.000.000	2.000.000	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien

Rician *Output*		*OUTPUT*			INPUT			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)				
a	*b*	*c*	*d*	*e=d/c*100*	*f*	*g*	*h=g/f*100*				
DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	76	76	100,00	51.418.000	51.293.750	99,8	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	721	741	102,77	699.296.000	699.242.730	99,99	1,03	0,03	100%	Efisien
DR-3165-QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	002-Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.649	1.652	100,18	1.356.864.000	1.356.732.622	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	183	225	122,95	219.393.000	219.289.371	100,0	1,23	0,23	95%	Efisien
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	003-Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa UPT	18	18	100,00	13.680.000	13.645.463	99,7	1,00	0,00	100%	Efisien
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Produk	004-Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	830	891	137,00	963.125.000	962.312.322	99,9	1,37	0,37	95%	Efisien
DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	001-Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,00	100,00	3.890.373.000	3.889.843.027	100,0	1,00	0,00	100%	Efisien
WA-6384-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956- Layanan BMN	1	1,00	100,00	8.000.000	0	0,0	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
WA-6384-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	1,00	100,00	19.626.537.000	16.151.697.525	82,3	1,22	0,22	95%	Efisien

Untuk mendukung capaian 8 Sasaran Kegiatan, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 18 kegiatan efisien, 5 kegiatan tidak efisien. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -0,69 – 0,37. Kegiatan yang tidak efisiensi yaitu Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT, Masyarakat yang ditingkatkan



pengetahuannya melalui KIE, Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT, Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, dan Layanan BMN. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 sehingga anggaran nonblokir yang tersisa pada kegiatan ini tidak mampu mencukupi kegiatan KIE utamanya bersama Tokoh Masyarakat sehingga target tahunan tidak tercapai. Kemudian pada rincian *output* Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia anggaran pada RO ini direncakanan akan digunakan untuk renovasi ruang staf laboratorium dan ruang pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta akan tetapi dilakukan blokir anggaran sampai dengan akhir tahun 2025.

Dari Kegiatan di tahun 2025 ini masih banyak yang tidak hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya. Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat prioritas;
2. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Rapat Koordinasi dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan lainnya;
3. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, sehingga menghemat biaya terutama untuk dokumentasi dan pencetakan;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai *output*nya untuk membiayai kegiatan lain sehingga capaian kinerja dapat meningkat.



BAB IV
PENUTUP



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja pada Tahun 2025 ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2025 untuk 8 (delapan) sasaran kegiatan yang diukur melalui 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Tahun ini dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis mencapai target dengan kategori "Sangat Baik" dengan *range* nilai 100% < x ≤ 110% sebagai berikut:
    1) Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai sasaran strategis sebesar 104,88%
    2) Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai sasaran strategis sebesar 100,45%
    3) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai sasaran strategis sebesar 100,12%
    4) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu nilai sasaran strategis sebesar 142,31%
    5) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja nilai sasaran strategis sebesar 109,34%



6) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT nilai sasaran strategis sebesar 104,17%

7) Layanan Publik UPT yang prima nilai sasaran strategis sebesar 105,11%

2. Sasaran strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 98,23% dengan kategori "Baik" dengan *range* nilai 90% < x ≤ 100%.

4.2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, beberapa upaya peningkatan kinerja yang akan datang perlu dilakukan

1. Pada tahun selanjutnya, diharapkan penerapan tata kelola kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara lebih konsisten dan akuntabel guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
2. Diperlukan analisis akar masalah secara mendalam terhadap sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada pada kategori *"Tidak Dapat Disimpulkan"*, sebagai dasar penyusunan strategi pencapaian kinerja yang lebih efektif pada tahun berikutnya.
3. Pada tahun mendatang, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sasaran strategis diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi ketidaktercapaian target.
4. Indikator dan sasaran strategis yang belum dapat dihitung capaiannya pada tahun berjalan perlu disempurnakan pada tahun berikutnya, agar proses pengukuran kinerja dapat dilakukan secara sistematis, akurat, dan mendukung penilaian kinerja yang valid.



5. Pada tahun selanjutnya, diharapkan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dapat semakin ditingkatkan untuk saling mendukung pencapaian seluruh sasaran strategis secara optimal.
6. Hasil evaluasi kinerja tahun berjalan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dapat terus meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. Dokumen Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.8 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82 Persentase
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.06 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.9 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93.5 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.52 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,007,401,000 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,372,864,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,634,537,000

Jakarta, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN 2. Pengukuran Kinerja (IKU)

Capaian RHPK Bulan Desember

Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Volume Indikator					CAPAIAN PER SASARAN TAHUN 2025	Anggaran		
			Target Tahun 2025	Target Akhir Tahun Renstra (2029)	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Tahun 2025	% Capaian Terhadap Akhir Tahun Renstra (2029)		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g=f/d*100*	*h=f/e*100*	*i*	*j*	*k*	*l=k/j*100*
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	*94,75*	99,79	111,19%	*105,32%*	**105,03%**	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	*30*	27,78	106,85%	*92,60%*		97.400.000	2.000.000	2,05%
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	*96*	100,00	108,70%	*104,17%*		699.296.000	699.242.730	99,99%
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	*100*	100,00	100,00%	*100,00%*		699.296.000	699.242.730	99,99%
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	*95,00*	96,21	105,73%	*101,27%*		699.296.000	699.242.730	99,99%
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,00	*90,00*	91,55	104,03%	*101,72%*		219.393.000	219.289.371	99,95%
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	*98,00*	98,69	105,55%	*100,70%*		219.393.000	219.289.371	99,95%
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	*95,00*	96,44	105,98%	*101,52%*		219.393.000	219.289.371	99,95%
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25	*99,50*	96,34	101,14%	*96,82%*		963.125.000	962.312.322	99,92%
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	*95,00*	92,85	102,03%	*97,74%*		963.125.000	962.312.322	99,92%
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,80	*98,00*	99,12	104,56%	*101,14%*		963.125.000	962.312.322	99,92%
	12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	*89,00*	92,27	108,55%	*103,67%*		1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	100,00	*100,00*	103,41	103,41%	*103,41%*		963.125.000	962.312.322	99,92%
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82,00	*90,00*	88,30	107,68%	*98,11%*		7.826.592.000	6.233.767.453	79,65%
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	*83,33*	16,67	100,00%	*20,00%*		699.296.000	699.242.730	99,99%
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64,00	*79,00*	64,29	100,45%	*81,38%*	**100,45%**	13.680.000	13.645.463	99,75%
	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	*89,48*	87,47	100,47%	*97,75%*		9.733.228.000	2.176.741.230	22,36%

Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Volume Indikator					CAPAIAN PER SASARAN TAHUN 2025	Anggaran		
			Target Tahun 2025	Target Akhir Tahun Renstra (2029)	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Tahun 2025	% Capaian Terhadap Akhir Tahun Renstra (2029)		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15,00	*29,00*	15,00	100,00%	*51,72%*	**100,12%**	516.930.000	86.007.824	16,64%
	19	Jumlah desa pangan aman	5,00	*8,00*	5,00	100,00%	*62,50%*		779.693.000	124.781.000	16,00%
	20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	*2,00*	1,00	100,00%	*50,00%*		118.779.000	30.543.025	25,71%
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,90	*95,24*	24,05	142,31%	*25,25%*	**142,31%**	341.171.000	51.293.750	15,03%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70,00	*78,00*	76,54	109,34%	*98,13%*	**109,34%**	392.564.000	392.559.542	100,00%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	*94,00*	93,75	104,17%	*99,73%*	**104,17%**	452.653.000	137.995.294	30,49%
Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,70	*4,90*	4,94	105,11%	*100,82%*	**105,11%**	577.890.000	577.521.837	99,94%
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,50	*95,00*	93,61	100,12%	*98,54%*	**98,19%**	20.318.143.000	16.293.704.795	80,19%
	26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,52	*84,52*	81,33	97,38%	*96,23%*		20.918.143.000	16.293.704.795	77,89%
	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	5,00	*5,00*	5,00	100,00%	*100,00%*		20.318.143.000	16.293.704.795	80,19%
	28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	3,05	*3,40*	2,906	95,28%	*85,47%*		20.318.143.000	16.293.704.795	80,19%

LAMPIRAN 3. Pengukuran Kinerja Program / Kegiatan

Capaian Program dan Kegiatan atas pencapaian target bulan Desember 2025

Rician Output		Rincian Output			Anggaran			Kendala/hambatan atas pencapaian target
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	*b*	*c*	*d*	*e=d/c*100*	*f*	*g*	*h=g/f*100*	
DR-3165-AEA-Koordinasi	001-Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	452.653.000	137.995.294	30,5	Tidak terdapat Kendala
DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	424	872	205,66	577.890.000	577.521.837	99,9	Pelaku usaha melakukan pengajuan perbaikan dokumen CPPOB
DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	32.375	9.982	30,83	9.625.018.000	2.154.685.901	22,4	Adanya efisiensi/blokir anggaran, menyesuaikan perencanaan prioritas anggaran
DR-3165-BKB-Pemantauan produk	001-Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	490.000.000	73.677.270	15,0	Adanya efisiensi anggaran sesuai dengan surat Inpres nomor 1 tahun 2025
DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	001-Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	17	54,84	108.210.000	22.055.329	20,4	Tidak terdapat Kendala
DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	002-Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	100.000.000	3.330.000	3,3	Tidak terdapat Kendala
DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100,00	93.606.000	65.000.000	69,4	Revitalisasi alat laboratorium sehingga output CAN akan digabung dari realisasi sisa alat laboratorium.
DR-3165-CBV-Sarana Bidang Kesehatan	001-Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	600.000.000	0	0,0	Adanya efisiensi/pemblokiran anggaran; Perubahan cara penilaian dan tools SKL
DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	001-Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.343.987.000	2.343.924.426	100,0	Informasi mengenai produk ilegal penanganan kasus perkara, tetapi tidak ada penambahan SDM yang memadai
DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	U01-PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA	4	5	125,00	392.564.000	392.559.542	100,0	Revisi anggaran yang sudah disusun belum disesuaikan dengan kegiatan terbaru
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	15	15	100,00	516.930.000	86.007.824	16,6	Revisi anggaran yang sudah disusun belum disesuaikan dengan kegiatan terbaru
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Desa Pangan Aman	5	5	100,00	779.693.000	124.781.000	16,0	Revisi anggaran yang sudah disusun belum disesuaikan dengan kegiatan terbaru
DR-3165-QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	118.779.000	30.543.025	25,7	Terkendala akan koordinasi pelayanan fasilitas kesehatan yang menjadi target KIE
DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	90	90	100,00	97.400.000	2.000.000	2,1	Pendampingan masih terbatas dalam rangka Bimtek, CPOTB, CPKB dan CPPOB
DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	76	76	100,00	341.171.000	51.293.750	15,0	1. Belum ada kesiapan lab regionalisasi di wilayah kerja UPT 2.Blokir anggaran pada sampel makanan yang diperiksa

Rician Output		Rincian Output			Anggaran			Kendala/hambatan atas pencapaian target
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	*b*	*c*	*d*	*e=d/c*100*	*f*	*g*	*h=g/f*100*	
DR-3165-QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	721	741	102,77	699.296.000	699.242.730	99,99	1. Belum ada kesiapan lab regionalisasi di wilayah kerja UPT 2.Blokir anggaran pada sampel makanan yang diperiksa
DR-3165-QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	002-Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.649	1.652	100,18	1.356.864.000	1.356.732.622	100,0	1. adanya efisiensi/pemblokiran anggaran 2. Masih terbatasnya sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	183	225	122,95	219.393.000	219.289.371	100,0	1. adanya efisiensi/pemblokiran anggaran 2. Masih terbatasnya sarana pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	003-Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa UPT	18	18	100,00	13.680.000	13.645.463	99,7	Adanya pemblokiran anggaran sehingga pelaksanaan tugas disesuaikan kengan kondisi sumber daya yang tersedia
DR-3165-QIC-Pengawasan dan Pengendalian Produk	004-Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	830	891	137,00	963.125.000	962.312.322	99,9	Adanya efisiensi/pemblokiran anggaran
DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	001-Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,00	100,00	5.482.605.000	3.889.843.027	70,9	Adanya efisiensi/pemblokiran anggaran
WA-6384-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956- Layanan BMN	1	1,00	100,00	8.000.000	0	0,0	Adanya efisiensi/pemblokiran anggaran
WA-6384-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	1,00	100,00	19.626.537.000	16.151.697.525	82,3	

LAMPIRAN 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

Tingkat Efisiensi Bulan Desember

No		No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	99,79	111,19%	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%	**1,11**	**0,11**	**100%**	Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27,78	106,85%	97.400.000	2.000.000	2,05%	**0,02**	**-0,98**	**75%**	Tidak efisien
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,21	105,73%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	91,55	104,03%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	98,69	105,55%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,44	105,98%	219.393.000	219.289.371	99,95%	**1,06**	**0,06**	**100%**	Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,25	96,34	101,14%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,85	102,03%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,02**	**0,02**	**100%**	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,8	99,12	104,56%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,05**	**0,05**	**100%**	Efisien
		12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	92,27	108,55%	1.356.864.000	1.356.732.622	99,99%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Tidak efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	100	103,41	103,41%	963.125.000	962.312.322	99,92%	**1,03**	**0,03**	**100%**	Tidak efisien
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82	88,3	107,68%	7.826.592.000	6.233.767.453	79,65%	**1,35**	**0,35**	**95%**	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00%	699.296.000	699.242.730	99,99%	**1,00**	**0,00**	**100%**	Tidak efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	64,29	100,45%	13.680.000	13.645.463	99,75%	**1,01**	**0,01**	**100%**	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,47	100,47%	9.733.228.000	2.176.741.230	22,36%	**4,49**	**3,49**	**75%**	Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100,00%	516.930.000	86.007.824	16,64%	**6,01**	**5,01**	**75%**	Tidak efisien
		19	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00%	779.693.000	124.781.000	16,00%	**6,25**	**5,25**	**75%**	Tidak efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	118.779.000	30.543.025	25,71%	**3,89**	**2,89**	**75%**	Tidak efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,9	24,05	142,31%	341.171.000	51.293.750	15,03%	**9,47**	**8,47**	**75%**	Tidak efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70	76,54	109,34%	392.564.000	392.559.542	100,00%	**1,09**	**0,09**	**100%**	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	93,75	104,17%	452.653.000	137.995.294	30,49%	**3,42**	**2,42**	**75%**	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,7	4,94	105,11%	577.890.000	577.521.837	99,94%	**1,00**	**0,00**	**75%**	Tidak efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,5	93,61	100,12%	20.318.143.000	16.293.704.795	77,89%	**0,78**	**-0,22**	**75%**	Tidak efisien
		26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,52	81,33	97,38%	20.918.143.000	16.293.704.795	80,19%	**0,80**	**-0,20**	**75%**	Tidak efisien
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	5	5	100,00%	20.318.143.000	16.293.704.795	80,19%	**0,80**	**-0,20**	**75%**	Tidak efisien
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	3,05	2,906	95,28%	20.318.143.000	16.293.704.795	80,19%	**0,80**	**-0,20**	**75%**	Tidak efisien
				63,38	**66,23**		**4.026.597.964**	**3.036.401.042**	**0,76**	**1,96**	**0,96**		



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'syafiiyah no 133 Cilangkap,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta 13870

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

021-84304046
021-84304048

082211267771

@bpom.jakarta

@BPOMJakarta